



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Polisi Militer No.2 Telp. (0380) 833462 (0380) 838447 - Fax (0380) 832975, Kupang





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagai dokumen tahunan daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Gubernur menetapkan RKPD Provinsi dengan Peraturan Gubernur setelah Rencana Kerja Pemerintah Pusat ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
8. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD Tahun 2024.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2024 dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026.
- (3) Dokumen RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - f. BAB VI : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (4) Rincian lebih lanjut dari RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 dan rancangan APBD tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah berpedoman pada RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan RKPD Tahun 2024.
- (2) Pimpinan PD melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD Tahun 2024 dengan rencana kerja PD.
- (3) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada kepala Bappelitbangda untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya. **h**

Pasal 5

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD tahun anggaran 2024 oleh Menteri.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 Juni 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NUSA TENGGARA TIMUR, 

SETDA
KOSMAS D. LANA
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 037



DAFTAR ISI

Daftar Isii

Daftar Tabel.....ii

Daftar Gambariv

BAB I. PendahuluanI-1

1.1. Latar Belakang.....I-1

1.2. Dadar HukumI-

1.3. Hubungan Antar DokumenI-

1.4. Maksud dan TujuanI-

1.5. Sistematika PenulisanI-

BAB II. Gambaran Umum dan Kondisi DaerahII-1

2.1. Kondisi Umum DaerahII-1

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMDII-76

2.3. Permasalahan Pembangunan DaerahI-154

BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan DaerahIII-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi DaerahIII-1

3.2. Arah Kebijakan Keuangan DaerahIII-11

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan DaerahIV-1

4.1. Arah RPJMN 2020-2024 dan RPD 2024-2026IV-1

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....IV-10

4.3. Prioritas Pembangunan DaerahIV-12

4.4. Inovasi DaerahIV-38

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/KotaV-1

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan DaerahVI-1

BAB VII. Kinerja Penyelenggara Pemerintah DaerahVII-1

BAB VIII. PenutupVIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2020-2022	II-2
Tabel 2.2	Kawasan Lindung di Provinsi NTT	II-3
Tabel 2.3	Kawasan Konservasi Provinsi NTT.....	II-5
Tabel 2.4	Tabel Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022.....	II-10
Tabel 2.5	Luas Suaka Alam Dan Pelestarian Alam (Hektar) di Provinsi NTT.....	II-12
Tabel 2.6	Inflasi Menurut Bulan (Persen) Tahun 2022.....	II-12
Tabel 2.7	PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017 – 2020	II-14
Tabel 2.8	Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2019	II-16
Tabel 2.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut Komponen, 2020-2022	II-17
Tabel 2.10	Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2020-2022	II-18
Tabel 2.11	Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2020-2022	II-20
Tabel 2.12	Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2022	II-22
Tabel 2.13	Estimasi Kemiskinan Ekstrem di NTT Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022.....	II-24
Tabel 2.14	Status Gizi Balita di NTT Tahun 2018-2022.....	II-27
Tabel 2.16	Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten/Kota di Wilayah NTT Tahun 2018-2022.....	II-29
Tabel 2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2020-2022.....	II-30
Tabel 2.18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2014-2022.....	II-31
Tabel 2.19	Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2020.....	II-31
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur 15-18 Tahun per Kabupaten/Kota (%) Tahun 2020-2022.....	II-32
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010.....	III-3
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010.....	III-4
Tabel 3.3	Inflasi dan Andil Inflasi Gabungan NTT Desember 2022.....	III-6
Tabel 3.4	Jumlah dan presentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2020-2022.....	III-11



Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2017-2021.....	III-12
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTT 2017 – 2020	III-10
Tabel 3.7	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2017 – 2019	III-13
Tabel 3.8	Kinerja Belanja Daerah TA.2017-2021	III-14
Tabel 3.9	Rata-rata proporsi Belanja Daerah.....	III-14
Tabel 3.10	Rata-rata Pertumbuhan Belanja daerah Tahun 2018-2021	III-15
Tabel 3.11	Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2023	III-17
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2017-2020	III-21
Tabel 3.13	Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2023	III-21
Tabel 4.1	Indikator Makro Pembangunan Nasional	IV-3
Tabel 4.2	Koridor Pembangunan Di Provinsi NTT 2020-2024.....	IV-7
Tabel 4.3	Pengelompokan Kabupaten yang belum masuk koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024.....	IV-7
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2021-2023.....	IV-9
Tabel 4.5	Target Indikator Makro NTT Tahun 2023.....	IV-11
Tabel 4.6	KEslarasan Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD perubahan Provinsi NTT untuk tahun	IV-12
Tabel 4.7	Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021,dan 2023 untuk NTT	IV-28
Tabel 4.8	Indikator dan target makro Pembangunan (IKU Daerah) pada RPJMD P Provinsi NTT tahun 2018-2023.....	IV-35
Tabel 4.9	Target Pencapaian Indikator Makro Provinsi NTT tahun 2023.....	IV-36
Tabel 5.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, ICOR dan Kebutuhan Investasi Kabupaten/Kota Berdasarkan Wilayah Pengembangan Dan Provinsi NTT Tahun 2021 dan 2022	V-5
Tabel 5.2	Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2021-2022	V-8
Tabel 5.3	Arahan penurunan TPT bagi Kab/Kota se NTT Tahun rencana 2022	V-10
Tabel 5.4	Target Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur, tahun 2021 dan 2020	V-13
Tabel 6.1	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022	VII-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 2.1	Peta Provinsi NTT	II-1
Gambar 2.2	Peta dan data Bencana di NTT tahun 2021	II-3
Gambar 2.3	IPM NTT tahun 2011-211	II-15
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Triwulan	III-3
Gambar 3.2	Prosentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017 – 2019	III-5
Gambar 4.1	Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional	IV-3
Gambar 4.2	Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	IV-6
Gambar 4.3	Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera	IV-8
Gambar 4.4	Tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	IV-18
Gambar 4.5	Tiga Pilar Ekonmi Inklusif.....	IV-18
Gambar 4.6	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023	IV-19
Gambar 4.7	Strategi Pembangunan tahun 2023.....	IV-20
Gambar 4.8	Peta Pembangunan wilayah Nusa Tenggara Timur	IV-27
Gambar 4.7	Inovasi Penda NTT Berdasarkan jenis Inovasi.....	IV-33
Gambar 4.8	Inovasi Penda NTT Berdasarkan Inisiator Inovasi	IV-34
Gambar 4.9	Model Desa/Kelurahan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	IV-34
Gambar 4.10	Pengembangan Pariwisata Estate NTT	IV-35
Gambar 5.1	Perkembangan Kemiskinan di NTT Maret 2011- September 2020	V-7

BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan RKPD tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi RKPD Tahun 2024 memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022, berpedoman pada RKP Tahun 2024 dan program strategis nasional, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk antisipasi dampak kemungkinan resesi global bagi ekonomi daerah, layanan dasar, tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah serta dukungan terhadap pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagai penjabaran tahun pertama dari RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, RKPD Tahun 2024 memuat strategi dan kebijakan yang diarahkan pada penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar. Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJPD 2005–2025, arah kebijakan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan; pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal; penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar; pencapaian dan pemenuhan SPM; dan sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya.



Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up*, dan *top down* serta berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan (1) politik digunakan dalam menyusun RKPD dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai hasil penjangkaran aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, dan reses; (2) teknokratik menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah; (3) partisipatif, pendekatan yang melibatkan seluruh unsur yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat; (4) *bottom up* dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota, dan provinsi; (5) *top down* dilakukan dengan mengacu pada RKP Tahun 2024 dan RPJMN 2020-2024. Pendekatan yang berorientasi pada THIS diimplementasikan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Implementasi *money follow priority program* dan *program follow result* menjadi landasan kerangka pendanaan pembangunan.

Oleh sebab itu, RKPD Tahun 2024 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut.

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.

- 
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

I.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 11. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

- 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
 22. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
 23. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

- 
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
 37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
 38. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001);
 39. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007).

I.3 Hubungan Antar Dokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus tata kelola pembangunan yang saling berkaitan. Sesuai amanat regulasi, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Dokumen RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, RKP Tahun 2024, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, RKPD Tahun 2024 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, dengan tetap menjaga keselarasan dengan RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota).

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan untuk kemudian menjadi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024

RKPD Tahun 2024 selanjutnya menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2024. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2024 dan penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Provinsi NTT TA 2024. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada Gambar I-1 berikut.



Gambar I-1 Bagan Alir Keterkaitan RKPD Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

I.4 Maksud dan Tujuan

I.4.1 Maksud

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan



Provinsi. RKPD ini menjadi dasar sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

I.4.2 Tujuan

Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah:

- 1) Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan RAPBD TA. 2024;
- 2) Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
- 3) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, serta antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat;
- 4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

I.5 Sistematika Penulisan

RKPD Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan RKPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta sistematika dokumen RKPD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro pembangunan daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022.

Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi daerah tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran terbuka, gambaran kondisi keuangan daerah tahun lalu seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan dan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).



Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan tentang Arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN) dan Arah Kebijakan, prioritas dan sasaran Pembangunan Provinsi NTT (RPD) sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota Tahun 2024, serta gambaran hasil e-rakortekbang.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Bab ini menguraikan arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota tahun 2024.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan pada RPD untuk periode tahun 2024.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

Bab VIII. Penutup

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam pelaksanaan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD Tahun 2024 sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau, di mana 600 pulau mempunyai nama, 9 pulau masih diusulkan namanya dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 47.931,54 km² dan wilayah lautan seluas 200.000 km². Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 8⁰–12⁰ Lintang Selatan dan 118⁰ – 125⁰ Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Negara Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Negara Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.

Wilayah administratif NTT terbagi atas 1 Kota dan 21 Kabupaten dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut.



Sumber: Bappelitbangda Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.1
Peta Provinsi NTT



Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km² (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km² (0,96 persen).

2.1.1.1 Demografi Wilayah

Berdasarkan Data kependudukan dari BPS tahun 2022, Kependudukan Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 adalah sebanyak 5.466.285 jiwa yang terdiri atas 2.733.049 laki-laki dan 2.733.236 perempuan. Rasio jenis kelamin Tahun 2022 adalah 100 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun hasil SP 2020 (September 2022) adalah 1,17 persen. Kepadatan penduduk Tahun 2022 sebesar 114 Jiwa/Km² menurun dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2020 dan 2021 (BPS Nusa Tenggara Timur, 2023).

Penduduk terpadat terdapat di Kota Kupang dengan 2.583 jiwa per km². Kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 36 jiwa per km² dan Sumba Tengah dengan 50 jiwa per km².

Tabel 2.1
Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
tahun 2020-2022

Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	197	201	207
Sumba Timur	35	35	36
Kupang	66	67	69
Timor Tengah Selatan	115	116	116
Timor Tengah Utara	97	98	100
Belu	175	177	180
Alor	72	73	74
Lembata	107	109	110
Flores Timur	158	160	163
Sikka	186	187	189
Ende	131	132	132
Ngada	96	97	99
Manggarai	163	164	166
Rote Ndao	112	114	116
Manggarai Barat	82	83	84
Sumba Tengah	47	48	50
Sumba Barat Daya	210	212	213
Nagekeo	113	115	117



Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)		
	2020	2021	2022
Manggarai Timur	110	111	112
Sabu Raijua	194	197	202
Malaka	158	160	162
Kota Kupang	2456	2511	2583
Nusa Tenggara Timur	111	112	114

Sumber : BPS NTT, 2023

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

2.1.2.1 Pola Ruang Eksisting dan Aspek Pertanahan

2.1.2.1.1 Hutan Lindung

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sebaran hutan lindung di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 698.771,33 Ha dimana terbesar berada di Kabupaten Kupang dengan luas wilayah hutan lindung 113.151,45 Ha dan terkecil seluas 1.233,04 Ha di Kabupaten Sumba Barat.

Tabel. 2.2.
Sebaran Luasan Hutan Lindung
Tahun 2022

Wilayah	Luas Hutan Lindung Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	1.144,25	1.212,90	1.233,04
Sumba Timur	75.373,13	75.296,89	72.919,56
Kupang	104.949,53	104.222,75	113.151,45
Timor Tengah Selatan	35.243,32	35.763,95	35.371,17
Timor Tengah Utara	41.683,22	41.628,48	42.562,96
Belu	37.015,28	40.558,64	41.304,03
Alor	51.347,62	51.334,75	61.465,07
Lembata	46.630,71	46.595,89	46.442,91
Flores Timur	36253,13	36.279,77	36.411,88
Sikka	33647,82	33.723,19	34.239,41
Ende	24089,00	21.560,21	22.046,21
Ngada	29185,05	29.064,12	29.612,20



Wilayah	Luas Hutan Lindung Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)		
	2020	2021	2022
Manggarai	17427,15	17.430,76	24.884,75
Rote Ndao	7510,44	7.361,46	7.504,03
Manggarai Barat	54345,93	54.221,97	54.241,99
Sumba Tengah	6242,03	6.172,35	6.163,69
Sumba Barat Daya	11041,24	11.024,87	11.413,92
Nagekeo	9626,49	9.621,92	9.488,73
Manggarai Timur	32783,05	32.782,19	33.955,78
Sabu Raijua	9966,24	9.966,23	9.957,79
Malaka	3855,17	-	3.100,65
Kota Kupang	1127,76	1.438,60	1.300,10
Nusa Tenggara Timur	670.487,57	667.261,89	698.771,33

Sumber : BPS NTT, 2023

2.1.2.1.2 Kawasan Konservasi

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 1 ayat 2, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Di Indonesia, kebijakan konservasi diatur ketentuannya dalam UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU ini memiliki beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya:

- a. PP 68/1998 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
- b. PP 7/1999 tentang pengawetan/perlindungan tumbuhan dan satwa
- c. PP 8/1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar/TSL
- d. PP 36/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa (SM), Taman nasional (TN), taman hutan raya (Tahura) dan taman wisata alam (TWA). Berikut merupakan luas Kawasan Konservasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur:



Tabel 2.3.
Kawasan Konservasi Provinsi NTT

No	Kabupaten	Kawasan Konservasi								
		CA	SM	SML	TAHURA	TB	TN	TNL	TWA	TWAL
1	Alor								7.676,15	
2	Belu	3.181,39	4.548,16							
3	Ende	1.942,81					5.323,62			
4	Flores Timur									
5	Kupang		1.399,99		1.942,72	0,10			3.352,82	96,27
6	Lembata									
7	Manggarai								9.426,09	
8	Manggarai Barat	1.485,76					57.746,46	1.044,26		
9	Manggarai Timur								23.667,28	
10	Nagekeo									
11	Ngada	8.992,21							425,35	148,62
12	Rote Ndao		1.542,09	90,71		1.405,87				
13	Sabu Raijua									
14	Sikka		1.694,23						7.194,53	253,06
15	Sumba Barat						1.829,83			
16	Sumba Barat Daya									
17	Sumba Tengah						32.555,25			
18	Sumba Timur						61.961,37			
19	Timor Tengah Selatan	9.913,98	5.432,08			1.801,21				
20	Timor Tengah Utara	2.401,28								
21	Kota Kupang									3,23
	Jumlah	27.917,42	14.616,56	90,71	1.942,72	3.207,18	159.416,54	1.044,26	51.742,22	501,19

Sumber :Revisi RTRW NTT 2010-2030 tahun 2021

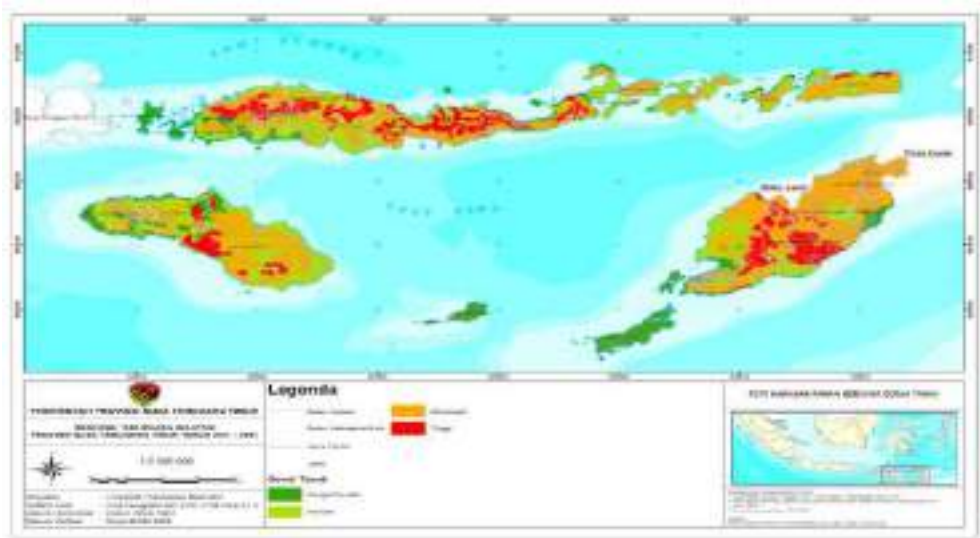
2.1.2.1.3 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana di Provinsi NTT, terdiri atas: kawasan rawan longsor dan gerakan tanah kawasan rawan banjir. Kawasan rawan bencana Geologi

a. Longsor

Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur,

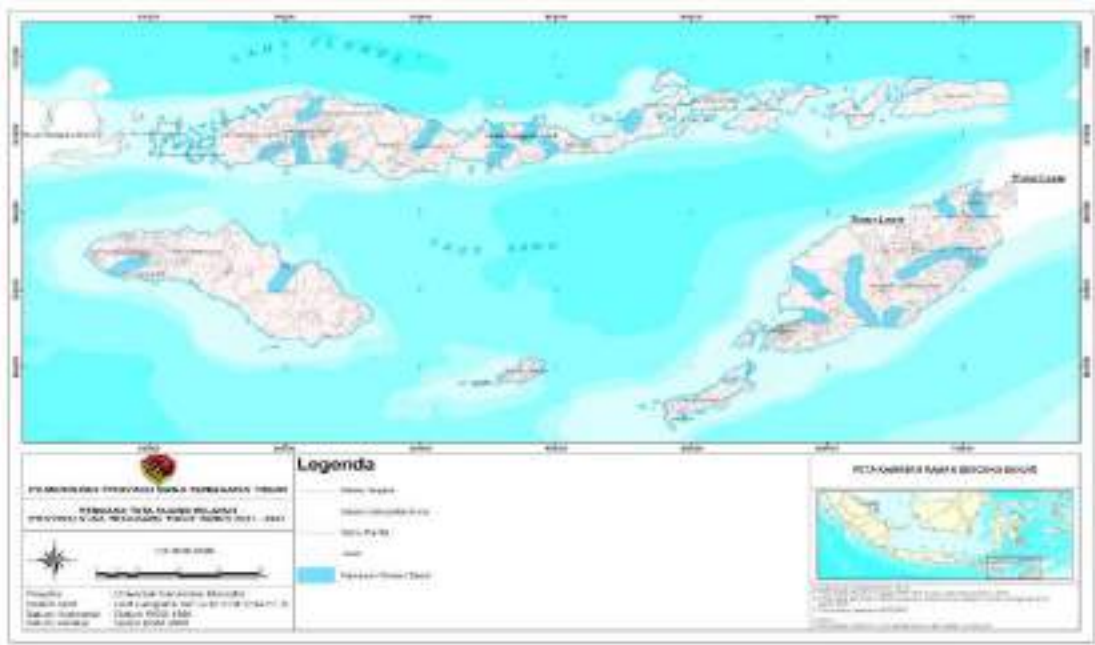
Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat



Gambar 2.3
Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Provinsi NTT Tahun 2021

b. Banjir

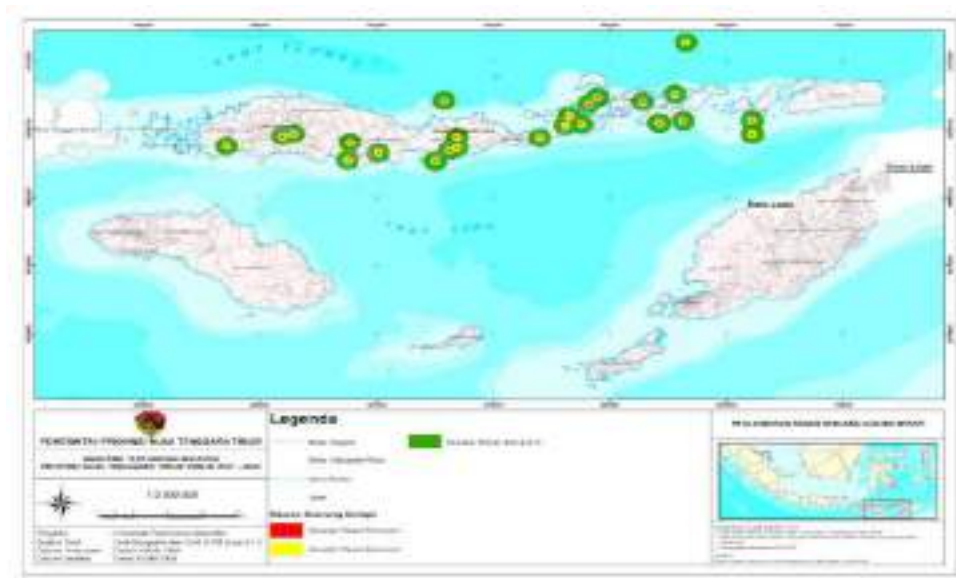
Kawasan rawan banjir terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndona di Kabupeten Ende.



Gambar 2.4
Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi NTT Tahun 2021

c. Gunung Berapi

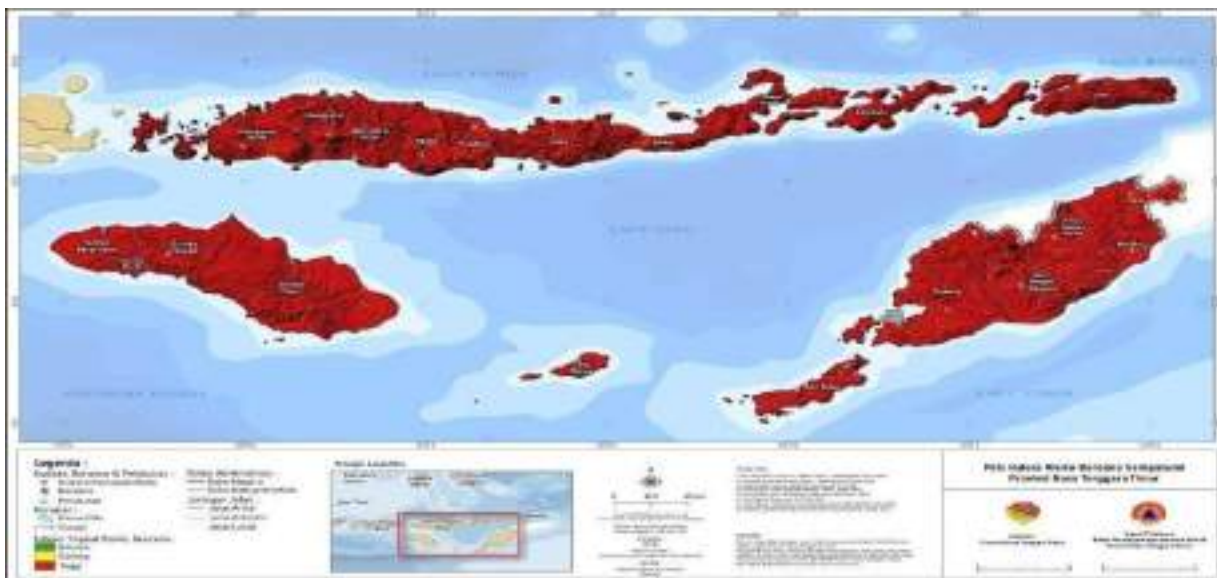
Kawasan rawan bencana gunung berapi meliputi : Kawasan Gunung Inelika, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan di ^[L]_[SEP] Kabupaten Flores Timur; Kawasan Gunung Anak Ranakah di Kabupaten Manggarai; Kawasan Gunung Iya dan Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende; Kawasan Gunung Inerie di Kabupaten Ngada; Kawasan Gunung Ebulobo di Kabupaten Nagekeo; Kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon di Kabupaten Sikka; Kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor; dan Kawasan Gunung Batutara dan Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata.



Gambar 2.5
Peta Risiko Rawan Gunung Berapi Provinsi NTT Tahun 2021

d. Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas : **a) Kawasan Rawan bencana gempa** terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Alor; Pulau Timor, Pantai Selatan Pulau Sabu dan Pantai Selatan Pulau Rote;



Sumber : BPBP 2022

Gambar 2.5
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021

b). Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami terdapat di Maumere Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Belu, Pantai Selatan Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara Flores Timur, Pantai Selatan Lembata, dan Pantai Selatan



Sumber : BPBP 2022

Gambar 2.6
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021

2.1.2.2 Kawasan Ekosistem Mangrove



Pada wilayah NTT, belum ada data pasti tentang keragaman jenis dan berapa jumlah jenis mangrove yang dapat ditemui. Namun demikian dari beberapa penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa NTT juga memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi. Seno, A (2012) mengatakan bahwa keragaman jenis mangrove di kawasan Taman Nasional (TN) Komodo mencapai 24 jenis yang terdiri dari 22 jenis mangrove sejati dan 2 jenis mangrove asosiasi. Hidayatullah, M. dkk (2012) melaporkan bahwa di desa Golo Sepang kecamatan Boleng–Manggarai Barat ditemukan sebanyak 10 jenis mangrove (9 jenis mangrove sejati dan 1 jenis mangrove asosiasi). Sementara itu Talib, M. F (2008) mengatakan bahwa di desa Tanah Merah dan Oebelo kecamatan Kupang Tengah memiliki 11 jenis mangrove yang kesemuanya merupakan mangrove sejati. Jafar, dkk (2007) mengatakan bahwa pada wilayah Teluk Kupang–Kota Kupang memiliki 6 jenis mangrove yang kesemuanya merupakan mangrove sejati. Hidayatullah, M. dkk (2013) menyebutkan bahwa di kawasan Cagar Alam Maubesi–Kabupaten Belu ditemukan sebanyak 23 jenis mangrove yang terdiri dari 16 jenis mangrove sejati dan 7 jenis mangrove asosiasi.(revisi RTRW 2010-2030)

2.1.2.3 Hutan Produksi (termasuk APL dan HGU)

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.



Tabel 2.4.
Tabel Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2022

Wilayah	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)											
	Terbatas			Tetap			Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus			Dapat dikonversi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	922.10	1214.13	-	4787.65	3042.73	1235.32	-	-	-	-	-	-
Sumba Timur	19084.76	19071.40	-	25418.21	137258.26	21542.48	-	-	-	61366.03	61366.04	61452.57
Kupang	43478.21	43285.37	-	60863.45	109518.39	46607.83	-	-	-	531.73	458.61	552.35
Timor Tengah Selatan	2923.41	2793.35	-	40566.57	37565.16	2802.72	-	-	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	53909.34	53900.16	-	12981.91	41628.48	55014.64	-	-	-	300.78	300.78	306.96
Belu	-	2988.80	-	961.80	40558.64	-	-	-	-	-	-	-
Alor	26699.70	26687.40	-	19341.02	59010.90	16593.38	-	-	-	-	-	-
Lembata	-	-	-	605.12	46595.89	-	-	-	-	-	-	-
Flores Timur	11123.86	11123.86	-	4410.55	36279.77	2070.66	-	-	-	521.03	521.03	523.31
Sikka	734.53	721.68	-	1037.12	40917.72	727.10	-	-	-	-	-	1084.94
Ende	177.75	328.88	-	29653.86	26883.83	342.38	-	-	-	932.88	1093.45	13684.85
Ngada	-	-	-	6330.41	29489.47	-	-	-	-	13438.30	13438.28	1623.01
Manggarai	-	-	-	-	26856.85	-	-	-	-	1136.25	1135.08	-
Rote Ndao	-	-	-	9352.55	8767.33	-	-	-	-	-	-	-
Manggarai Barat	-	-	-	18174.15	111968.43	14712.04	-	-	-	-	-	-
Sumba Tengah	15189.18	14897.11	-	5157.06	38727.60	-	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	8853.18	11024.87	9047.97	-	-	-	-	-	-
Nagekeo	9176.56	9176.74	-	9871.63	9621.92	-	-	-	-	-	-	1011.11
Manggarai Timur	-	-	-	15583.62	56449.47	-	-	-	-	971.67	971.78	-
Sabu Raijua	-	-	-	-	9966.23	3083.67	-	-	-	-	-	-
Malaka	2984.45	-	-	2547.40	-	-	-	-	-	-	-	1917.88

Handwritten signature



Wilayah	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)											
	Terbatas			Tetap			Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus			Dapat dikonversi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kota Kupang	-	-	-	58.98	1438.60	173780.18	-	-	-	1604.80	1677.91	82156.98
Nusa Tenggara Timur	186403.84	186188.88	-	276556.23	883570.54	-	-	-	-	80803.47	80962.96	-

Sumber : BPS NTT, 2023

Al



Tabel 2.5.
Luas Suaka Alam Dan Pelestarian Alam (Hektar) di Provinsi NTT

No	Kabupaten/Kota	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Hektar)		
		2017	2018	2020
1	Sumba Barat	1772.22	1820.77	1820.77
2	Sumba Timur	56931.61	62062.60	62062.60
3	Kupang	69978.16	69878.19	69878.19
4	Timor Tengah Selatan	16991.04	15320.52	15320.52
5	Timor Tengah Utara	2405.33	2426.82	2426.82
6	Belu	-	-	-
7	Alor	7637.67	7705.69	7705.69
8	Lembata	-	-	-
9	Flores Timur	-	-	-
10	Sikka	72998.68	73705.82	73705.82
11	Ende	7065.57	7128.69	7128.69
12	Ngada	16714.07	16317.54	16317.54
13	Manggarai	8943.69	9426.09	9426.09
14	Rote Ndao	3648.07	2229.22	2229.22
15	Manggarai Barat	179107.31	180722.42	180722.42
16	Sumba Tengah	32382.82	32635.70	32635.70
17	Sumba Barat Daya	-	-	-
18	Nagekeo	-	-	-
19	Manggarai Timur	23856.58	23667.30	23667.30
20	Sabu Raijua	-	-	-
21	Malaka	7661.08	7729.55	7729.55
22	Kota Kupang	-	-	-
Nusa Tenggara Timur		508093.90	512776.92	512776.92

Sumber: Revisi RTRW NTT 2010-2030 tahun 2021

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh sebesar 3,45%, melambat dibandingkan dengan triwulan III 2022 sebesar 3,51% dan lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,02%. Deselerasi kinerja perekonomian NTT terutama disebabkan perlambatan konsumsi rumah tangga, kontraksi ekspor dan konsumsi Pemerintah. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2022 bersumber dari lapangan usaha utama yakni LU Pertanian, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Administrasi Pemerintahan. Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2022



mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,05%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,52%. Dari sisi ekspor, peningkatan yang terjadi sejalan dengan perluasan pembukaan pintu kedatangan internasional melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Di samping itu, meningkatnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19 di Provinsi NTT menjadi faktor pendorong kinerja konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Sementara dari sisi LU, perbaikan kinerja ekonomi bersumber dari LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi. Pencabutan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, vaksinasi *booster*, percepatan pembangunan infrastruktur, serta curah hujan yang kondusif berdampak positif terhadap peningkatan kinerja LU secara keseluruhan.

2.1.3.2. Laju Inflasi

Inflasi gabungan 3 kota IHK di Provinsi NTT pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,65%, melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,97%, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 5,51%. Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi pada kelompok komoditas transportasi, sebaliknya kenaikan harga pada kelompok komoditas makanan, minuman dan tembakau menjadi faktor pendorong tekanan inflasi di NTT.

Secara keseluruhan tahun 2022, inflasi gabungan Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok komoditas transportasi dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tingginya tekanan inflasi sepanjang tahun 2022 turut dipengaruhi oleh konflik geopolitik yang terjadi secara global sehingga menyebabkan disrupsi pada rantai pasok komoditas makanan dan energi. Lebih lanjut, inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2023 diperkirakan melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama disebabkan oleh normalisasi harga komoditas pasca kenaikan harga BBM. Meskipun demikian, kenaikan permintaan dan ekspektasi harga menjelang bulan Ramadhan dapat menjadi faktor pendorong inflasi.



Tabel 2.9
Inflasi Menurut Bulan (Persen)
Tahun 2022

Wilayah Inflasi	Inflasi Menurut Bulan (Persen)												
	2022												
	Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahunan
Kota Kupang	0.99	0.65	0.09	1.46	0.15	0.51	1.07	-0.86	1.82	0.37	-0.12	0.74	7.07
Maumere	1.31	-0.53	-0.59	0.54	0.87	0.83	1.51	-1.00	0.57	-0.08	0.43	1.08	6.25
Waingapu	0.92	0.47	0.19	1.05	0.28	0.20	0.48	-1.47	1.18	-0.34	-0.57	1.14	3.54
Nusa Tenggara Timur	1.01	0.51	0.15	1.33	0.23	0.52	1.05	-0.93	1.64	0.25	-0.10	0.81	6.65

Sumber : BPS NTT-Berita Resmi Statistik 2023

2.1.3.3. PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB Perkapita ADHB Provinsi NTT pada Tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 18,45 juta meningkat menjadi Rp. 19,59 juta pada Tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan disertai dengan perubahan harga-harga di pasar yang dari tahun ke tahun juga cenderung mengalami peningkatan (inflasi). Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK pada Tahun 2018 sebesar Rp. 12,27 juta meningkat menjadi Rp. 12,71 juta pada Tahun 2019. PDRB per kapita ADHB mengalami penurunan dari Rp. 19,59 juta pada Tahun 2019 menjadi Rp. 19,22 juta di Tahun 2020, sementara PDRB Per kapita ADHK juga mengalami penurunan dari Rp. 12,71 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 12,41 juta di Tahun 2020 yang disebabkan oleh kontraksi ekonomi yang melanda dunia khususnya NTT akibat Pandemi Covid 19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10
PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017 – 2020

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Miliar Rp)						
- ADHB	90.758,93	98.930,19	106.728,07	106.506,13	110.881,46	118.718,20
- ADHK 2010	62.725,41	65.929,19	69.385,99	68.806,61	70.540,66	72.695,28
PDRB perkapita (Ribu Rp)						
- ADHB	17.165,45	18.448,13	19.591,07	19.220.097		



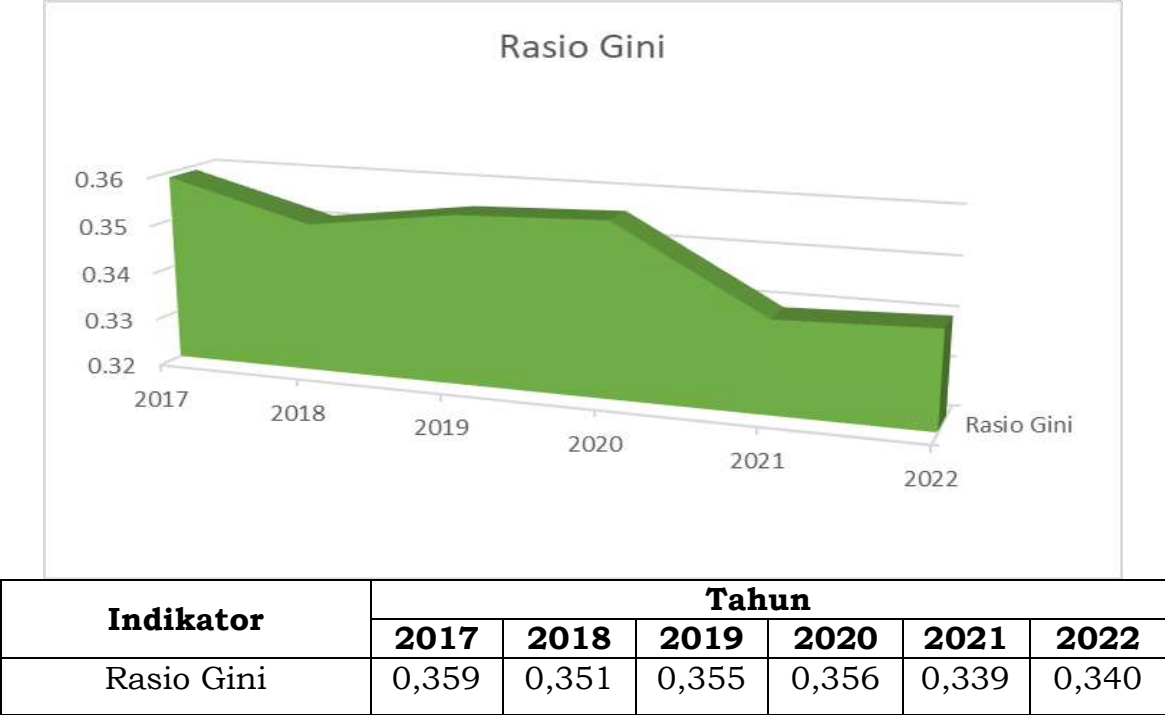
Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- ADHK 2010	11.863,41	12.276,77	12.714,42	12.416.851		
Pertumbuhan						
PDRB perkapita ADHK 2010	-1,6	3,48	3,56	-0,84	2,51	3,05
Jumlah penduduk (000 org)	5.287,30	5.371,52	5.456,20	5.541.394		

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, olahan, 2023

2.1.3.4. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Ketimpangan pendapatan berkaitan erat dengan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sebesar 0,340, dapat dikatakan bahwa ketimpangan di NTT tahun 2022 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan gini rasio nasional sebesar 0,384 maka indeks Gini NTT lebih rendah yang mengindikasikan ketimpangan di NTT tidak sedalam ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan karena gap pendapatan antara penduduk golongan pendapatan tinggi dengan yang rendah di NTT tidak sedalam gap pendapatan antara golongan pendapatan tinggi dan rendah di daerah lain.



Sumber : BPS BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar. 2.7
Grafik Gini Ratio Provinsi NTT tahun 2017-2022

2.1.3.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Index (HDI)* merupakan sebuah intrumen yang dikembangkan oleh *United Nations Development Program (UNDP)* untuk memotret kinerja pembangunan manusia pada 3 (tiga) dimensi, yakni Umur Panjang dan Hidup Sehat (kesehatan), Pengetahuan (pendidikan), dan Standar Hidup Layak (ekonomi). Umur Harapan Hidup (*Life Expectancy*) merupakan indikator yang digunakan oleh UNDP untuk mengukur capaian dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat. Pada dimensi Pengetahuan, indikator yang digunakan untuk mengukur capaiannya adalah Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*), sedangkan untuk mengukur capaian dimensi Standar Hidup Layak, indikator yang digunakan adalah Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*Gross National Income per capita (PPP \$)*). Dalam menghitung IPM di Indonesia, BPS menggunakan metodologi penghitungan dan dimensi yang serupa dengan UNDP. Meski demikian, sehubungan dengan faktor ketersediaan data pada level Kabupaten/ Kota, terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh BPS, yakni penggunaan indikator Pengeluaran Riil per kapita untuk menggantikan indikator PNB per kapita (BPS, 2022b, p.10).



Tabel 2.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2022

Wilayah	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	63.53	63.83	64.43
Sumba Timur	65.52	65.74	66.17
Kupang	64.32	64.41	65.04
Timor Tengah Selatan	62.15	62.16	62.73
Timor Tengah Utara	63.53	63.69	64.26
Belu	62.68	62.77	63.22
Alor	61.33	61.37	62.26
Lembata	64.74	64.75	65.47
Flores Timur	64.22	64.22	64.93
Sikka	65.11	65.41	66.06
Ende	67.04	67.30	67.97
Ngada	67.88	67.88	68.26
Manggarai	64.54	65.01	65.83
Rote Ndao	62.39	62.60	63.21
Manggarai Barat	63.89	64.17	64.92
Sumba Tengah	61.53	61.80	62.71
Sumba Barat Daya	62.28	62.29	63.15
Nagekeo	65.81	65.82	66.22
Manggarai Timur	60.85	61.37	62.30
Sabu Raijua	57.02	57.03	57.90
Malaka	60.21	60.42	61.34
Kota Kupang	79.71	79.74	80.20
Nusa Tenggara Timur	65.19	65.28	65.90

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 adalah sebesar 65,90 atau tumbuh 0,95 persen (meningkat 0,62 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan pada seluruh komponen pembentukannya, antara lain : pengeluaran per kapita, Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

2.1.3.6. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dengan kata lain, pengeluaran per kapita



merupakan instrumen yang digunakan untuk memotret kemampuan rata-rata individu-individu dalam setiap rumah dalam aspek konsumsi.

Tabel 2.12 merincikan jumlah pengeluaran per kapita pada setiap Kabupaten/ Kota di NTT pada Tahun 2019 sampai dengan 2021. Pada Tabel 2.12, tampak bahwa pengeluaran per kapita tertinggi pada level Kabupaten/ Kota berada pada Kota Kupang, yakni pada kisaran Rp 13 juta, sedangkan pada 21 kabupaten lainnya di NTT, besaran pengeluaran per kapita masih berada pada kisaran Rp 5 – 9 juta. Tingginya ketimpangan antar daerah di Provinsi NTT menjadi penyebab tingginya ketimpangan pengeluaran masyarakat dan tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi. Perekonomian di Provinsi NTT sangat terpusat di Kota Kupang. PDRB Perkapita dan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang jauh di atas kabupaten yang lain di Provinsi NTT.

Tren data pada Tabel 2.12 juga menunjukkan bahwa sejak Tahun 2020, telah terjadi penurunan pengeluaran per kapita pada setiap entitas pemerintahan, baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Pada level provinsi, khususnya, terjadi penurunan pengeluaran per kapita dari sebesar Rp 7,769 juta di tahun 2019, menjadi sebesar Rp 7,598 juta di Tahun 2020. Pada tahun 2021, kembali terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 7,554 juta. Sedangkan pada tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 4,28 persen dibanding tahun 2021 yaitu menjadi Rp. 7,877 juta.

Tabel 2.12
Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT
Tahun 2020-2022

Wilayah	[Metode Baru] Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	7321.00	7307.00	7627.00
Sumba Timur	9406.00	9354.00	9641.00
Kupang	7526.00	7476.00	7776.00
Timor Tengah Selatan	6861.00	6839.00	7118.00
Timor Tengah Utara	6364.00	6324.00	6559.00
Belu	7479.00	7431.00	7593.00
Alor	6786.00	6751.00	7198.00
Lembata	7305.00	7257.00	7622.00
Flores Timur	7631.00	7578.00	7918.00
Sikka	8081.00	8021.00	8362.00
Ende	9094.00	9027.00	9413.00



Wilayah	[Metode Baru] Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)		
	2020	2021	2022
Ngada	8865.00	8819.00	8997.00
Manggarai	7203.00	7133.00	7580.00
Rote Ndao	6539.00	6503.00	6719.00
Manggarai Barat	7468.00	7410.00	7636.00
Sumba Tengah	6108.00	6061.00	6288.00
Sumba Barat Daya	6372.00	6355.00	6779.00
Nagekeo	8309.00	8254.00	8433.00
Manggarai Timur	5818.00	5780.00	6145.00
Sabu Raijua	5265.00	5256.00	5558.00
Malaka	5901.00	5861.00	6250.00
Kota Kupang	13337.00	13218.00	13513.00
Nusa Tenggara Timur	7598.00	7554.00	7877.00

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2023

2.1.3.7. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk memotret kinerja pembangunan pada Sektor Kesehatan. Umur Harapan Hidup adalah Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Umur Harapan Hidup juga dipengaruhi dengan keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat.

UHH juga menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tabel 2.13 merincikan Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2020-2022, menurut Kabupaten/Kota. Pada periode ini (2020-2022), UHH provinsi NTT menunjukkan tren kenaikan yang konstan. Di tahun 2020, UHH penduduk NTT sebesar 67,01 tahun. Pada tahun selanjutnya, UHH NTT terus menunjukan perbaikan dan mencapai 67,15 tahun di tahun 2021 dan tahun 2022 menjadi 67,47 Tahun. Hal ini dapat dimaknai pula bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2022 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai dengan usia 67,47 tahun. Pada Tabel 2.13, tampak pula bahwa keseluruhan kabupaten/ kota memiliki tren kenaikan UHH. Meski demikian, disparitas UHH antara Kabupaten/ Kota masih cukup tinggi. Di tahun 2022, tampak bahwa Kota Kupang memiliki UHH yang cukup tinggi jika dibanding 21 Kabupaten lainnya (70,11 tahun), sementara kabupaten lainnya berada pada



angka 69 tahun ke bawah, dengan kabupaten dengan capaian UHH terendah yakni Rote Ndao (65,26 tahun), Alor (61,99 tahun), dan Sabu Raijua (60, 87 tahun).

Tabel 2.13
Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT
Tahun 2020-2022

Wilayah	[Metode Baru] Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	67.08	67.12	67.35
Sumba Timur	65.13	65.16	65.38
Kupang	64.63	64.91	65.28
Timor Tengah Selatan	66.42	66.46	66.68
Timor Tengah Utara	66.96	67.09	67.35
Belu	64.61	64.89	65.28
Alor	61.48	61.64	61.99
Lembata	67.07	67.20	67.52
Flores Timur	65.20	65.31	65.62
Sikka	67.24	67.45	67.86
Ende	65.29	65.43	65.76
Ngada	68.04	68.12	68.40
Manggarai	67.03	67.11	67.38
Rote Ndao	64.60	64.88	65.26
Manggarai Barat	67.38	67.46	67.73
Sumba Tengah	68.38	68.42	68.65
Sumba Barat Daya	68.53	68.57	68.79
Nagekeo	67.13	67.25	67.56
Manggarai Timur	68.04	68.07	68.29
Sabu Raijua	60.64	60.66	60.87
Malaka	64.97	65.01	65.34
Kota Kupang	69.55	69.73	70.11
Nusa Tenggara Timur	67.01	67.15	67.47

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2023

Penyebab rendahnya UHH disebabkan oleh ketersediaan dan akses ke fasilitas kesehatan yang belum memadai, kurangnya tenaga kesehatan, kematian neonatus, tingginya angka kematian akibat penyakit menular (TBC, Malaria, HIV), tekanan darah tinggi, penggunaan tembakau dan alkohol, kematian karena kecelakaan lalu lintas. Keadaan geografis merupakan tantangan bagi pelayanan kesehatan, dimana akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi terbatas. Untuk masyarakat yang tinggal pada pulau- pulau kecil, keterbatasan sarana kesehatan



diperparah dengan akses transportasi laut yang sulit, bahkan tidak ada sama sekali pada musim-musim tertentu dimana keadaan laut tidak menentu. Sedangkan pada wilayah daratan, akses jalan yang terbatas membuat waktu tempuh antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat di wilayah berbukit dan bergunung menjadi lama, sehingga dalam keadaan darurat akan sulit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2.1.3.8. Angka Kemiskinan

Pengentasan angka kemiskinan merupakan salah satu agenda kebijakan yang populer pada berbagai entitas pemerintahan saat ini. Dalam pengukuran kemiskinan, pendekatan yang umum digunakan yakni pendekatan moneter karena sederhana dan mudah digunakan sebagai pembandingan antar waktu dan tempat. Pendekatan ini mengukur kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan atau konsumsi. Garis kemiskinan, baik bersifat absolut maupun relatif, biasanya ditetapkan untuk mengidentifikasi orang miskin yang pendapatan atau konsumsinya di bawah ambang batas (*cut-off*). Garis kemiskinan internasional (absolut) yang ditetapkan oleh Bank Dunia pada Tahun 2022 adalah US\$ 2,15 per kapita per hari berdasarkan pada Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity* (PPP)) Tahun 2017, menggantikan garis kemiskinan sebelumnya yakni US\$ 1,9 pada PPP 2011.

Dalam konteks Indonesia, dengan pendekatan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari segi kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan berdasarkan konsumsi. Untuk mengklasifikasikan penduduk miskin dan tidak miskin, garis kemiskinan (GK) nasional yang digunakan oleh BPS adalah “representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan”. Dengan demikian, penduduk miskin di Indonesia dalam ukuran moneter adalah mereka yang memiliki rata-rata konsumsi per bulan di bawah garis kemiskinan. Misalnya, berdasarkan perhitungan BPS per September 2022, Garis Kemiskinan di NTT sebesar Rp 437.606/kapita/bulan.



Tabel 2.14

Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2022

Indikator	Angka Kemiskinan (%)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	1.160,53	1.150,08	1.134,74	1.129,46	1.173,53	1.146,28	1.149,17
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	322.947	343.396	354.898	373.922	403.055	437.606	460.823
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	4,69	3,83	4,16	4,13	4,15	4,79	3,74
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	1,30	0,96	1,17	1,12	1,24	1,44	0,95
Persentase Penduduk Miskin NTT	22,58	22,01	21,38	20,62	21,21	20,44	20,23
Persentase Penduduk Miskin Indonesia	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71	9,54

Sumber : BPS NTT, 2023. * Kondisi September 2022

Hasil potret penduduk miskin dengan metode pengukuran moneter menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan pada sejumlah indikator kemiskinan di NTT, meski terjadi pelambatan atau stagnasi pada tahun 2020. Tabel 2.14 merincikan tren indikator - indikator yang digunakan untuk memotret fenomena kemiskinan di Provinsi NTT antara tahun 2016 dan 2022, yang mana meliputi Jumlah Penduduk Miskin, Indeks kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) dan Persentase Penduduk Miskin.

Pada tahun 2016 (GK NTT= Rp 322.947,-), misalnya, secara absolut, penduduk miskin di NTT berjumlah 1.160,53 ribu jiwa, dengan persentase sebesar 22,58 %, sedangkan Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,69 poin dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) sebesar 1,30 poin. Pada tahun selanjutnya, jumlah jiwa maupun persentase penduduk miskin terus menunjukkan penurunan. Namun, di tahun 2020 (GK NTT= Rp 403.055,-), terjadi kenaikan persentase maupun jumlah jiwa penduduk miskin menjadi 1.173,53 jiwa atau 21,21%, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,15 poin dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) sebesar 1,24 poin.

Terjadinya kenaikan angka kemiskinan baik secara persentase maupun absolut ini erat kaitannya dengan terjadinya pandemi global COVID-19, yang mana terjadi di provinsi NTT sejak bulan April 2020. Hal ini menjadi bertambah kompleks dengan terjadinya Badai Siklon Tropis Seroja pada tanggal 4 dan 5 April 2021 di sebagian besar wilayah NTT. Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai pembatasan sosial yang mana berdampak langsung



pada lesunya aktivitas ekonomi maupun secara tidak langsung terhadap akses masyarakat ke dalam pasar tenaga kerja. Penduduk miskin, khususnya, yang dominan bekerja di sektor informal mendapatkan proporsi dampak negatif yang lebih besar tentunya. Dengan minimnya akses ke dalam pasar tenaga kerja karena berbagai pembatasan sosial, penduduk miskin mengalami penurunan pendapatan yang berimplikasi pada rendahnya konsumsi penduduk miskin. Di lain sisi, peningkatan angka kemiskinan ini disebabkan pula karena berkurangnya anggaran pengentasan kemiskinan (*pro poor budget*) yang dialihkan (*refocussing*) ke pos belanja penanganan Covid-19 maupun penanganan pasca bencana Badai Siklon Tropis Seroja. Ruang fiskal yang terbatas ini diperparah dengan realisasi pendapatan yang berkurang sebagai dampak lesunya geliat ekonomi di sektor privat.

Seiring berjalannya waktu, tantangan dalam pengentasan kemiskinan di NTT cenderung berkurang disebabkan oleh semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Laju vaksinasi yang dikawal secara serius oleh Pemerintah mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha. Implikasinya, mobilitas dalam aktivitas ekonomi kembali terjadi sehingga masyarakat miskin kembali mendapat akses ke dalam pasar tenaga kerja maupun mendapat intervensi kebijakan *pro-poor* yang semakin membaik. Hal ini terefleksi melalui tren penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022), dimana jumlah penduduk miskin sebesar 1.149,17 jiwa atau sebesar 20,23%, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 3,74 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,95 poin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Meski demikian, capaian akhir masing-masing indikator kemiskinan pada Tabel 2.14 tentu perlu menjadi perhatian serius segenap pemangku kepentingan ke depan. Kinerja pengentasan kemiskinan masih belum cukup signifikan jika dibanding dengan rata-rata nasional, sebagaimana tampak



pada persentase penduduk miskin NTT di tahun 2022 yang masih sebesar 20,23 % sedangkan rata-rata nasional telah berada pada angka 9,54%. Untuk itu, akselerasi trend penurunan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi ke depan.

Berdasarkan arahan dari Presiden dalam Rapat terbatas strategi percepatan pengentasan kemiskinan agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0% dengan melakukan validasi data yang mencakup mencakup nama (*by name*) dan lokasi (*by address*). Berdasarkan Pedoman Umum Kemiskinan Ekstrem, miskin ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, Kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan tetapi juga akses pada layanan sosial. Kemiskinan Ekstrem diukur menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Secara internasional, kemiskinan eskترم adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1,9 PPP (*purchasing power parities*). Purchasing Power Parities (PPP) adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US \$. Contoh konsep Purchasing Power Parities (PPP), jika harga satu buah pisang di USA adalah US \$ 1.00, sedangkan di Indonesia adalah Rp 500, maka Purchasing Power Parities (PPP) tersebut adalah US \$ 0,002/Rupiah. Pada tahun 2022, nilai US \$ 1,9 PPP = Rp 10.739 per kapita per hari atau Rp.322.170 per kapita per bulan.

Berdasarkan rangkuman hasil estimasi BPS 2022 di Provinsi NTT mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem dari 6,44% (Maret 2021) menjadi 6,56% (Maret 2022) dan Dari 22 kabupaten/kota, terdapat 11 kabupaten yang mengalami penurunan dan 11 kab/kota yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem.

Tabel 2.15
Estimasi Kemiskinan Ekstrem di NTT Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2021-2022

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem(%)		Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem	
			(ribu jiwa)	
	2021	2022	2021	2022
Sumba Barat	13,73	11,75	18.280	15.854
Sumba Timur	15,14	10,40	39.957	27.735
Kupang	5,72	5,98	22.729	24.275
Timor Tengah Selatan	6,56	13,01	30.959	61.574



Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem(%)		Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	
	2021	2022	2021	2022
Timor Tengah Utara	4,84	2,48	12.480	6.435
Belu	5,35	4,44	12.077	10.170
Alor	2,77	2,38	5.749	4.977
Lembata	9,90	7,98	14.635	12.010
Flores Timur	0,79	2,10	2.060	5.491
Sikka	0,42	2,57	1.358	8.320
Ende	13,00	10,99	35.764	30.291
Ngada	5,32	2,98	8.881	5.037
Manggarai	9,35	6,64	32.424	23.328
Rote Ndao	9,22	9,62	16.983	18.382
Manggarai Barat	6,98	9,79	19.906	28.515
Sumba Tengah	18,79	19,11	13.972	14.395
Sumba Barat Daya	6,91	4,63	24.622	16.800
Nagekeo	1,35	1,47	2.002	2.200
Manggarai Timur	6,85	9,11	19.936	26.781
Sabu Raijua	16,16	8,79	16.418	9.173
Malaka	3,06	3,54	6.035	7.071
Kota Kupang	0,38	2,49	1.724	11.640
Nusa Tenggara Timur	6,44	6,56	358.951	370.456

Sumber : estimasi BPS, 2022

Hasil pembelajaran Intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem Tahap I, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem membutuhkan data yang akurat dan terkini untuk menetapkan sasaran program intervensi. Oleh karena itu dengan memperhatikan arahan Presiden dan masukan Wakil Presiden pada Ratas Data Kemiskinan Ekstrem pada 15 Februari 2022, telah dilakukan penyiapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dibawah koordinasi Kemenko PMK, dengan kolaborasi bersama BKKBN, Kemendagri, BPS, dan Set TNP2K. Data P3KE adalah subset dari Data PKBKKBN 2021 yang telah diberikan rangking dan divalidasi dengan Data NIK oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN 2021 merupakan data *set by name-by address* (BNBA) yang memiliki informasi karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang dapat digunakan sebagai alternatif pengembangan peringkat kesejahteraan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok miskin ekstrem. Dengan informasi sosial-ekonomi keluarga dan rangking kesejahteraan serta relatif barunya waktu pengumpulan data, menjadikan data PK BKKBN bermanfaat untuk memperbaiki pensasaran program pengurangan beban. Selain itu, karena cakupannya yang sangat besar data ini dapat dimanfaatkan untuk pensasaran program peningkatan pendapatan dan pemberdayaan.



Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan mengalami penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR), dan/atau panjang badan bayi di bawah standar. Asupan gizi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh seperti pemberian kolostrum (ASI yang pertama kali keluar), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara tepat. Selain itu, faktor kesehatan lingkungan seperti akses air bersih dan sanitasi layak serta pengelolaan sampah juga berhubungan erat dengan kejadian infeksi penyakit menular pada anak. Kehidupan anak sejak dalam kandungan ibu hingga berusia dua tahun (1.000 HPK) merupakan masa-masa kritis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Faktor lingkungan yang baik, terutama di awal-awal kehidupan anak, dapat memaksimalkan potensi genetik (keturunan) yang dimiliki anak sehingga anak dapat mencapai tinggi badan optimalnya. Faktor lingkungan yang mendukung ditentukan oleh berbagai aspek atau sektor.

Menurut pencatatan e-PPBGM, terlihat ada kecenderungan penurunan prosentase balita stunting di wilayah NTT sejak tahun 2018; menurun dari 35,8% di tahun 2018 menjadi 17,7% di tahun 2022. Angka ini berada jauh di bawah rerata Nasional dan NTT (Riskesdas 2018) yang mencapai 30,8% dan 42,6%. Sementara itu prosentase balita yang mengalami wasting dan underweight cenderung fluktuatif sejak tahun 2018. Namun, pergerakan fluktuatif prosentase balita yang mengalami underweight dari tahun 2018-2022 justru masih jauh di atas prosentase nasional yang hanya 17,7 di tahun 2018 (Riskesdas 2018).

Tabel 2.16
Status Gizi Balita di NTT
Tahun 2018-2022

Indikator	Persentase (e-PPBGM)					Riskesdas (NTT)	Riskedas (Nasional)
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018
Stunting (%)	35,4	30,1	24,2	20,9	17,7	42,6	30,8
Wasting (%)	8,3	9,4	7,5	8,0	8,5	12,8	10,2
Underweight (%)	19,6	19,9	18,0	18,3	23,0	29,6	17,7

Sumber : Profil kesehatan NTT Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi NTT, akses Oktober 2022; Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan RI

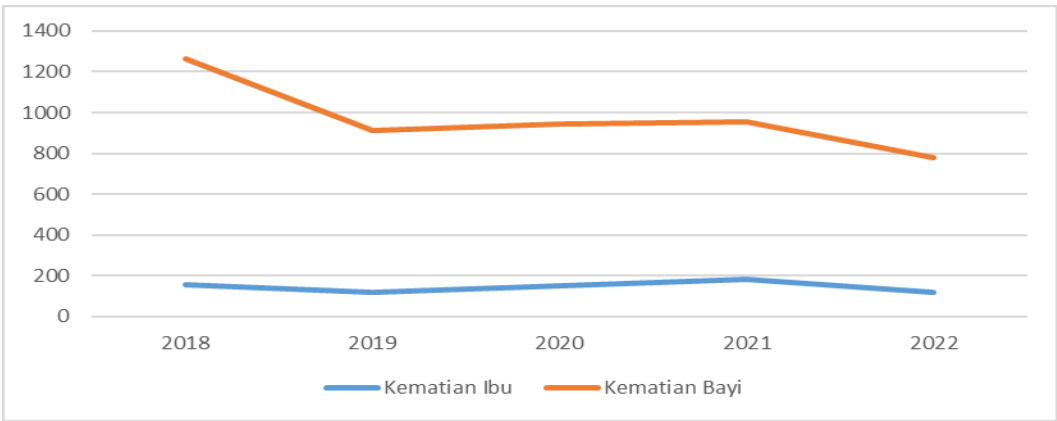


2.1.3.10. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama menilai tingkat kesejahteraan dan status kesehatan masyarakat.

Sejak tahun 2018, jumlah kasus kematian Ibu di wilayah Provinsi NTT bersifat fluktuatif dengan jumlah >150 kasus setiap tahunnya kecuali pada tahun 2019. Penyebab Utama kematian Ibu: Perdarahan (42%), Eklamsi (14%), Infeksi (5%), Gangguan Metabolisme (4%) dan masalah lainnya termasuk masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat (35%). Kabupaten dengan jumlah kematian ibu tertinggi (selalu muncul dalam lima (5) tahun terakhir): Timor Tengah Selatan, Kupang, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur.

Sebaliknya, jumlah kasus kematian bayi di wilayah Provinsi NTT mencapai 1265 kasus pada tahun 2018 dan turun pada tahun 2019 lalu relatif sedikit bertambah setiap tahunnya berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021. Penyebab Utama Kematian Bayi: Asfiksia (27%), BBLR (18%), kelainan bawaan (8%), Pneumonia (7%), gangguan lainnya (6%), masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat (34%). Kabupaten dengan jumlah kematian bayi tertinggi (selalu muncul dalam lima (5) tahun terakhir): Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Kupang, Sikka, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Timor Tengah Utara.



Indikator	Jumlah Kasus				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kematian Ibu	158	118	151	181	120 (Okt)
Kematian Bayi	1265	913	943	955	781 (Okt)

Sumber : Profil kesehatan NTT Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi NTT, akses Oktober 2022



Gambar 2.8
Kasus Kematian Ibu dan Bayi di NTT
Tahun 2018-2022

Tabel 2.17
Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten/Kota di Wilayah NTT
Tahun 2018-2022

NO	KAB/KOTA	AKI TAHUN					AKB TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Kupang	8	4	4	8	8	35	18	16	22	46
2	Kupang	11	5	11	15	8	86	73	78	96	81
3	TTS	24	12	17	17	7	144	86	109	100	45
4	TTU	6	3	7	11	11	74	54	43	33	43
5	Belu	10	5	12	7	6	62	80	66	52	35
6	Alor	12	7	7	10	8	25	16	9	17	13
7	Lembata	1	0	5	4	0	25	29	23	21	12
8	Flores Timur	9	3	5	6	7	100	49	29	45	37
9	Sikka	10	12	7	9	7	80	55	45	51	53
10	Ende	8	8	10	7	6	47	35	67	23	28
11	Nagekeo	4	1	4	2	1	36	25	24	28	16
12	Ngada	2	1	0	1	1	36	15	23	12	26
13	Manggarai Timur	9	10	12	11	17	119	51	48	49	41
14	Manggarai	6	12	5	12	5	83	76	85	96	81
15	Manggarai Barat	7	5	7	7	6	109	43	52	67	57
16	Sumba Barat Daya	5	10	9	14	5	34	25	32	42	56
17	Sumba Barat	1	1	1	3	2	15	22	14	29	42
18	Sumba Tengah	3	0	2	3	2	18	18	40	24	26
19	Sumba Timur	7	8	10	10	10	45	58	46	19	41
20	Rote Ndao	4	5	5	10	2	32	46	42	59	7
21	Sabu Raijua	3	1	8	9	5	44	10	37	55	25
22	Malaka	8	5	3	5	5	16	29	15	15	16
	NTT	158	118	151	181	129	1265	913	943	955	827

Sumber : Profil kesehatan NTT Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi NTT, akses Oktober 2022

2.1.3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Sejalan dengan mulai bangkitnya secara perlahan ekonomi di tahun 2021, TPT Provinsi NTT pada tahun 2021 tercatat 3,77%, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 4,28%, sedangkan pada Agustus 2022 sebesar 3,54 persen, turun 0,23 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.



Tabel 2.17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)
Tahun 2020-2022

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	3.96	1.74	2.98
Sumba Timur	3.49	3.35	2.61
Kupang	4.90	3.99	3.23
Timor Tengah Selatan	2.63	2.57	1.99
Timor Tengah Utara	4.26	3.88	3.51
Belu	7.42	5.35	6.00
Alor	3.11	2.59	2.27
Lembata	4.88	4.94	4.74
Flores Timur	3.16	3.81	3.49
Sikka	4.00	4.54	4.51
Ende	2.95	2.61	2.06
Ngada	4.69	2.99	2.81
Manggarai	4.09	3.70	3.50
Rote Ndao	4.90	3.67	3.64
Manggarai Barat	3.72	4.94	4.91
Sumba Tengah	4.02	1.45	1.21
Sumba Barat Daya	2.36	2.04	1.97
Nagekeo	3.09	0.97	2.97
Manggarai Timur	2.10	1.96	1.89
Sabu Raijua	3.08	1.25	3.29
Malaka	3.63	3.43	3.30
Kota Kupang	10.90	9.76	8.55
Nusa Tenggara Timur	4.28	3.77	3.54

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 3,02 juta orang, naik 0,10 juta orang dibanding Agustus 2021. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,45 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,92 juta orang, meningkat sebanyak 0,11 juta orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (0,88 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian (1,02 persen poin). Sebanyak 2,19 juta orang (75,24 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,73 persen poin dibanding Agustus 2021. Persentase setengah penganggur turun sebesar 1,69 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu juga mengalami penurunan sebesar 4,61 persen poin dibandingkan Agustus 2021.

2.1.3.12. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah



Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016-2022 secara berturut-turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2014-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.18
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT
Tahun 2014-2022

Indikator	Tahun								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2023

2.1.3.13. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 67,9 persen.

Tabel 2.19
Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT
Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun (%)							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skor PPH	66,2	65,0	71,3	73,0	78,6	69,0	69,2	67,9

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, 2021

2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.4.1. Pendidikan



a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi NTT pada Umur 16-18 Tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 sebesar 74,92 menjadi sebesar 75,77 pada Tahun 2021. Namun pada tahun 2022 menurun menjadi 75,55. Selengkapnya sebagaimana Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
menurut Kelompok Umur 15-18 Tahun per Kabupaten/Kota (%)
Tahun 2020-2022

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 16-18 Tahun		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	78.93	80.06	80.10
Sumba Timur	70.00	70.87	70.71
Kupang	80.86	80.94	81.07
Timor Tengah Selatan	71.29	71.58	71.64
Timor Tengah Utara	74.05	74.33	74.03
Belu	61.93	61.59	61.40
Alor	67.42	67.10	67.25
Lembata	70.88	70.42	69.31
Flores Timur	72.51	73.06	70.79
Sikka	73.31	74.53	74.92
Ende	76.41	76.50	75.76
Ngada	66.18	66.72	66.27
Manggarai	81.95	82.23	81.63
Rote Ndao	75.61	75.76	76.27
Manggarai Barat	73.48	74.84	74.78
Sumba Tengah	75.65	78.25	78.32
Sumba Barat Daya	72.99	73.12	73.88
Nagekeo	67.38	72.47	73.03
Manggarai Timur	74.44	77.58	76.75
Sabu Raijua	81.17	81.00	81.29



Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 16-18 Tahun		
	2020	2021	2022
Malaka	74.07	77.39	77.73
Kota Kupang	88.74	89.32	89.23
Nusa Tenggara Timur	74.92	75.77	75.55

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Fenomena kenaikan dan penurunan APS antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 terjadi karena jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK relatif tidak sama, putus sekolah dan tingkat kelulusan serta adanya perubahan regulasi terkait pengalihan kewenangan terhadap pelaksanaan pendidikan menengah atas dari Kabupaten/Kota ke Provinsi NTT.

Selain itu juga, faktor - faktor yang mempengaruhi Tingkat APS antara lain (1) faktor pendidikan orang dewasa, (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).

Pada kelompok umur yang lebih tinggi, partisipasi sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur menunjukkan kecenderungan penurunan. Jika pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun partisipasi sekolah berada di atas 90 persen, maka pada kelompok penduduk 16-18 tahun hanya sekitar 75 persen dari total penduduk berumur 16-18 persen. Hal ini berarti hanya ada tiga dari empat orang penduduk berumur 16-18 tahun yang sementara bersekolah. Menurut jenis kelamin, terlihat adanya pola yang sama dengan partisipasi sekolah umur yang lebih muda. Partisipasi penduduk perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki pada kelompok umur 16-18 tahun.

Masih ada satu di antara empat orang yang telah meninggalkan bangku sekolah pada kelompok umur ini. Upaya bersama diarahkan untuk memperkecil berbagai hambatan dalam mengakses fasilitas pendidikan. Program wajib belajar yang selama ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi sekolah terutama pada pendidikan dasar dan menengah.

b. Rasio Murid/Guru

Rasio Murid dan Guru adalah Perbandingan antara jumlah Guru pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah Murid. kegunaannya adalah untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu pengajaran



di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Rasio Murid dan Guru SMA di NTT adalah 14 berbanding 1, yang mana masih tergolong ideal sehingga rasio Guru dan Murid di Provinsi NTT bukan merupakan salah satu masalah pendidikan. Akan tetapi penyebaran Guru di NTT tersebut tidak merata di 22 Kabupaten/Kota, dan rasio guru mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia masih terbatas.

Tabel 2.21
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)

Wilayah	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)											
	Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	8	9	9	5520	5410	5447	297	306	333	19	18	16
Sumba Timur	21	23	24	12059	12530	13078	699	668	744	17	19	18
Kupang	58	62	62	15861	15850	15845	1365	1355	1491	12	12	11
Timor Tengah Selatan	43	47	55	16566	17057	16953	1027	1033	1179	16	17	14
Timor Tengah Utara	30	30	30	10093	10254	10149	764	718	782	13	14	13
Belu	24	25	26	9621	9430	9132	684	659	714	14	14	13
Alor	35	36	38	7015	7160	7078	842	822	935	8	9	8
Lembata	14	14	14	4272	4409	4478	340	338	383	13	13	12
Flores Timur	23	24	23	8174	8154	8057	695	658	719	12	12	11
Sikka	23	24	24	9379	9014	8976	685	658	725	14	14	12
Ende	21	21	21	7722	7496	7504	692	647	661	11	12	11
Ngada	13	18	19	6242	6309	6377	412	447	546	15	14	12
Manggarai	26	27	27	14339	15055	14468	876	857	913	16	18	16
Rote Ndao	13	14	14	6375	6687	6957	386	392	429	17	17	16
Manggarai Barat	27	31	30	8668	8820	8928	728	746	863	12	12	10
Sumba Tengah	4	4	5	2769	2932	2913	153	129	164	18	23	18
Sumba Barat Daya	25	26	29	11362	11596	12211	635	618	751	18	19	16
Nagekeo	15	15	15	5716	5487	5543	450	432	447	13	13	12
Manggarai Timur	47	46	46	10161	9960	10062	1057	1030	1097	10	10	9
Sabu Raijua	7	8	10	4815	5535	5427	248	257	329	19	22	16
Malaka	32	34	35	8820	8720	8812	798	746	908	11	12	10
Kota Kupang	41	42	42	15605	15768	15843	1268	1182	1302	12	13	12
Nusa Tenggara Timur	550	580	598	201154	203633	204238	15101	14698	16415	13	14	12

Catatan: Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil

2.1.4.2. Kesehatan

a. Sarana Kesehatan



Sampai dengan Tahun 2021 terdapat 56 Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Data fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis fasilitas di 22 Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2021

Wilayah	Fasilitas kesehatan															
	Rumah Sakit				Puskesmas				Posyandu				Polindes			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat	2	2	3	3	9	10	10	10	245	256	256	250	23	23	23	23
Sumba Timur	3	3	3	3	24	24	24	24	505	571	567	570	85	85	70	70
Kupang	1	1	1	1	26	26	26	27	723	737	763	764	155	155	155	155
Timor Tengah Selatan	2	2	2	2	36	36	36	36	712	847	854	866	60	60	60	60
Timor Tengah Utara	3	3	3	3	26	26	26	26	498	512	512	524	142	142	142	142
Belu	5	5	4	4	17	17	17	17	417	428	435	446	40	40	29	29
Alor	2	2	2	2	26	26	26	26	443	454	444	446	41	41	45	45
Lembata	3	3	3	3	9	9	9	12	315	316	317	318	72	72	72	72
Flores Timur	1	1	1	1	21	21	21	21	530	535	560	561	116	116	116	116
Sikka	3	3	3	3	25	25	25	25	647	648	638	650	125	125	125	125
Ende	2	2	2	3	24	25	25	26	672	641	662	662	75	75	75	75
Ngada	1	1	1	1	19	19	19	20	301	374	365	388	41	41	41	41
Manggarai	2	2	2	2	22	23	23	23	547	577	574	577	19	19	19	19
Rote Ndao	1	1	1	1	12	12	12	12	358	391	402	406	7	7	7	7
Manggarai Barat	2	2	3	3	20	21	21	21	451	475	480	494	19	19	19	19
Sumba Tengah	1	1	1	1	8	8	8	9	179	195	196	197	31	31	31	31
Sumba Barat Daya	1	2	2	2	13	15	16	16	485	463	545	568	57	57	57	57
Nagekeo	1	1	1	1	7	7	8	8	226	301	282	284	58	58	58	58
Manggarai Timur	0	0	1	1	25	29	29	29	559	566	579	579	20	20	20	20
Sabu Raijua	0	1	1	1	8	6	6	6	213	236	264	242	0	0	0	0
Malaka	1	1	1	1	20	20	20	20	460	469	474	474	58	58	58	58
Kota Kupang	13	13	13	14	11	11	11	11	307	315	315	315	5	5	5	5
Nusa Tenggara Timur	50	52	54	56	408	416	418	425	9793	10307	10484	10581	1249	1249	1227	1227

Sumber Data :
1. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2018 & 2019
2. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kesehatan, Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2020 & 2021
3. Data Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi NTT

b. Tenaga Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tenaga Kesehatan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketersediaan tenaga kesehatan juga merupakan salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.23:

Tabel 2.23
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)
Di Provinsi NTT Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Sumba Barat	49	529	166	49	41
Sumba Timur	76	875	410	56	42
Kupang	51	562	781	62	102
Timor Tengah Selatan	60	648	680	64	107



Timor Tengah Utara	56	642	723	99	92
Belu	77	661	339	78	67
Alor	66	778	613	124	125
Lembata	24	367	410	55	49
Flores Timur	57	707	761	98	85
Sikka	57	946	797	91	77
Ende	47	911	826	87	63
Ngada	40	551	482	73	54
Manggarai	45	986	1.064	122	87
Rote Ndao	49	301	292	29	57
Manggarai Barat	64	730	636	91	81
Sumba Tengah	20	280	149	32	31
Sumba Barat Daya	61	684	347	61	52
Nagekeo	40	351	396	41	29
Manggarai Timur	25	901	895	80	71
Sabu Raijua	33	220	190	34	37
Malaka	46	530	493	84	85
Kota Kupang	298	1,759	757	252	115
Nusa Tenggara Timur	1.341	14.919	12.207	1.762	1.549

Sumber: NTT Dalam Angka Tahun 2023

2.1.4.3. Pekerjaan Umum

a. Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi adalah 2.650 km. Panjang capaian jalan mantap pada akhir tahun 2019 adalah 1.743, 88 km dan tidak mantap sepanjang 906,12 km. Pada periode tahun anggaran 2019 hingga 2022 telah dilakukan pencapaian kondisi jalan mantap sepanjang 884,24 km. Ini artinya beban jalan mantap kewenangan provinsi yang akan diselesaikan sampai akhir periode tahun 2023 adalah sepanjang 21,78 km. Melalui dukungan dari anggaran pemerintah provinsi dan sumber-sumber pembiayaan sah lainnya, ditargetkan pada akhir periode tahun anggaran 2023, kondisi jalan kewenangan provinsi sudah 100 persen menjadi jalan mantap.

Total panjang jalan menuju destinasi wisata adalah 542,87 km. Data eksisting tahun 2018 untuk penanganan ruas jalan ke destinasi wisata adalah 64 km dan realisasi penanganan sampai dengan 2020 adalah 165,95 km Rencana penanganan tahun 2021 adalah 171,51 km yang merupakan paket-paket kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana pinjaman daerah melalui PT. SMI, baik lanjutan tahun 2020 maupun paket 2021. Realisasi pelaksanaan seluruhnya pada tahun 2021 adalah 36,64 km dari pelaksanaan paket-paket lanjutan PT. SMI tahun 2020. Dengan demikian capaian sampai dengan 2021 adalah sebesar 202,59 km.



Tabel 2.24 di bawah berikut adalah tabel ruas jalan kewenangan provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur NTT 256/KEP/HK tahun 2017 yang tersebar pada 21 wilayah kabupaten dan kota Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.24
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km)
Tahun 2020-2022

Wilayah	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km)											
	Baik			Sedang			Rusak			Rusak Berat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	61.24	61.58	79.02	10.26	3.70	1.50	2.53	3.85	1.05	13.67	18.58	6.13
Sumba Timur	10.96	102.37	122.40	28.47	20.18	20.18	10.37	17.60	74.79	125.88	134.21	56.99
Kupang	21.00	192.67	244.49	11.21	30.84	22.82	38.90	4.63	10.93	87.37	119.38	69.27
Timor Tengah Selatan	174.71	200.98	226.18	4.50	7.94	4.44	3.65	3.45	3.35	111.90	82.40	60.80
Timor Tengah Utara	124.36	93.93	98.63	7.40	36.11	33.33	0.65	0.95	0.81	0.60	2.02	0.25
Belu	54.72	45.27	54.42	7.70	16.92	9.00	0.60	0.40	-	0.40	0.83	-
Alor	37.52	37.14	88.19	12.34	18.56	10.58	32.64	16.38	6.75	41.33	51.76	18.31
Lembata	37.28	22.62	35.16	0.00	3.30	3.20	0.00	0.00	-	1.72	13.09	0.64
Flores Timur	102.91	90.25	128.51	54.00	13.51	13.39	10.90	0.70	-	30.68	45.44	7.99
Sikka	72.88	58.09	70.68	48.00	17.10	12.86	0.60	0.30	0.30	12.06	14.86	6.51
Ende	86.28	77.72	110.27	30.20	31.90	29.11	14.23	1.50	1.00	15.45	35.04	5.77
Ngada	115.94	128.58	171.61	25.96	22.60	16.14	27.03	2.05	1.98	30.31	46.01	9.52
Manggarai	56.20	56.68	82.51	18.60	19.11	11.04	14.30	1.76	-	9.00	20.55	4.56
Rote Ndao	23.41	20.71	26.09	4.60	6.60	1.92	0.00	0.00	-	0.00	0.70	-
Manggarai Barat	60.88	106.26	115.65	10.80	5.67	5.14	29.90	0.00	-	40.22	29.87	21.01
Sumba Tengah	18.30	18.83	26.45	1.50	4.93	-	1.20	0.30	-	5.45	2.40	-
Sumba Barat Daya	67.45	71.69	79.92	6.14	1.44	0.64	3.20	0.38	-	6.28	9.57	2.51
Nagekeo	59.69	54.69	69.63	4.20	9.82	5.73	6.20	0.60	-	5.27	10.26	-
Manggarai Timur	59.80	53.82	78.72	8.40	12.12	12.12	6.40	3.46	3.46	38.40	43.61	18.71
Sabu Raijua	23.69	21.24	36.28	4.10	5.51	2.30	5.41	0.30	-	5.80	11.95	0.43
Malaka	64.38	55.85	63.31	2.00	11.67	4.42	1.55	0.10	-	0.00	0.32	0.20
Kota Kupang	28.07	25.62	26.38	0.00	1.81	1.50	0.00	0.51	0.09	0.00	0.13	0.10
Nusa Tenggara Timur	1649.36	1596.54	2034.47	208.58	301.31	221.35	210.26	59.21	104.50	581.80	692.93	289.68

Sumber: NTT Dalam Angka Tahun 2023

Sedangkan untuk Jembatan, sampai dengan tahun 2022, panjang Jembatan, jumlah ruas dan banyaknya Jembatan Provinsi menurut Kabupaten/Kota, sebagaimana Tabel 2.25 berikut ini:

Tabel 2.25
Rekapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan Provinsi
Tahun 2022

		SEMULA	MENJADI
--	--	--------	---------



NO	L O K A S I			BANYAKNYA JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN (M)	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN
	PULAU/KAB/KOTA	PANJANG JEMBATA)	JUMLAH RUAS				
1	Kabupaten Alor	331	2	26	331	2	26
2	Kabupaten Lembata	63	1	5	-	-	-
3	Kabupaten Flotim	163	2	14	163	2	14
4	Kabupaten Sikka	341	7	27	341	7	27
5	Kabupaten Ende	699	6	31	699	6	31
6	Kabupaten Nagekeo	113	2	10	66	1	6
7	Kabupaten Ngada	840	9	40	840	9	40
8	Kabupaten Manggarai Timur	184	1	15	184	1	15
9	Kabupaten Manggarai	1.005	4	34	763	3	19
10	Kabupaten Manggarai Barat	75	1	3	75	1	3
11	Kabupaten Sumba Timur	1.117	8	61	344	3	28
12	Kabupaten Sumba Tengah	38	1	6	38	1	6
13	Kabupaten Sumba Barat	107	2	4	107	2	4
14	Kabupaten Sumba Barat Daya	107	1	7	107	1	7
15	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-
16	Kabupaten Kupang	1.272	5	69	1.272	5	69
17	Kabupaten TTS	970	7	37	970	7	37
18	Kabupaten TTU	909	4	53	909	4	53
19	Kabupaten Belu	1.110	6	57	1.110	6	57
20	Kabupaten Rote Ndao	252	3	24	-	-	-
21	Kabupaten Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-
	Nusa Tenggara Timur	9.692	72	523	8.315	61	442

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT, 2022.

b. Sumber Daya Air (Jaringan Irigasi, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya)

Dari penanganan yang dilakukan tahun anggaran 2022 melalui rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa Daerah Irigasi, hingga Oktober 2022 terealisasi melayani luasan sawah 2.500 ha. Pencapaian penanganan (layanan) sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 34.268,08 ha. Total pencapaian layanan 36.768,08 ha atau sebesar 61 % dari total luas Daerah irigasi Kewenangan Provinsi yakni 60.328 Ha.

Tabel 2.26
Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

NO	Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi	Jumlah D.I	Luasan (Ha)	Lokasi
I	KABUPATEN KUPANG	3	3.521	
1	Daerah Irigasi Enorain	1	1.100	Desa Enorain di Kecamatan Amarasi Timur



NO	Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi	Jumlah D.I	Luasan (Ha)	Lokasi
2	Daerah Irigasi Kolidoki	1	1.071	Desa Naibonat di Kecamatan Kupang Timur
3	Daerah Irgasi Netemnanu	1	1.350	Desa Netemnanu di Kecamatan Amfoang Timur
II	KABUPATEN TTS	2	1.489	
1	Daerah Irigasi Batu Putih/Oebobo	1	400	Desa Batu Putih di Kecamatan Batu Putih
2	Daerah Irigasi Oebelo	1	1.089	Desa Oebelo di Kecamatan Amanuban Selatan
III	KABUPATEN TTU	4	5.702	
1	Daerah Irigasi Ponu	1	1.430	Desa Ponu di Kecamatan Biboki Anleu
2	Daerah Irigasi Aroki	1	1.242	Desa Oninbesi di Kecamatan Biboki Tengah
3	Daerah Irigasi Hasfuik		1.600	Desa Nonat Batan di Kecamatan Biboki Anleu
4	Daerah Irigasi Biluana	1	1.430	Desa Fatutasu di Kecamatan Miomaffo Barat
IV	KABUPATEN BELU	3	4.815	
1	Daerah Irigasi Fatubesi	1	1.650	Desa Fatubesi di Kecamatan Tasifeto Timur
2	Daerah Irigasi Maubusa	1	1.350	Desa Dafala di Kecamatan Tasifeto Timur
3	Daerah Irigasi Obor	1	1.815	Desa Leon Tolu di Kecamatan Raimanuk
V	KABUPATEN MALAKA	2	2.650	
1	Daerah Irigasi Alas	1	1.650	Desa Alas di Kecamatan Kobalima
2	Daerah Irigasi Weliman	1	1.000	Desa Naas di Kecamatan Malaka Barat
VI	KABUPATEN ROTE NDAO	1	1.250	
1	Daerah Irigasi Manubulu	1	1.250	Desa Edalode di Kecamatan Pante Baru
V	KABUPATEN LEMBATA	1	1.350	
1	Daerah Irigasi Wai Matan Boto	1	1.350	Desa Labalimut di Kecamatan Nagawutung
VI	KABUPATEN FLORES TIMUR	3	3.630	
1	Daerah Irigasi Konga	1	1.100	Desa Konga di Kecamatan Wulanggitang
2	Daerah Irigasi Waekelak	1	1.080	Desa Bandona di Kecamatan Tanjung Bunga
3	Daerah Irigasi Waiwadan	1	1.450	Desa Waiwadan di Kecamatan Adonara Barat
VII	KABUPATEN SIKKA	1	1.250	
1	Daerah Irigasi Kolisia	1	1.250	Desa Kolisia B di Kecamatan Magepanda
VIII	KABUPATEN NAGEKEO	1	1.000	
1	Daerah Irigasi Malawitu	1	1.000	Desa Olekile di Kecamatan Boawae
IX	KABUPATEN NGADA	4	4.544	
1	Daerah Irigasi Ganggong	1	1.000	Desa Rawang Kalo di Kecamatan Riung
2	Daerah Irigasi Luwur Weton	1	1.000	Desa Wolomeze di Kecamatan Riung
3	Daerah Irigasi Malatawa	1	1.344	Desa Uluwae di Kecamatan Bajawa Utara
4	Daerah Irigasi Nuakua	1	1.200	Desa Wue di Kecamatan Wolomeze
X	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2	2.029	



NO	Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi	Jumlah D.I	Luasan (Ha)	Lokasi
1	Daerah Irigasi Wae Mokel I, II	1	1.007	Desa Watunggene di Kecamatan Kota Komba
2	Daerah Irigasi Waerana	1	1.022	Desa Watu Pari di Kecamatan Kota Komba
XI	KABUPATEN MANGGARAI	4	8.275	
1	Daerah Irigasi Cancar	1	2.500	Desa Donglale di Kecamatan Ruteng
2	Daerah Irigasi Golowoi	1	1.500	Desa Golowoi di Kecamatan Cibal Barat
3	Daerah Irigasi Satar Lenda	1	1.525	Desa Satar Lenda di Kecamatan Satar Mese Barat
4	Daerah Irigasi Wae Ces I - V	1	2.750	Desa Karot di Kecamatan Langke Rebong
XII	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4	4.731	
1	Daerah Irigasi Wae Ganggang	1	1.281	Desa Nanga Kantor di Kecamatan Macang Pacar
2	Daerah Irigasi Wae Paku	1	1.050	Desa Golomanting di Kecamatan Sananggoang
3	Daerah Irigasi Tiwo Lawo	1	1.200	Desa Nangabire di Kecamatan Lembor
4	Daerah Irigasi Wae Racang	1	1.200	Desa Golodaring di Kecamatan Sananggoang
XIII	KABUPATEN SUMBA TIMUR	3	5.460	
1	Daerah Irigasi Mangili	1	2.666	Desa Tanah Manang di Kecamatan Pahunga Lodu
2	Daerah Irigasi Mataiyang	1	1.579	Desa Laihau di Kecamatan Lewa Tidahu
3	Daerah Irigasi Melolo	1	1.215	Desa Mutung Geding di Kecamatan Uma Lulu
1	Daerah Irigasi Loli	1	2.390	Desa Doka Kaka di Kecamatan Loli
2	Daerah Irigasi Wanokaka	1	2.653	Desa Rewarara di Kecamatan
XV	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2	3.589	
	Daerah Irigasi Mataliku	1	1.089	Desa Loura di Kecamatan Keruni
	Daerah Irigasi Waekelo Sawah	1	2.500	Desa Kalemba, Daramere,, Tema Tana di Kecamatan Mareda
	TOTAL	42	60.328	

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT, 2022.

Intervensi program dan kegiatan yang dilakukan untuk menjawab capaian indikator layanan irigasi ini adalah melalui kegiatan Pemeliharaan Berkala maupun Pemeliharaan rutin Daerah Irigasi yang dilakukan setiap tahunnya. Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi tahun 2022 dilakukan pada bebrapa Daerah Irigasi dengan dukungan dana DAU, DAK dan program IPDMIP.

Sementara Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya dengan target Pembangunan 142 embung. Intervensi yang dilakukan diwujudkan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah



Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan yang dilakukan adalah Pembangunan Embung Kecil secara tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya didukung dengan dana Pinjaman Daerah - PT. SMI. Total kebutuhan pembangunan embung untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air adalah sebanyak 497 buah embung. Target pembangunan sesuai RPJMD dan Renstra untuk tahun 2019-2023 adalah 142 buah embung. Realisasi pelaksanaan di tahun 2019–2020 terbangun sebanyak 66 buah embung (46%) yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD. Beban yang belum dicapai sampai akhir tahun anggaran periode 2023 adalah 76 embung (54%). Selain pembangunan embung dengan dana APBD, pembiayaan sumber APBN juga berkontribusi signifikan dimana sampai dengan periode Oktober tahun 2022 telah terbangun 257 buah embung. Sehingga, secara keseluruhan, jumlah embung terbangun sampai dengan tahun 2022 adalah 417 buah embung atau sebesar 84% terhadap total kebutuhan embung sebesar 497 buah.

c. Sanitasi Lingkungan

Demi mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) salah satunya yaitu “Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta berkelanjutan Bagi Semua”, Pemerintah telah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka BABS hingga 0% pada akhir tahun 2024.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan program pemerintah berupa pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. STBM dengan 5 (lima) pilar akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Pelaksanaan STBM dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang



diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong tewujudnya masyarakat sehat yang mandiri.

Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) antara lain:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) ; adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMRT); adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
3. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT); adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
4. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT); adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit

Tabel 2.27
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Tempat Buang Air Besar
di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2020-2022

Wilayah	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Persen)											
	Sendiri			Bersama			Komunal			Tidak ada/ Tidak Menggunakan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	44.84	62.25	58.48	11.50	10.74	6.18	4.92	4.67	7.55	38.74	22.35	27.78
Sumba Timur	62.98	72.90	70.01	11.63	13.80	9.89	4.11	1.43	1.74	21.28	11.88	18.36
Kupang	84.66	85.86	85.68	9.05	7.60	7.87	0.77	0.74	0.03	5.53	5.80	6.42
Timor Tengah Selatan	82.89	80.12	82.53	10.63	13.13	10.01	0.39	0.16	0.37	6.10	6.58	7.09
Timor Tengah Utara	81.22	83.38	84.04	11.95	10.04	9.79	0.60	0.76	0.65	6.22	5.82	5.53
Belu	79.39	81.04	82.21	15.65	13.56	13.57	1.03	0.77	0.71	3.93	4.63	3.51
Alor	76.54	72.50	78.28	11.32	21.17	11.07	2.81	3.56	1.42	9.33	2.77	9.23
Lembata	90.13	90.43	86.85	5.52	5.50	5.47	0.72	0.19	1.07	3.63	3.88	6.61
Flores Timur	83.66	91.91	86.45	6.32	2.63	4.23	0.00	0.00	0.23	10.03	5.46	9.08
Sikka	74.75	74.54	79.66	17.69	15.62	10.78	0.44	0.31	0.00	7.12	9.53	9.56



Wilayah	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Persen)											
	Sendiri			Bersama			Komunal			Tidak ada/ Tidak Menggunakan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Ende	67.70	72.00	77.75	23.21	19.17	14.07	5.66	4.38	3.02	3.43	4.46	5.16
Ngada	92.03	89.14	93.04	5.88	7.25	4.50	0.26	0.00	0.45	1.83	3.61	2.01
Manggarai	74.30	81.06	81.96	16.34	9.27	7.31	2.92	2.46	2.11	6.44	7.20	8.63
Rote Ndao	79.25	85.71	85.87	4.73	3.99	5.54	1.54	0.20	0.48	14.49	10.10	8.11
Manggarai Barat	75.64	79.02	81.78	10.32	10.43	7.56	3.10	3.29	2.98	10.94	7.26	7.68
Sumba Tengah	68.99	68.73	60.45	3.77	5.70	6.34	1.20	2.34	0.46	26.04	23.22	32.76
Sumba Barat Daya	59.32	66.49	68.00	6.31	5.65	4.70	0.75	2.02	0.19	33.63	25.84	27.11
Nagekeo	88.45	87.57	86.81	6.51	5.86	6.72	1.50	1.50	0.74	3.55	5.07	5.73
Manggarai Timur	81.45	83.93	84.13	10.06	10.01	5.90	0.68	1.52	0.44	7.81	4.54	9.53
Sabu Raijua	85.20	82.22	79.20	7.05	5.55	6.51	0.18	0.22	0.20	7.57	12.02	14.09
Malaka	62.51	68.02	54.52	17.40	19.59	27.58	5.38	3.69	4.23	14.70	8.69	13.67
Kota Kupang	73.57	76.70	81.35	25.09	22.67	17.43	1.07	0.50	0.85	0.27	0.12	0.37
Nusa Tenggara Timur	76.39	79.20	79.89	12.63	11.89	9.83	1.67	1.41	1.18	9.30	7.50	9.10

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



Gambar 2.9
Capaian Desa/Kelurahan STOP BABS Tahun 2022

Jumlah desa Stop BABS Tahun 2022 berjumlah 2.186 desa dari 3.353 desa/kelurahan (65%). Terdapat 5 kabupaten yang telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten/Kota Stop BABS, yaitu Kota Kupang, Alor, Manggarai, Flores Timur dan Belu. Dari data tersebut juga diketahui masih 9 kabupaten yang pencapaian Desa ODF rendah yaitu di bawah 50% antara lain Kabupaten



Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Sikka, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo dan Malaka.

Indikator suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah mencapai status SBS adalah:

- 1. Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat.
- 2. Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
- 3. Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.

Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.



Gambar 2.10
Capaian Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM Tahun 2022

Jumlah desa yang melaksanakan STBM adalah sebanyak 3.117 desa dari 3.353 desa di Provinsi NTT (92,96%). Terdapat 11 kabupaten/kota yang telah 100 persen melaksanakan STBM, antara lain : Kota Kupang, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Rote Ndao, Manggarai, Belu, Alor, lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Kupang. Diketahui pula, masih terdapat 2 kabupaten yang pelaksanaan STBM di desa/kelurahannya masih di bawah 60% yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Nagekeo.



Indikator bahwa suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah melaksanakan STBM adalah:

1. Minimal telah ada intervensi melalui Pemicuan di salah satu dusun dalam desa/kelurahan tersebut.
2. Ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi
3. intervensi STBM seperti disebutkan pada poin pertama, baik
4. individu (natural leader) ataupun bentuk kelompok masyarakat.
5. Sebagai respon dari aksi intervensi STBM, kelompok masyarakatmenyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapakitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakatibersama.

Tabel 2.28
Data Akses Sanitasi Layak, Desa Stop BABS Dan STBM
Provinsi NTT

No	Lokasi/ Kab/ Kota	Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)			Jumlah Desa/ Kelurahan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			
		Jumlah KK	Total KK akses Sarana	% KK Akses Sarana Sanitasi		Desa Melaksanakan STBM		Desa Stop BABS (SBS)	
						Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sumba Barat	26,109	15,938	61.04%	74	62	83.78%	12	16%
2	Sumba Timur	55,382	47,887	86.47%	156	156	100.00%	68	44%
3	Kupang	74,273	66,521	89.56%	177	177	100.00%	115	65%
4	Timor Tengah Selatan	114,141	112,972	98.98%	278	264	94.96%	212	76%
5	Timor Tengah Utara	57,173	53,925	94.32%	193	185	95.85%	27	14%
6	Belu	53,472	53,472	100.00%	81	81	100.00%	81	100%
7	Alor	47,682	47,682	100.00%	175	175	100.00%	175	100%
8	Lembata	34,356	34,198	99.54%	151	151	100.00%	139	92%
9	Flores Timur	61,841	61,841	100.00%	250	250	100.00%	250	100%
10	Sikka	78,631	70,908	90.18%	160	160	100.00%	62	39%
11	Ende	66,616	66,600	99.98%	278	258	92.81%	275	99%
12	Ngada	32,240	31,640	98.14%	151	125	82.78%	108	72%
13	Manggarai	79,268	79,268	100.00%	171	171	100.00%	171	100%
14	Rote Ndao	34,942	29,513	84.46%	119	119	100.00%	33	28%
15	Manggarai Barat	56,758	40,908	72.07%	169	169	100.00%	99	59%
16	Sumba Tengah	16,227	13,820	85.17%	65	64	98.46%	18	28%
17	Sumba Barat Daya	57,865	38,325	66.23%	175	92	52.57%	35	20%
18	Nagekeo	31,185	28,573	91.62%	113	64	56.64%	41	36%



No	Lokasi/ Kab/ Kota	Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)				Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)				
		Jumlah KK	Total KK akses Sarana	% KK Akses Sarana Sanitasi		Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa Melaksanakan STBM		Desa Stop BABS (SBS)	
							Jumlah	%	Jumlah	%
19	Manggarai Timur	66,167	62,254	94.09%	176	176	100.00%	108	61%	
20	Sabu Raijua	20,198	19,315	95.63%	63	55	87.30%	49	78%	
21	Malaka	50,032	37,163	74.28%	127	112	88.19%	57	45%	
22	Kota Kupang	79,358	79,358	100.00%	51	51	100.00%	51	100%	
	Nusa Tenggara Timur	1,193,916	1,092,081	91.47%	3353	3117	92.96%	2186	65%	

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Akses sanitasi layak penduduk NTT tahun 2022 mencapai angka 91,47 %. Sebagian besar kabupaten di wilayah NTT telah mencapai lebih dari 80 % dan masih 4 kabupaten yang berada di bawah 80% akses sanitasi layak yaitu Kabupaten Malaka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Manggarai Barat

2.1.4.4. Perhubungan

Transportasi Udara sangat strategis dengan *load Factor* angkutan udara mencapai diatas 70%. Angkutan ini selain dipakai untuk pelayanan kemasyarakatan oleh pemerintah, namun yang lebih banyak menggunakan adalah pihak swasta untuk keperluan ekonomi dan juga keperluan penumpang wisatawan yang datang di NTT karena potensi pariwisata di NTT telah terbukti diminati oleh wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Bandara El Tari sebagai bandara pengumpul skala sekunder dengan status Bandara Internasional dan tiga bandara Pengumpul skala tersider dengan status Domestic yaitu Bandara H. Aroebusman, Bandara Frans Seda, Bandara Umu Meheng Kunda dan Bandara Haliwen serta bandara Domestic dengan tingkat pelayanan skala pengumpan yaitu Bandara Komodo, Frans Sales Lega, Mali, Tambolaka, Wunopitu, Gewayantana, Terdamu dan Bandara DC. Saudale.



Tabel 2.29
Arus Penumpang yang Datang dan Berangkat pada Pelabuhan Udara Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2022

Bandara	Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara (Jiwa)					
	Datang			Berangkat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tambolaka - Sumba Barat Daya	54633	33940	79481	50006	36992	88971
Umbu Mehang Kunda - Sumba Timur	51044	52634	46081	47519	55175	50859
Terdamu - Sabu Raijua	3952	2989	2770	4191	3584	3064
A. A. Bere Talo - Belu	19610	7993	15831	19674	7732	14895
Mali – Alor	29639	22310	22090	28884	22176	22302
Kabir - Alor	-	-	247	-	-	331
Wunopito – Lembata	3959	4976	10410	3809	4470	10362
Gewayantana – Flores Timur	24937	17753	16544	25889	15650	15664
Frans Seda – Sikka	59208	47324	57706	54683	49376	60072
H. Aroeboesman – Ende	55829	54298	54520	55038	55029	53021
Toreleleo - Ngada	24381	21472	19237	25921	23215	21306
Frans Sales Lega – Manggarai	6134	10490	6668	6134	11646	6998
Komodo –Lekunik – Rote Ndao- Manggarai Barat	13656	12218	9504	14768	12357	10139
Komodo – Manggarai Barat	167859	154800	308613	163046	163045	301401
Eltari – Kota Kupang	495384	499770	623774	441124	440126	566900
Jumlah	1010225	942967	1273476	940695	900573	1226285

Sumber: BPS 2023

2.1.4.5. Listrik

Penyediaan tenaga listrik PLN di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan, namun belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk dan jumlah rumah tangga dan lain-lain. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik maupun Non Listrik sebagaimana Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen) Tahun 2020-2022

Wilayah	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)											
	Listrik PLN dengan meteran			Listrik PLN tanpa meteran			Listrik non PLN			Bukan listrik		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	46.53	62.98	68.13	7.60	-	-	23.19	20.57	18.79	22.68	16.45	13.08
Sumba Timur	49.15	71.60	75.42	7.19	-	-	36.56	25.26	21.18	7.10	3.14	3.40
Kupang	69.94	84.48	87.12	11.10	-	-	8.10	6.84	5.53	10.86	8.68	7.35
Timor Tengah Selatan	40.59	68.76	77.78	7.59	-	-	13.54	16.13	12.69	38.28	15.11	9.53
Timor Tengah Utara	70.38	91.46	91.96	14.64	-	-	6.64	1.82	5.33	8.35	6.73	2.71
Belu	73.26	92.92	95.96	16.51	-	-	0.75	1.12	0.18	9.47	5.95	3.86



Wilayah	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)											
	Listrik PLN dengan meteran			Listrik PLN tanpa meteran			Listrik non PLN			Bukan listrik		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Alor	70.22	80.99	86.94	8.03	-	-	14.36	12.41	10.80	7.38	6.60	2.26
Lembata	83.56	95.76	97.58	7.85	-	-	1.84	0.92	0.32	6.75	3.32	2.10
Flores Timur	89.58	97.62	98.17	6.59	-	-	2.78	0.34	0.00	1.05	2.04	1.83
Sikka	68.16	81.79	90.06	13.62	-	-	3.80	8.47	4.71	14.42	9.74	5.24
Ende	83.89	93.92	95.66	7.20	-	-	3.80	4.52	3.45	5.10	1.56	0.89
Ngada	73.87	82.63	87.60	6.39	-	-	12.72	14.87	8.05	7.02	2.50	4.34
Manggarai	59.82	85.28	86.87	14.93	-	-	17.13	11.58	9.83	8.13	3.14	3.29
Rote Ndao	71.65	95.33	96.68	9.67	-	-	11.95	2.19	1.32	6.74	2.47	2.00
Manggarai Barat	49.44	67.94	82.10	14.84	-	-	25.64	20.41	14.24	10.08	11.65	3.67
Sumba Tengah	37.05	53.86	56.09	3.42	-	-	41.93	30.60	30.97	17.60	15.54	12.93
Sumba Barat Daya	32.28	51.55	55.61	6.38	-	-	25.94	24.31	23.86	35.40	24.14	20.53
Nagekeo	82.04	90.58	95.19	10.00	-	-	3.90	5.04	3.54	4.05	4.38	1.27
Manggarai Timur	31.38	56.31	62.62	8.55	-	-	23.93	32.89	31.09	36.14	10.80	6.29
Sabu Raijua	41.14	57.37	71.22	5.78	-	-	47.32	36.54	22.48	5.76	6.08	6.31
Malaka	67.01	90.91	93.32	14.57	-	-	8.55	0.84	1.91	9.87	8.25	4.77
Kota Kupang	84.10	99.40	99.99	15.88	-	-	0.00	0.57	0.00	0.02	0.03	0.01
Nusa Tenggara Timur	63.34	81.12	85.58	10.70	-	-	12.70	11.31	9.30	13.25	7.57	5.13

Sejak 2021 kategori "Listrik PLN tanpa meteran" digabung dengan "Listrik PLN dengan materan" menjadi kategori "Listrik PLN"

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

2.1.4.6. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Koperasi

UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian mendefenisikan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hokum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Untuk mewujudkan NTT sebagai provinsi koperasi, telah dilakukan berbagai upaya dengan pelibatan lintas pelaku dengan intervensi program dan kegiatan strategis, upaya ini berdampak pada pertumbuhan jumlah koperasi di NTT dari tahun 2019 s/d 2022 yang terus bertambah. Tahun 2020 jumlah koperasi di Provinsi NTT sebanyak 4.256 koperasi, yang terdiri dari koperasi aktif 3.905 dan koperasi tidak aktif sebanyak 351 koperasi. Tahun 2021 jumlah koperasi 4.282 dengan jumlah koperasi aktif 3.330 koperasi, dan 952 koperasi tidak aktif. Tahun 2022 jumlah koperasi 4.291 dengan jumlah



koperasi aktif 3.339 dan koperasi tidak aktif 952. Pertumbuhan koperasi di NTT dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut :

Tabel 2.31
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota Di NTT
Tahun 2022

No	Kabupaten/kota	Jumlah
1	Kota Kupang	633
2	Kabupaten Kupang	395
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	166
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	104
5	Kabupaten Belu	179
6	Kabupaten Malaka	89
7	Kabupaten Alor	187
8	Kabupaten Lembata	116
9	Kabupaten Flores Timur	206
10	Kabupaten Sikka	190
11	Kabupaten Ende	187
12	Kabupaten Ngada	122
13	Kabupaten Nagekeo	115
14	Kabupaten Manggarai	173
15	Kabupaten Manggarai Timur	118
16	Kabupaten Manggarai Barat	147
17	Kabupaten Sumba Timur	149
18	Kabupaten Sumba Tengah	53
19	Kabupaten Sumba Barat	135
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	152
21	Kabupaten Rote Ndao	203
22	Kabupaten Sabu Raijua	49
Provinsi		423
JUMLAH		4.291

Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT

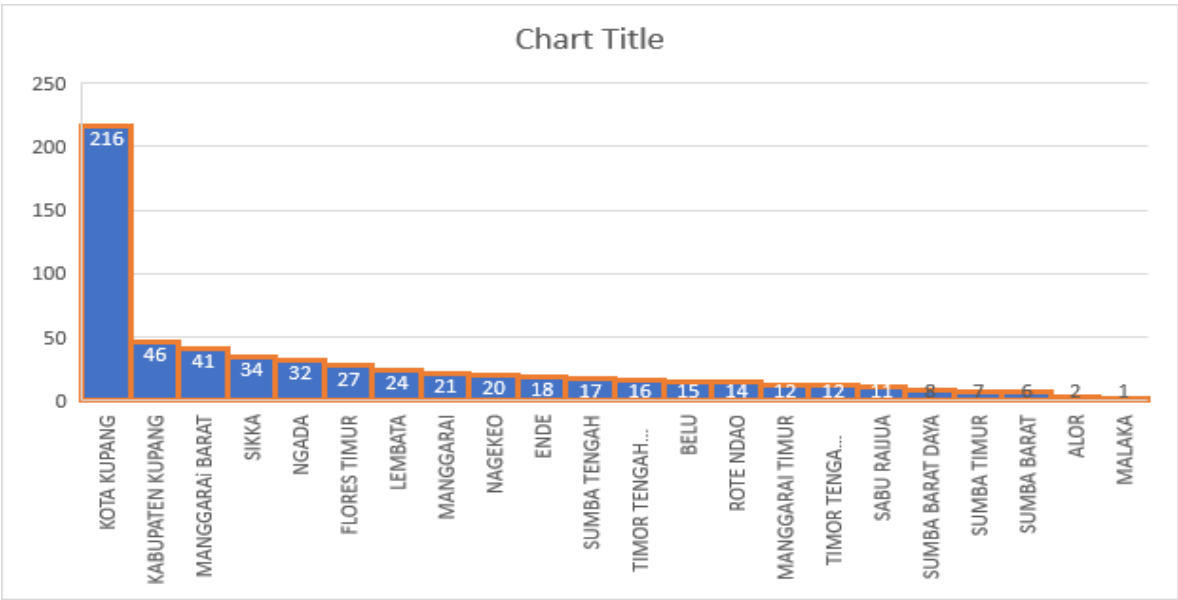
Data di atas menunjukkan bahwa jumlah koperasi terus bertambah selama tiga tahun terakhir dengan tingkat persentase pertumbuhan sebesar 0,822 % atau rata-rata penambahan jumlah koperasi setiap tahun $\pm$ 35 koperasi. Jumlah anggota koperasi tahun 2020 sebanyak 2.200.108 orang, 2021 sebanyak 2.492.946, dan tahun 2022 sebanyak 2.493.230 orang. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi selama 2020-2022 memiliki peningkatan sebesar 13,32 %. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah manajer Pertumbuhan manajer koperasi selama 2020-2021 yang memiliki trend pertumbuhan negative yang mana tahun 2020 jumlah manajer 1.840 orang, tahun 2021 1.440 orang dan tahun 2022 sebanyak 1.440 orang



manajer, hal ini dikarenakan jumlah koperasi tidak aktif yang meningkat pada periode tahun 2020-2021. Kepemilikan modal untuk menunjang pengembangan/ keberlanjutan koperasi sangat didukung oleh ketersediaan modal sendiri serta modal luar. Selama periode 2020-2022 jumlah modal sendiri yang dimiliki koperasi berjumlah 5.445.432.639.417 (triliun) dengan persentase pertumbuhan modal sendiri selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 11,14%. Sedangkan jumlah modal luar sebesar 7.054.464.272.918 (triliun) dengan persentase pertumbuhan 11,11%. Untuk aset koperasi selama periode tahun 2020-2022 adalah sebesar 12.548.423.670.4436 (triliun) dengan pertumbuhan 11,55%. Pertumbuhan volume usaha untuk tiga tahun terakhir memiliki pertumbuhan dengan trend menurun dengan jumlah persentase pertumbuhan sebesar -14,11%. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan SHU pada koperasi di NTT, selama periode ini SHU memiliki persentase pertumbuhan menurun yakni sebesar -2,42%.

b. Digitalisasi Koperasi

Pengertian digitalisasi koperasi adalah upaya untuk mengubah manajemen koperasi menjadi digital. Pengembangan digitalisasi koperasi diharapkan mampu membuat koperasi bergerak dinamis dan mampu mempercepat gerak bisnis koperasi. Digitalisasi Koperasi berorientasi terhadap tujuan, kemudahan, kecepatan layanan, kenyamanan, juga keamanan bertransaksi dengan koperasi. Guna mengembangkan koperasi di NTT lebih dinamis, digitalisasi koperasi menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan pelibatan pihak terkait. Perkembangan digitalisasi di NTT dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.





Gambar 2.11

Perkembangan Digitalisasi Koperasi Menurut Kabupaten/Kota Di NTT Tahun 2022

Dari 4.291 koperasi yang ada di NTT, jumlah koperasi yang sudah melakukan digitalisasi sebanyak 600 koperasi yang tersebar di 22 kabupaten/kota, yang sudah on proses sebanyak 237 koperasi, cleansing 16 koperasi, boarding 15 koperasi, dan yang go live sebanyak 332. Persentase per kabupaten/kota yang sudah melaksanakan digitalisasi koperasi adalah sebagai berikut : Kota Kupang 34% koperasi yang sudah digital dari 633 koperasi; Kabupaten Kupang 11% dari 395 koperasi; Kabupaten Flores Timur 13% dari 206 koperasi; Kabupaten Ende 9% dari 187 koperasi; Kabupaten Belu 8,37% dari 179 koperasi; Kabupaten Alor 1,06% dari 187 koperasi; Kabupaten Lembata 20,6% dari 116 koperasi; Kabupaten Malaka 1,12% dari 89 koperasi; Kabupaten Manggarai 12,1% dari 173 koperasi; Kabupaten Manggarai Barat 27,8% dari 147 koperasi; Kabupaten Manggarai Timur 10,1% dari 118 koperasi; Kabupaten Nagekeo 17,3% dari 115 koperasi; Kabupaten Ngada 26,2% dari 112 koperasi; Kabupaten Rote Ndao 6,89% dari 203 koperasi; Kabupaten Sabu Raijua 22,4% dari 49 koperasi; Kabupaten Sikka 17,8% dari 190 koperasi; Kabupaten Sumba Barat 4,4% dari 135 koperasi; Kabupaten Sumba Barat Daya 5,2% dari 152 koperasi; Kabupaten Sumba Tengah 32,07% dari 53 koperasi; Kabupaten Sumba Timur 4,69% dari 149 koperasi; Kabupaten Timor Tengah Selatan 7,22% dari 166 koperasi; Kabupaten Timor Tengah Utara 15,3% dari 104 koperasi.

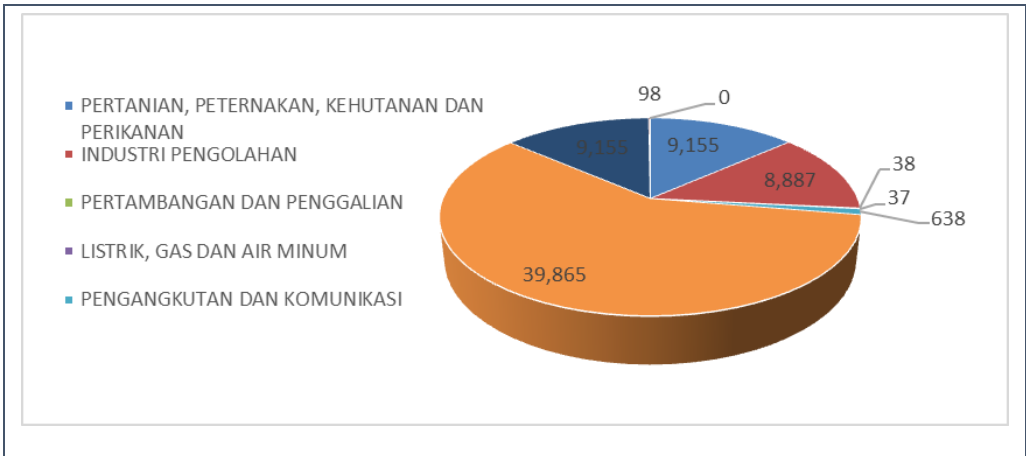
2.1.4.7. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. UMKM di Indonesia diklasifikasikan menjadi Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. UMKM juga merupakan usaha yg dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha.

Permasalahan umum dibidang koperasi dan UKM adalah rendahnya daya saing produk Koperasi dan UKM menjadi salah satu tantangan pengembangan produk Koperasi dan UKM NTT, berkembangnya bisnis ritail oleh pengusaha besar saat ini menjadikan produk Koperasi dan UKM semakin terhimpit, disatu sisi keberadaan UKM membutuhkan kepastian tempat usaha, dengan keterbatasan yang dimiliki Koperasi dan UKM seringkali melakukan aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah. Selain itu rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM, terlebih



Koperasi dan UKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas, kebanyakan Koperasi dan UKM hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal. Kinerja pembangunan UMKM di NTT digambarkan pada grafik di bawah ini:



Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT

Gambar 2.12
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurut jenis usaha Tahun 2022

Dari sembilan lapangan usaha UMKM yang ada di Provinsi NTTT, dari jumlah tersebut tiga lapangan usaha terbanyak adalah : 1). Lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran yakni sebanyak 39.865 lapangan usaha dengan persentase 40,57%; 2). Lapangan usaha pertanian dengan jumlah 39.552 lapangan usaha dengan persentase 40,25%; 3) Lembaga keuangan sebanyak 98,00 lapanganusaha dengan persentase 9,32%.

2.1.4.8. Penanaman Modal

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Urusan penanaman modal di Provinsi NTT di laksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Berikut akan di sajikan Tabel 2.32 realisasi PMDN di Provinsi NTT tahun 2020-2022 :

Tabel 2.32
Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022

Wilayah	Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)											
	Tenaga Kerja			Investasi (US \$)			Investasi (Rp)			Proyek		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	-	-	-	1679104	5143455	9	22500000000	75094435920	2503000000	9	37	174
Sumba Timur	-	-	-	78885039	34339312	48	1057059519701	501353958558	935592000000	42	120	65198



Wilayah	Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)											
	Tenaga Kerja			Investasi (US \$)			Investasi (Rp)			Proyek		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kupang	-	-	-	43146946	106245897	54	578205297985	1551190098275	1019453000000	15	41	71042
Timor Tengah Selatan	-	-	-	1322999	6390418	146	17728184000	93300107047	29295000000	13	374	2041
Timor Tengah Utara	-	-	-	2674104	679358	53	35833000000	9918620000	15671000000	16	31	5273
Belu	-	-	-	16891937	537606	20	226351950000	7849050000	16175000000	14	17	1127
Alor	-	-	-	-	753809	5	0	11005611714	700000000	24	16	49
Lembata	-	-	-	5169500	260051	67	69271305930	3796744668	39491000000	4	2	2752
Flores Timur	-	-	-	1943433	7782	140	26042000000	113618552	9863000000	7	1	688
Sikka	-	-	-	1456168	8360	125	19512656520	122053771	23341000000	10	66	1627
Ende	-	-	-	20550	42984	16	275365458	627565865	4456000000	4	10	311
Ngada	-	-	-	0	6608726	65	0	96487397038	32283000000	2	33	2250
Manggarai	-	-	-	7658652	10861804	101	102625930635	158582330902	88954000000	17	82	6199
Rote Ndao	-	-	-	1915424	3877734	41	25666684788	56614909980	26872000000	4	40	1872
Manggarai Barat	-	-	-	68333675	10115456	173	915671242832	147685656434	311103000000	20	220	21680
Sumba Tengah	-	-	-	0	1578627	36	0	23047948350	20185000000	1	7	1407
Sumba Barat Daya	-	-	-	12449891	9123931	79	166828538323	133209396967	83334000000	28	104	5807
Nagekeo	-	-	-	0	1207333	24	0	17627065305	59907000000	1	30	4175
Manggarai Timur	-	-	-	7206493	3832757	30	96567000000	55958244669	14905000000	6	109	1039
Sabu Raijua	-	-	-	0	949058	6	0	13856250000	1097000000	0	44	76
Malaka	-	-	-	8761851	759120	6	117408807741	11083153352	8297000000	2	4	578
Kota Kupang	-	-	-	32315238	84813137	503	433024186746	1238271804481	655870400000	115	328	45705
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	291833707	288136714	1747	3910571670659	4206796021848	3399347400000	354	1716	241070

Sumber : BPS Provinsi NTT (2023)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi investasi PMDN tahun 2022 di Provinsi NTT mencapai Rp. 3.399.347.400.000,- dimana angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 4.206.796.021.848,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai investasi di NTT dimana pada tahun 2021 nilai investasi di NTT mencapai 288.136.714 (US) \$ sedangkan pada tahun 2022 turun cukup signifikan menjadi hanya 1.747 (US) \$.

Untuk tahun 2022 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 6,95 Triliun. Sedangkan target realisasi investasi berdasarkan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6,324.085.076.095, yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 2.529.634.030.438 dan PMDN sebesar Rp. 3.794.451.045.657. Realisasi Investasi s/d 31 Oktober 2022 di Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 3.304.140.000.000 (52,25%), terdiri dari realisasi investasi PMA sebesar Rp. 694.540.000.000 (21,02%) dan realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 2.609.600.000.000 (78,98%) (DPMPTSP Provinsi NTT, 2022).



Beberapa faktor yang mendorong peningkatan investasi di NTT adalah potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan serta di dukung dengan adanya kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi di NTT melalui penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem perijinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perijinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri dimana dengan penerapan sistem OSS ini investor tidak lagi dihadapkan pada proses administrasi yang berbelit-belit dan rumit.

Selain itu terdapat juga beberapa faktor yang menjadi penghambat masuknya investasi ke NTT antara lain adalah (1) keterbatasan infrastruktur, (2) Keterbatasan kompetensi tenaga kerja, (3) Permasalahan kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, dan (4) Legalitas kepemilikan/ status tanah. Selanjutnya juga ditemukan beberapa masalah yang terkait dengan para investor itu sendiri antara lain adalah (1) Pelaku usaha belum memahami pengisian LKPM Online melalui sistem OSS, (2) Masih terdapat perusahaan belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online secara teratur dan tepat waktu, 3) Masih ada perusahaan yang sudah memiliki NIB namun belum memenuhi komitmen atau persyaratan dasar, seperti izin lokasi, izin lingkungan (AMDAL/UKL/UPL), serta kesesuaian dengan tata ruang, dan (4) Lokasi perusahaan yang tersebar di kecamatan dan desa menyulitkan untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan sampai ke lokasi sasaran, karena terbatasnya anggaran baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota (DPMPTSP Provinsi NTT, 2022).

2.1.4.9. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dunia usaha dan *civil society* untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui program pelayanan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga



tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, korban bencana alam, fakir miskin, penyandang cacat, tunas susila, gelandangan, pemulung, lansia terlantar, penyandang HIV/AIDS, pekerja migran, Eks Narapidana, Korban Penyalahgunaan Napza, dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa kabupaten seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang perlu ditangani secara serius. Permasalahan PMKS terbanyak di Provinsi NTT pada tahun 2017 adalah fakir miskin, anak terlantar dan korban bencana alam. Data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2017 tersaji dalam Tabel 2.33 di bawah ini



Tabel 2.33
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Jenis PPKS												
		Anak Balita Terlantar (org)	Anak Terlantar (org)	Anak Berhadapan Dengan Hukum (org)	Anak Jalanan (org)	Anak Dengan Kedisabilitasan (org)	Lanjut Usia Terlantar (org)	Penyandang Disabilitas Terlantar (org)	Korban Trafficking (org)	Korban Tindak Kekerasan (org)	Korban Bencana Sosial (org)	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (org)	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (org)	Fakir Miskin (kk)
1	Kota Kupang	9	247	123	375	163	7.167	995			16	3		49.534
2	Kab. Kupang	32	203	108		139	25.823	799			3	5		64.892
3	Kab. TTS	30	147	41		138	47.376	557				3		87.005
4	Kab. TTU	51	678	61		203	20.159	1.057			1	2		48.626
5	Kab. Belu		119	33	-	76	12.001	377	1			2		35.682
6	Kab. Malaka	8	49	27		8	18.023	31	1			7		37.782
7	Kab. Rote Ndao			20		28	10.970	196				5		30.141
8	Kab. Sabu Raijua			20			8.651	2						24.088
9	Kab. Sumba Timur		65	73		11	18.876	110				1		56.390
10	Kab. Sumba Tengah	26	128	8			6.129							19.762
11	Kab. Sumba Barat	3	211	12		16	9.473	74				1		35.137
12	Kab. Sumba Barat Daya	25	137	35		69	19.742	302						83.590
13	Kab. Manggarai Barat	3	160	10		49	16.520	219						54.227
14	Kab. Manggarai	3	28	29		105	19.295	409		4				89.575
15	Kab. Manggarai Timur			3		79	17.505	415						58.401
16	Kab. Ngada		45	17		83	8.063	479						19.344
17	Kab. Nagekeo			28		31	9.625	102						25.732
18	Kab. Ende	5	212	27		105	19.792	735				2		51.114
19	Kab. Sikka	99	1.352	46		68	24.110	323	1					75.976
20	Kab. Flores Timur		1	19		147	20.311	612	1			1		48.604
21	Kab. Alor	32	82	70		48	16.378	296						44.673
22	Kab. Lembata		22	22		1	12.671	57				1		31.744
Jumlah		326	3.886	832	375	1.567	368.660	8.147	4	4	20	33	-	1.072.019

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah PMKS di Provinsi NTT pada tahun 2022 yang terbanyak adalah keluarga fakir miskin yang mencapai 1.072.019 keluarga kemudian lanjut usia terlantar yang mencapai 368.660 jiwa dan penyandang disabilitas terlantar yang mencapai 8.147 jiwa. Beberapa tantangan dalam pelayanan terhadap PMKS di NTT adalah (1) Rendahnya tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan sosial yang berdampak pada keterlambatan pemberian pelayanan bagi PMKS, (2) Upaya penanganan dan pemberdayaan fakir miskin yang bersumber dari berbagi pendanaan belum terintegrasi dan bersinergi dengan baik, serta aspek keberlanjutannya belum didesain dengan baik, (3) Kebijakan Nasional mengharuskan upaya penanganan dan pemberdayaan PMKS, terutama fakir miskin menggunakan aplikasi data base sehingga semua pemangku kepentingan pada tingkat desa/kelurahan diuntut untuk memahami teknologi informasi, dan (4) Frekuensi bencana yang cukup tinggi belum diimbangi dengan ketersediaan jumlah SDM Taruna Siaga Bencana dan fasilitas pendukung yang memadai.

2.1.4.10. Pertanian

Sektor pertanian sampai saat ini tetap memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional maupun regional, baik berupa sumbangan langsung maupun tidak langsung. Sumbangan langsung seperti dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa melalui ekspor, dan penekanan inflasi. Sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran sektor pertanian dalam melaksanakan koordinasi dan memberikan fasilitas bagi pelaksanaan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat.

Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai daerah kepulauan dengan topografi yang berbukit dan beriklim kering dalam hal struktur perekonomian hingga saat ini masih bergantung pada sektor pertanian. Pada tahun 2021 kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sebesar 29,17 persen. Nilai tersebut didominasi subsektor peternakan dan hasil-hasilnya (10,18%) dan tanaman pangan (7,58%).



Tabel 2.34
Sektor Pertanian Dalam Pembentukan PDRB Tahun 2019-2021
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Uraian	Tahun		
	2020	2021	
I. Sektor Pertanian	28,51	29,17	
1. Tanaman pangan	7,75	7,58	
2. Tanaman hortikultura	2,20	2,24	
3. Tanaman perkebunan	2,34	2,46	
4. Peternakan dan hasil-hasilnya	9,89	10,18	
5. Jasa pertanian dan perburuan	0,44	0,40	

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS

Pada masa pandemi (2020-2021), sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan positif dengan angka 4,26 persen, dibandingkan dengan sektor non pertanian seperti perdagangan, konstruksi, pariwisata yang pertumbuhannya cenderung negatif., Artinya bahwa sektor pertanian di NTT harus dijadikan pegangan dalam mendukung sektor lainnya terutama sektor pariwisata di NTT yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai *prime mover* pembangunan NTT.

a. Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.¹

Perkembangan produksi padi di NTT selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Produksi padi di NTT tahun 2020 sebesar 725.024 ton, pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 731.878 ton. Produksi padi di NTT pada Tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 24.172 ton dibandingkan 2021.



Tabel 2.35
Produksi Padi di Provinsi NTT
Tahun 2020-2022

Wilayah	Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota (Ton)		
	2020	2021	2022
Sumba Barat	23588	30574	30180
Sumba Timur	49563	54189	52284
Kupang	52086	55838	61255
Timor Tengah Selatan	16496	14539	15616
Timor Tengah Utara	12942	32661	25924
Belu	11761	22449	23239
Alor	3324	3196	3556
Lembata	3591	765	201
Flores Timur	11165	8089	7517
Sikka	17235	11399	11346
Ende	20627	23684	21882
Ngada	51771	54380	48062
Manggarai	92346	96433	88359
Rote Ndao	22600	26795	28835
Manggarai Barat	126012	100874	124087
Sumba Tengah	26238	27757	24187
Sumba Barat Daya	42689	41311	49435
Nagekeo	36790	29776	27527
Manggarai Timur	74361	66798	77979
Sabu Raijua	4493	8634	7205
Malaka	24383	20239	25806
Kota Kupang	963	1498	1568
Nusa Tenggara Timur	725024	731878	756050

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Sampai Desember 2022, Nusa Tenggara Timur akan mengembangkan 142.833 hektar jagung di lahan kering melalui program tanam jagung panen sapi. Produksi jagung saat ini mencapai 800.000 ton, dan tahun 2023 ditargetkan mencapai 3 juta ton demi kemandirian pangan di kalangan petani dan swasembada jagung di Indonesia. Produktifitas jagung di NTT tergolong rendah, jika dibandingkan dengan produktifitas jagung nasional yang sudah mencapai 5,09 ton/ha. Permasalahan utama rendahnya produktifitas tanaman jagung adalah keterbatasan modal usaha dan jaminan pemasaran hasil. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam peningkatan produksi tanaman jagung adalah penyediaan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk, obat-obatan, dengan dukungan alsintan sehingga memudahkan petani saat penanaman dan panen.



Tabel 2.36
Produksi Jagung Menurut Kabupaten/Kota (Ton),
2019-2021

Wilayah	Produksi Jagung menurut Kabupaten/Kota (Ton)		
	2019	2020	2021
Sumba Barat	23.818	17.816	30.574
Sumba Timur	49.724	48.011	36.030
Kupang	64.017	41.524	42.689
Timor Tengah Selatan	168.398	125.340	183.931
Timor Tengah Utara	46.621	36.406	42.945
Belu	45.185	34.786	31.975
Alor	21.164	25.258	23.995
Lembata	21.866	15.682	30.191
Flores Timur	23.618	18.631	20.118
Sikka	30.878	19.329	30.344
Ende	14.323	17.357	14.938
Ngada	50.719	17.149	16.938
Manggarai	8.447	13.132	10.316
Rote Ndao	10.476	9.312	6.895
Manggarai Barat	41.082	28.637	10.078
Sumba Tengah	19.461	19.364	26.506
Sumba Barat Daya	97.374	109.056	104.280
Nagekeo	21.161	5.335	9.494
Manggarai Timur	41.544	28.697	14.982
Sabu Raijua	4.403	4.464	9.487
Malaka	78.777	55.012	67.796
Kota Kupang	1.272	963	565
Nusa Tenggara Timur	884.326	745.753	750.166

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT dan BPS

Kondisi ini memicu pemerintah untuk menyiapkan program yang diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan petani dalam skema ekosistem pembiayaan pertanian yang dengan *tagline* **Tanam Jagung Panen Sapi** (TJPS) yang dikembangkan dengan konsep *pentha helix* atau multi-pihak, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media dengan menggerakkan pengelolaan sumberdaya lokal, penyediaan pembiayaan, jaminan pemasaran hasil, penerapan inovasi dan teknologi, serta pelatihan dan pendampingan asumsi semakin tinggi produksi akan semakin tinggi pendapatan.

Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan



perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian.

b. Hortikultura

Sub kategori tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok (i) komoditas buah-buahan; (ii) komoditas sayur-sayuran; dan (iii) komoditas biofarmaka.

Tabel 2.37
Produksi Buah–Buahan Tahunan (Kuintal)
Tahun 2020-2022²

Jenis Buah–Buahan Tahunan	Produksi Buah–Buahan Tahunan (Kuintal)		
	2020	2021	2022
Alpukat	111186	342837	222133
Anggur	179	74	175
Apel	76	358	-
Belimbing	5594	6630	7132
Duku/Langsar	42	155	73
Durian	14416	37131	43831
Jambu Air	10375	16850	25699
Jambu Biji	52723	151505	108178
Jeruk Besar	20854	18454	-
Jeruk Siam/Keprokar	548670	568119	16747
Jeruk/ Orange	569524	-	-
Mangga	396599	854833	464399
Manggis	9	166	765668
Markisa	4242	-	538
Nangka/Cempedakar	175346	255007	264122
Nenas	164040	111060	110996
Pepaya	668141	1020612	1069143
Pisang	2369251	2364974	2292752
Rambutan	37392	78555	60453
Salak	29372	24184	31500
Sawo/Sapodilla	6513	9131	14815



Jenis Buah–Buahan Tahunan	Produksi Buah–Buahan Tahunan (Kuintal)		
	2020	2021	2022
Sirsak	25978	42508	41616
Sukun	21012	30298	47555

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST

Produksi buah-buahan di NTT selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan meskipun terdapat beberapa jenis buah yang mengalami penurunan. Jenis buah yang banyak dihasilkan di NTT adalah pisang, alpukat, papaya, jeruk dan nenas.

Tabel 2.38
Produksi Tanaman Biofarmaka (kg),
2020-2022

Tanaman Biofarmaka	Produksi Tanaman Biofarmaka (kg)		
	2020	2021	2022
Dlingo	409	-	-
Jahe	759754	917307	1431311
Kapulaga	158	1173	342
Keji Beling/Kecibeling	348	-	-
Kencur	62645	80121	153164
Kunyit	498986	518766	1040503
Laos/Lengkuas	269996	208586	922832
Lempuyang	2645	8193	4
Lidah Buaya	12767	2962	-
Mahkota Dewa	62070	40436	72570
Mengkudu/Pace	19354	17411	8869
Sambiloto	5682	9759	4929
Temuireng	39522	6940	6813
Temukunci	30506	68638	4304
Temulawak	134810	62171	148163

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF, 2023

Tanaman biofarmaka dikategorikan sebagai tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jahe merupakan komoditi tanaman obat-obatan terbanyak dengan produksi sebesar 1.625.741 kg dan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,27 persen per tahun selama 5 (lima) tahun terakhir.



Tanaman sayuran dapat dikategorikan (i) tanaman sayuran semusim: tanaman sayuran yang berumur kurang dari satu tahun; dan (ii) tanaman sayuran tahunan: tanaman sayuran yang berumur lebih dari satu tahun. Terdapat beberapa komoditas sayur-sayuran mengalami kenaikan produksi maupun penurunan produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kebutuhan konsumsi yang berpengaruh pada harga jual dan harga beli, peningkatan dan penurunan luas panen, ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta pengaruh iklim yang berpengaruh pada kualitas sesuai preferensi konsumen dan kuantitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.



Tabel 2.39
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)
Tahun 2020-2022³

Wilayah	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)																				
	Bawang Merah			Cabai			Kentang			Kubis			Petsai			Tomat			Bawang Putih		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	34	818	1146	870	1276	2821	66	-	-	1888	119	343	75	3992	4921	55	1795	1162	-	-	-
Sumba Timur	1289	1385	489	5782	4652	4287	134	18	-	4154	174	261	301	5244	3906	2229	2600	1837	166	34	30
Kupang	24877	21196	16399	18660	21026	13738	5423	160	-	13250	6195	855	137	14849	3956	27235	26787	8419	818	550	-
Timor Tengah Selatan	17340	15030	13276	13630	10344	9161	15835	2270	-	25710	10150	12150	176	24900	29548	15300	9130	8900	3160	3740	3220
Timor Tengah Utara	360	154	21	187	848	546	412	37	-	2355	735	27	44	467	592	1153	971	1104	303	91	78
Belu	3704	2532	2390	16806	14161	14482	1451	-	-	4585	1482	1760	138	3863	4806	7829	6396	12270	3576	1162	668
Alor	300	1190	601	4155	2540	5647	2217	-	-	8033	2610	2701	68	9422	10235	6511	4281	5515	-	-	-
Lembata	315	715	142	141	67	48	-	6	-	124	-	-	22	107	86	4	58	8	-	5	-
Flores Timur	170	37	6	114	747	752	-	-	-	251	47	6	10	606	609	71	579	459	-	-	-
Sikka	2112	378	805	10531	4670	3485	405	609	-	7441	249	9	95	10347	3268	8657	6510	9312	4	-	-
Ende	550	369	632	2283	1822	1023	3120	880	-	3340	2245	1750	163	3487	2824	7590	3504	3246	220	40	532
Ngada	14	4	48	100	147	391	18	42	-	225	29	41	154	263	522	47	86	372	-	-	9
Manggarai	12670	7452	450	2304	1036	1215	1342	-	-	1734	947	566	119	804	2303	2167	2079	1014	81	20	-
Rote Ndao	27753	45952	22211	38816	22482	18032	595	-	-	14206	260	565	140	10311	8224	5425	11505	5348	1320	120	195
Manggarai Barat	893	845	3543	9645	9900	6368	2270	-	-	5440	3700	4650	67	15960	22216	3864	9840	15300	-	-	-
Sumba Tengah	324	168	421	562	298	1830	204	-	-	309	-	-	31	94	1354	21	84	1205	-	-	-
Sumba Barat Daya	14	1112	330	1098	9474	6237	2	-	-	421	770	220	205	8979	6851	674	9002	8452	2	-	-
Nagekeo	390	-	120	1716	3465	1439	200	-	-	3350	200	-	24	3190	2700	1423	2205	411	-	-	-
Manggarai Timur	8377	11139	10498	1764	4468	2633	5110	75	-	9779	3704	3360	103	7501	5981	4826	4233	5074	52	23	-

Al



Wilayah	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)																				
	Bawang Merah			Cabai			Kentang			Kubis			Petsai			Tomat			Bawang Putih		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sabu Raijua	1631	3498	911	277	220	156	100	-	-	1518	-	36	16	2209	1164	1016	817	298	-	2	-
Malaka	698	110	410	7559	8719	116564	280	-	-	7735	200	126	179	4941	3308	1404	1540	1368	35	-	-
Kota Kupang	418	14	74	395	92	25	377	-	-	2143	347	152	49	2090	1167	518	1440	272	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	104234	114098	74922	137394	122453	210878	39561	4097	-	117991	34163	29577	2314	133626	120539	98019	105440	91346	9737	5787	4732

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS, 2023

Al



2.1.4.11. Kehutanan

Pembangunan kehutanan mampu mendukung pembangunan ekonomi produktif melalui pengembangan secara proporsional kawasan hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Hutan Produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri.

Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pemerintah daerah setempat.

Tabel 2.40
Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) di Provinsi NTT
Tahun 2020-2022

Wilayah	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)											
	Terbatas			Tetap			Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus			Dapat dikonversi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	922.10	1214.13	-	4787.65	3042.73	1235.32	-	-	-	-	-	-
Sumba Timur	19084.76	19071.40	-	25418.21	137258.26	21542.48	-	-	-	61366.03	61366.04	61452.57
Kupang	43478.21	43285.37	-	60863.45	109518.39	46607.83	-	-	-	531.73	458.61	552.35
Timor Tengah Selatan	2923.41	2793.35	-	40566.57	37565.16	2802.72	-	-	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	53909.34	53900.16	-	12981.91	41628.48	55014.64	-	-	-	300.78	300.78	306.96
Belu	-	2988.80	-	961.80	40558.64	-	-	-	-	-	-	-
Alor	26699.70	26687.40	-	19341.02	59010.90	16593.38	-	-	-	-	-	-
Lembata	-	-	-	605.12	46595.89	-	-	-	-	-	-	-
Flores Timur	11123.86	11123.86	-	4410.55	36279.77	2070.66	-	-	-	521.03	521.03	523.31
Sikka	734.53	721.68	-	1037.12	40917.72	727.10	-	-	-	-	-	1084.94
Ende	177.75	328.88	-	29653.86	26883.83	342.38	-	-	-	932.88	1093.45	13684.85
Ngada	-	-	-	6330.41	29489.47	-	-	-	-	13438.30	13438.28	1623.01
Manggarai	-	-	-	-	26856.85	-	-	-	-	1136.25	1135.08	-
Rote Ndao	-	-	-	9352.55	8767.33	-	-	-	-	-	-	-
Manggarai Barat	-	-	-	18174.15	111968.43	14712.04	-	-	-	-	-	-
Sumba Tengah	15189.18	14897.11	-	5157.06	38727.60	-	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	8853.18	11024.87	9047.97	-	-	-	-	-	-
Nagekeo	9176.56	9176.74	-	9871.63	9621.92	-	-	-	-	-	-	1011.11
Manggarai Timur	-	-	-	15583.62	56449.47	-	-	-	-	971.67	971.78	-
Sabu Raijua	-	-	-	-	9966.23	3083.67	-	-	-	-	-	-
Malaka	2984.45	-	-	2547.40	-	-	-	-	-	-	-	1917.88
Kota Kupang	-	-	-	58.98	1438.60	173780.18	-	-	-	1604.80	1677.91	82156.98
Nusa Tenggara Timur	186403.84	186188.88	-	276556.23	883570.54	-	-	-	-	80803.47	80962.96	-

Sumber : BPS, 2023

2.1.4.12. Kelautan dan Perikanan



Wilayah NTT memiliki potensi untuk pengembangan sector perikanan, dimana luas daratan NTT $\pm 47.349,9 \text{ Km}^2$ atau 19,14% dari luas NTT dan memiliki lautan dengan luas $\pm 200.000 \text{ Km}^2$ atau 80,85%. Panjang garis pantai 5.700 Km, memiliki desa pantai berjumlah 808, jumlah penduduk di pesisir pantai sebanyak $\pm 1,3$ juta jiwa, dan angka konsumsi ikan masyarakat NTT sebesar 46,39 kg/kapita/thn (2021). Kondisi ini didukung lagi oleh pelaku usaha perikanan yang terdiri dari : petambak garam 1,591%; pembudidaya ikan 25,989%; pemasar perikanan 2,877%; dan nelayan 35,137%. Produksi perikanan tangkap di NTT dapat dilihat pada grafik berikut.

a. Perikanan Tangkap

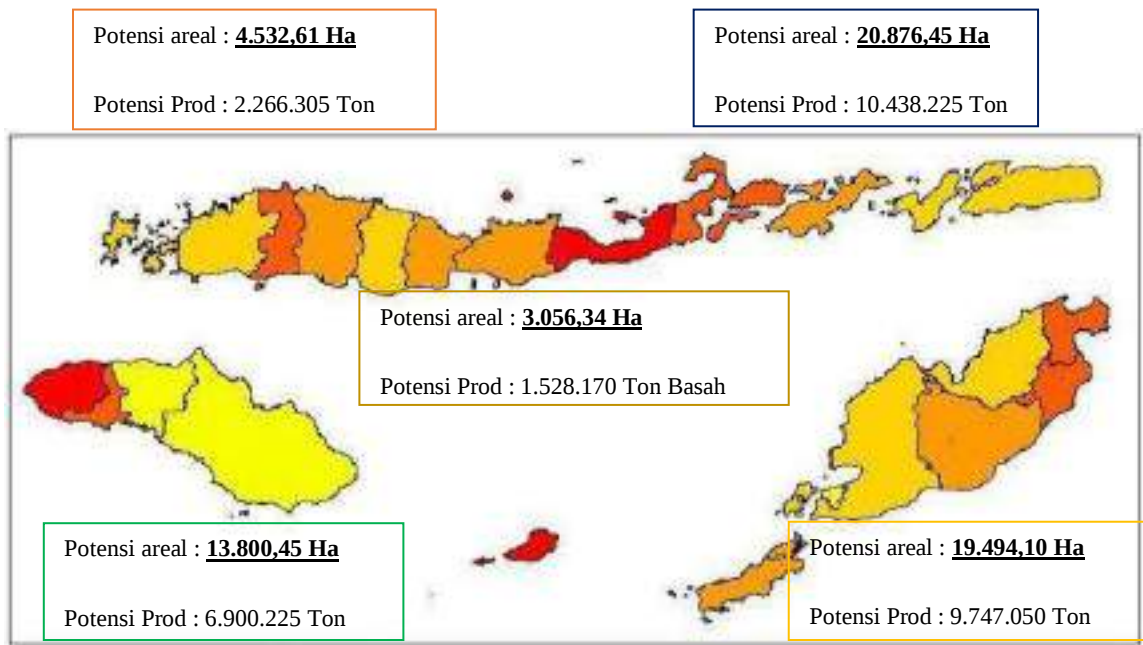
Potensi perikanan tangkap di NTT sebesar 393.360 (ton/tahun), dengan pemanfaatan sebesar 171.520 (ton/tahun) dengan deminikan dari potensi yang ada baru dmanfaatkan sebesar 43,85% dengan jenis tangkapan terbanyak adalah tongkol, laying, cakalang, kakap, kerapu, dan tuna. Trend produksi perikanan tangkap 2016-2020 memiliki trend kenaikan produksi, dengan rincian tahun 2016 produksi 123.770 ton dan mengalami peningkatan 11,71% pada tahun 2017. Persentase peningkatan terjadi berturut-turut sebesar 14,05% pada tahun 2018, pada tahun 2019 naik sebesar 1,46% dan pada tahun 2020 naik menjadi 7,83%. Dengan demikian pelayanan dinas kelautan dan perikanan dibidang perikanan tangkap dengan demikian kinerja perikanan takap selama kurun waktu 2016-2020 meningkat dengan nilai produksi rata-rata 8,76%.

b. Budidaya Laut

Luas lahan budidaya laut di NTT 53.727 Ha, dengan pemanfaatan (budidaya rumput laut dan Kerapu) seluas 12.150 Ha atau 22,6%, dengan produksi rumput laut sebanyak $\pm 1,5$ juta ton basah (**), jenis yang dibudidayakan adalah E. Cottoni dan Sakul. Wilayah pengembangan usaha budidaya laut (rumput laut) di NTT dapat dilihat pada gambar berikut.



Grafik.2.13.
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
Di NTT Tahun 2021



Sumber : Kelautan dan Perikanan Prov. NTT

Produksi rumput laut di NTT sebagian besar berasal dari lima kabupaten yakni: 1). Wilayah Flores Barat dengan potensi area 4.532,61 Ha, potensi produksi sebesar 2.266.305 ton basah, produksi tahun 2021 sebesar 455,67 ton (0,02%); 2). Kabupaten Flores Timur dan Alor dengan potensi area 20.876,45 Ha, potensi produksi 10.438.225 ton basah, produksi 2021 sebesar 73.830,08 ton (0,71%); 3). Kabupaten se daratan Sumba dengan potensi 13.800, 45 Ha, potensi produksi 6.900.225 ton basah, pemanfaatannya 600 Ha, produksi 2021 sebesar 35.961,08 ton (0,52%); 4). Kabupaten Sabu Raijua dengan potensi area 3.056,34 Ha, potensi produksi sebesar 1.528.170 ton basah, pemanfaatannya 110 Ha, produksi tahun 2021 70.958, 13 ton (4,64%); 5). Kabupaten se daratan Timor, Kabupaten Rote dengan potensi area 19.494,10 Ha, potensi produksi 9.747.050 ton basah, pemanfaatannya 1.539 Ha, produksi 2021 sebesar 1.219.002,96 ton (12,51%).

Produksi rumput laut di wilayah Timor berasal dari kecamatan Semaui, Semaui Selatan, Kupang Barat, dan Kecamatan Sulamo. Untuk wilayah Rote dari kecamatan Loaholo, Rote Barat, dan Kec. Rote Barat Daya. Produksi rumput laut wilayah Sabu berasal dari Kecamatan Sabu Timur, Haumehara, dan Kecamatan Raijua. Produksi rumput laut wilayah Sumba berasal dari Kecamatan Pahunga Lodu, Wula Waejelu, Rindi, dan Kecamatan Umalulu.



c. Budidaya Air Payau

Luas lahan budidaya air payau di NTT seluas 35.455 Ha, dengan pemanfaatan (budidaya Bandeng, Udang) seluas 1.510 Ha atau 4,3%, dengan produksi Udang dan Bandeng sebanyak ± 1.115 ton.

2.1.4.13. Peternakan

Kawasan pengembangan peternakan pada RTRWP berupa hamparan padang penggembalaan untuk Peternakan Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing seluas 832.228 Ha tersebar di Kabupaten/Kota. Kawasan pengembangan peternakan lainnya dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan usaha tanaman pangan dan perkebunan. Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang populasinya menonjol pada tahun 2020-2022 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Ternak di Provinsi NTT
Tahun 2020-2022 (Ribuan ekor)

Wilayah	Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota											
	Sapi Potong			Sapi Perah			Kerbau			Kuda		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	2400	1478	1567	-	-	-	14811	7191	7622	6903	2781	2948
Sumba Timur	56510	39764	42150	8	8	9	33659	30905	32759	41537	44105	46751
Kupang	284289	301915	320030	-	-	-	1957	2078	2203	4913	5115	5422
Timor Tengah Selatan	210053	215504	228434	11	12	13	336	342	363	887	887	940
Timor Tengah Utara	136659	145132	153840	-	-	-	811	861	913	1429	1518	1609
Belu	72806	64447	68314	11	11	12	658	305	323	734	319	338
Alor	7574	8044	8527	-	-	-	-	-	-	127	39	43
Lembata	5037	5050	5353	-	-	-	-	-	-	2406	1502	1592
Flores Timur	5552	5896	6250	-	-	-	-	-	-	1502	1595	1691
Sikka	18182	16347	17328	-	-	-	2087	1480	1569	2863	1945	2062
Ende	41875	44471	47139	-	-	-	3074	3265	3461	3684	3912	4147
Ngada	52968	50960	54018	-	-	-	16594	15836	16786	7976	12847	13618
Manggarai	27871	26815	28424	-	-	-	9184	8247	8742	1428	191	202
Rote Ndao	81550	67349	71390	-	-	-	19280	18752	19877	8821	7802	8270
Manggarai Barat	16944	17504	18554	-	-	-	17281	14663	15543	239	196	208
Sumba Tengah	9229	9329	9889	-	-	-	11577	12295	13272	7753	11734	12438
Sumba Barat Daya	4385	4657	4936	-	-	-	17753	18854	19985	7184	7629	8087
Nagekeo	29390	38381	40684	-	-	-	7812	6729	7133	4323	1727	1831
Manggarai Timur	17580	11709	12412	-	-	-	10175	7541	7993	3943	2049	2172
Sabu Raijua	7356	7812	8281	-	-	-	12208	12965	13743	9517	10107	10713
Malaka	81062	83513	88524	-	-	-	419	498	528	80	120	127
Kota Kupang	7045	7396	7840	-	-	-	32	33	35	89	88	93
Nusa Tenggara Timur	1176317	1173473	1243884	30	31	34	179708	162840	172850	118338	118208	125302

Sumber: BPS, 2023



Tabel 2.42
Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Ternak di Provinsi NTT
Tahun 2020-2022 (Ribuan ekor)

Wilayah	Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota								
	Babi			Kambing			Domba		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	76264	3347	3715	2526	5813	6452	66	7	8
Sumba Timur	64219	64219	71283	63442	63442	70421	8482	-	-
Kupang	428155	377577	419110	146823	155926	173078	191	212	235
Timor Tengah Selatan	208087	213377	236848	27817	28613	31760	-	-	-
Timor Tengah Utara	86336	95660	106183	49462	52529	58307	44	49	54
Belu	59666	28435	31563	16287	12773	14178	31	18	20
Alor	143351	106218	108305	51321	49413	52498	-	-	-
Lembata	70181	34811	38640	43121	43246	48003	1504	1511	1677
Flores Timur	125358	138897	154176	76501	81244	90181	1115	1235	1371
Sikka	88198	70343	78081	115511	88695	98451	337	-	-
Ende	85496	94730	105150	31366	33311	36975	19	21	23
Ngada	205239	199873	221859	31611	34908	38748	3123	3705	4113
Manggarai	56779	43427	48204	13643	12295	13647	-	-	-
Rote Ndao	67987	50561	56123	59985	53212	59065	30410	27282	30283
Manggarai Barat	53500	165607	183824	7283	10377	11518	-	-	-
Sumba Tengah	53783	41006	45517	12768	12768	14172	9	9	10
Sumba Barat Daya	116070	128606	142753	21811	23163	25711	-	-	-
Nagekeo	126906	21298	23641	51930	48069	53357	9822	8349	9267
Manggarai Timur	88920	69459	77099	35457	30420	33766	-	-	-
Sabu Raijua	48992	54283	60254	66151	70252	77980	28973	32102	35633
Malaka	62546	65759	72992	32011	38006	42187	-	-	-
Kota Kupang	36408	35766	39700	7523	7899	8768	60	63	70
Nusa Tenggara Timur	2352441	2103259	2325020	964350	956374	1059223	84186	74563	92427

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan Tabel 2.41 dan Tabel 2.42, diketahui bahwa perkembangan populasi per komoditinya cenderung menunjukkan angka positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi untuk ternak kecil dan Sapi untuk ternak besar. Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan tekad menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak.

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 28 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdiri dari 27 RPH pemerintah dan 1 RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH.

Tabel 2.43
Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2022

Wilayah	Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/Kota (Unit)		
	Pemerintah	Swasta	Jumlah



	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Sumba Timur	2	2	1	-	-	1	2	2	2
Kupang	3	3	1	1	1	1	4	4	2
Timor Tengah Selatan	2	2	4	-	-	-	2	2	4
Timor Tengah Utara	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Belu	2	2	1	-	-	-	2	2	1
Alor	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Lembata	1	1	2	-	-	-	1	1	2
Flores Timur	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Sikka	1	1	2	-	-	-	1	1	2
Ende	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Ngada	2	2	1	-	-	-	2	2	1
Manggarai	2	2	3	-	-	-	2	2	3
Rote Ndao	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Manggarai Barat	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Nagekeo	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Manggarai Timur	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sabu Raijua	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Malaka	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Kota Kupang	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Nusa Tenggara Timur	27	27	30	1	1	2	28	28	32

Sumber: BPS, 2023

2.1.4.14. Pariwisata

Pada Triwulan II-III tahun 2022, sektor Pariwisata di Provinsi NTT mulai menunjukkan pemulihan sehingga mampu tumbuh sebesar 30,47% diakhir Triwulan III. Pertumbuhan tinggi yang dicapai sektor pariwisata dipengaruhi oleh kebijakan maskapai penerbangan membuka kembali rute penerbangan ke Nusa Tenggara Timur walaupun dengan kebijakan *fuel surcharge*, yang mengakibatkan naiknya harga tiket pesawat. Hal ini dimaknai bahwa wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Timur lebih mementingkan pada destinasi wisatanya dibanding harga tiket pesawat. Dengan dibukanya kembali rute penerbangan ke Nusa Tenggara Timur, memberikan dampak bagi meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan semakin berkembangnya Lapangan Usaha Akomodasi Makan Minum yang tercermin dari kinerja penyaluran kredit akmamin yang pada Triwulan II 2022 meningkat dari Triwulan sebelumnya menjadi 27,90%, karena keterisian kamar dan kedatangan jumlah wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur serta optimisme masyarakat yang terus membaik. Selain itu juga, penurunan kasus covid 19 yang menyebabkan Pemerintah semakin melonggarkan aturan perjalanan domestik, memberikan andil besar dalam peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Oleh karena itu, sebagai sektor terbesar yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah perlu melakukan strategi-strategi dalam pengembangan pariwisata NTT, seperti : 1).peningkatan koordinasi, sinergitas dan kerjasama antar pihak Pemerintah Pusat, Daerah, sektor-sektor terkait, investor lokal/asing, BUMN, pelaku usaha dan UMKM dan masyarakat untuk mendukung upaya perbaikan pariwisata dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan di NTT. 2). Pemerintah Daerah bersama dengan asosiasi serta perusahaan teknologi meningkatkan promosi digital untuk mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan wisata super premium sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemitraan pelaku usaha melalui ekosistem digital, serta mempercepat transformasi digital UMKM sektor pariwisata. 3). Meningkatkan 5A terhadap pariwisata Labuan Bajo salah satunya melalui pengembangan dan maintenance terhadap destinasi wisata Labuan Bajo dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Seperti yang diketahui bahwa Labuan Bajo merupakan salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas (DWSP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Potensi wisata tersebut perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah melalui program dan kegiatan dalam rangka pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagai *prime mover economy*.

Tabel 2.44
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2022

Wilayah	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Jiwa)											
	Mancanegara				Domestik				Jumlah			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Sumba Barat	-	862	946	1.212	-	3.079	7.083	7.320	-	3.941	8.029	8.532
Sumba Timur	-	202	87	930	-	5.880	18.489	34.654	-	6.082	18.576	35.854
Kupang	-	316	-	424	-	3.759	4.619	42.041	-	4.075	4.619	42.465
Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	6.927	11.038	12.854	-	6.927	11.038	12.854
Timor Tengah Utara	-	37	-	-	-	1.250	10.980	36.693	-	1.287	10.980	36.693
Belu	-	811	34	9.253	-	20.429	22.324	5.600	-	21.240	22.358	14.853
Alor	-	12	18	198	-	1.431	2.382	933	-	1.443	2.400	1.131
Lembata	-	-	-	-	-	1.203	1.760	-	-	1.203	1.760	-
Flores Timur	-	147	21	-	-	2.685	20.156	-	-	2.832	20.177	-
Sikka	-	2.159	119	-	-	12.296	21.214	-	-	14.455	21.333	-
Ende	-	31	6	4.266	-	2.145	13.053	66.162	-	2.176	13.059	70.428
Ngada	-	62	29	2.684	-	3.841	12.384	96.738	-	3.903	12.413	99.422
Manggarai	-	116	4	-	-	2.128	10.435	-	-	2.244	10.439	-
Rote Ndao	-	490	-	306	-	983	1.890	634	-	1.473	1.890	940
Manggarai Barat	-	15.031	6.129	44.443	-	64.917	136.836	89.643	-	79.948	142.965	134.086
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Wilayah	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Jiwa)											
	Mancanegara				Domestik				Jumlah			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Sumba Barat Daya	-	4.116	172	-	-	2.366	4.217	-	-	6.482	4.389	-
Nagekeo	-	-	-	-	-	2.142	5.252	-	-	2.142	5.252	-
Manggarai Timur	-	-	-	-	-	1.001	2.488	-	-	1.001	2.488	-
Sabu Raijua	-	9	-	5	-	523	521	68.519	-	532	521	68.524
Malaka	-	-	-	29	-	771	622	627	-	771	622	656
Kota Kupang	-	20.377	1.180	1.869	-	202.532	235.898	106.309	-	222.909	237.078	108.178
Nusa Tenggara Timur	155.900	44.778	8.745	65.619	931.967	342.288	533.641	568.727	987.867	387.066	552.386	634.346

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, finansial daerah, inflasi daerah dan SDMnya.

2.1.5.1. Ekonomi Makro Regional

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh sebesar 3,45%, melambat dibandingkan dengan triwulan III 2022 sebesar 3,51% dan lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,02%. Deselerasi kinerja perekonomian NTT terutama disebabkan perlambatan konsumsi rumah tangga, kontraksi ekspor dan konsumsi Pemerintah. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2022 bersumber dari lapangan usaha utama yakni LU Pertanian, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Administrasi Pemerintahan. Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,05%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,52%. Dari sisi ekspor, peningkatan yang terjadi sejalan dengan perluasan pembukaan pintu kedatangan internasional melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Di samping itu, meningkatnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19 di Provinsi NTT menjadi faktor pendorong kinerja konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Sementara dari sisi LU, perbaikan kinerja ekonomi bersumber dari LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi. Pencabutan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, vaksinasi booster, percepatan pembangunan infrastruktur, serta curah hujan yang kondusif berdampak positif terhadap peningkatan kinerja LU secara keseluruhan.

2.1.5.2. Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada tahun 2022 mencapai Rp. 45,55 Triliun, atau tumbuh 2,36%. Dibandingkan dengan target anggaran, nominal realisasi belanja tersebut



mencapai 88,85%, atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 86,60%. Peningkatan belanja tersebut terutama terjadi pada belanja APBN dan belanja APBD kabupaten/kota. Kemudian, realisasi pendapatan pemerintah sampai pada tahun 2022 juga tercatat tumbuh sebesar 0,82%. Realisasi anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang perekonomian Provinsi NTT, sehingga dapat mendorong akselerasi pemulihan ekonomi.

2.1.5.3. Perkembangan Inflasi

Secara keseluruhan tahun 2022, inflasi gabungan Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok komoditas transportasi dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tingginya tekanan inflasi sepanjang tahun 2022 turut dipengaruhi oleh konflik geopolitik yang terjadi secara global sehingga menyebabkan disrupsi pada rantai pasok komoditas makanan dan energi. Lebih lanjut, inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2023 diperkirakan melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama disebabkan oleh normalisasi harga komoditas pasca kenaikan harga BBM. Meskipun demikian, kenaikan permintaan dan ekspektasi harga menjelang bulan Ramadhan dapat menjadi faktor pendorong inflasi.

Tekanan inflasi Provinsi NTT pada tahun 2023 diperkirakan melandai dibandingkan dengan inflasi tahun dan diperkirakan kembali pada sasaran inflasi $3\% \pm 1\%$. Normalisasi inflasi tarif angkutan udara dan BBM setelah high-base effect di tahun 2022, serta harga Crude Palm Oil (CPO) maupun komoditas global lainnya yang mulai melandai menjadi faktor penahan laju inflasi. Selain itu, perluasan Kerja sama Antara Daerah (KAD), pengembangan Food Estate pada 3 lokasi di Provinsi NTT (Sumba Tengah, Belu, dan TTS), kemudian penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat, melalui TPIP-TPID dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menurunkan tekanan inflasi pada komoditas volatile food. Di sisi lain, pemulihan aktivitas dan permintaan masyarakat seiring dengan pandemi yang semakin terkendali dapat menjadi faktor pendorong inflasi pada tahun 2023.

2.1.5.4. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Indikator sistem pembayaran nontunai dan tunai berkontraksi pada triwulan IV 2022. Pada sistem pembayaran nontunai, transaksi BI-RTGS dan SKNBI mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan III 2022. Di sisi sistem pembayaran tunai, inflow dan outflow mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan tahun 2022, kinerja



sistem pembayaran nontunai mengalami penurunan sementara sistem pembayaran tunai mengalami perbaikan. Perubahan sistem pembayaran nontunai tercermin dari nominal transaksi RTGS dan SKNBI yang berkontraksi. Dari sisi sistem pembayaran tunai, inflow dan outflow mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2021.

2.1.5.5. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Pada Agustus 2022, jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT meningkat sebesar 3,42% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 3,02 juta orang, sedangkan pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun hingga 3,54%. Kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 yang menurun dibandingkan periode Agustus 2021. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2022 juga tercatat sebesar 20,23%, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, nilai tukar petani (NTP) pada triwulan IV 2022 tercatat masih rendah sebesar 95,81.

2.1.5.6. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,40% – 4,80%, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Dari sisi pengeluaran, akselerasi perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pasca pencabutan kebijakan pembatasan, serta ditopang oleh berlanjutnya program vaksinasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan semakin terkendalinya laju penambahan kasus COVID-19. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat efek cuaca ekstrem yang melanda sejumlah kabupaten di Provinsi NTT yang berimbas pada terganggunya lalu lintas logistik. Selain itu, ancaman wabah virus African Swine Fever (ASF) yang menjangkiti ternak babi, juga dapat menjadi faktor penahan pertumbuhan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada keseluruhan tahun 2023 diperkirakan terus meningkat terutama bersumber dari meningkatnya optimisme masyarakat, akselerasi investasi dan akmamin di tengah penyelenggaraan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, dan persiapan menyongsong tahun politik.



2.2. **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD**

2.2.1. **Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2022**

Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi , yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mempedomani arah kebijakan RPJMD 2018-2023, Tema Pembangunan 2022 adalah **“Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah”**.

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2022 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programs*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target program-program prioritas yang diamanatkan dalam RPJMD-P Provinsi NTT.

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam enam Prioritas Daerah (PD). Prioritas Daerah kemudian disinergikan dalam 45 Proyek Prioritas Strategis (Major Project/MP). Enam prioritas daerah untuk tahun 2022, yaitu :

1. Memperkuat infrastruktur Sumber Daya Alam untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting.
2. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Pelayanan Publik.
3. Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan.



- 4. Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah.
- 5. Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
- 6. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon.

Enam prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2022 dapat dicapai.

Pencapaian indikator makro daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.20
Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,25	-0,84	2,52	3,45
2	Angka kemiskinan	%	21,03	20,62	21,21	20,44	20,23
3	Inflasi	%	3,07	0,67	0,78	1,67	6,65
4	IPM	poin	64,39	65,23	65,19	65,28	65,90
5	Usia Harapan Hidup	tahun	66,38	66,85	67,01	67,15	67,47
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,30	7,55	7,63	7,69	7,70
7	TPT	%	3,01	3,35	4,28	3,77	3,54
8	Indeks Gini	poin	0,351	0,356	0,356	0,339	0,340

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2022

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mengalami kontraksi ke level -0,84 %, sangat menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,11 % dan di tahun 2019 5,24 %. Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2020 yang mengalami kontraksi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami kontraksi hingga -2,07 %. Tingginya tingkat kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid 19. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan ke level 2,52% dan terus meningkat di tahun 2022 yaitu menjadi 3,45%.

Angka kemiskinan menurun dari 21,03 persen keadaan September 2018 menjadi 20,62 persen keadaan September 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 21,21 persen pada September tahun 2020 dan tahun 2021 masih mengalami kenaikan menjadi 20,44%, sedangkan pada tahun 2022



kondisi bulan september mengalami penurunan sebesar 0,21% atau menjadi 20,23%.

Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, dari 64,39 poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,19 persen, tahun 2021 capaian IPM mengalami peningkatan sebesar 65,23 poin dan pada tahun 2022 IPM terus mengalami peningkatan menjadi 65,90 poin. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 66,38 tahun pada 2018 menjadi 66,85 pada tahun 2019 dan 67,01 pada tahun 2020, pada 2021 65,15 dan pada tahun 2022 menjadi 65,47 Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 7,63 pada tahun 2021 dan tahun 2022 meningkat yaitu 7,69 dan 7,70.

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang menunjukkan kinerja kurang menggembirakan, dimana mengalami peningkatan dari 3,01% pada tahun 2018 menjadi 3,35% pada tahun 2019 dan 4,28 % pada tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,77% dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 3,54% .

Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar 0,351 menjadi 0,356 pada tahun 2019 dan 2020, pada tahun 2021 menurun menjadi 0,339 dan sedikit mengalami peningkatan ada tahun 2022 menjadi 0,340 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan desa relatif tidak berbeda signifikan.

2.2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan kondisi bulan Desember 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kondisi ekonomi belum pulih khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya *redesign* dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2022. Hal ini yang akan diakomodir dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. RKPD Perubahan Tahun 2022 yang telah disusun ini disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD Induk Tahun 2022 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2022, serta melakukan penyesuaian dengan adanya *redesign* akibat permasalahan yang terjadi sekaligus menyinergikan dengan kebijakan nasional. Perubahan Tersebut terjadi karena Kondisi Fiskal Daerah yang terbatas ,Penyesuaian Juknis DAK, Arahan penganggaran dari Pemerintah Pusat dan PMK 134 tentang Inflasi.

Pencapaian pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2022 diketahui dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin.

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022, maka Bappelitbangda Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi *E-monev performance* dengan Link URL : <http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id/e-kinerja>.

Penyampaian laporan baik secara online maupun offline telah melalui pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada lampiran surat yang dikirimkan oleh Bappelitbangda kepada seluruh PD.

Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan/Sub kegiatan dari seluruh PD lingkup pemerintah Provinsi NTT dilakukan terhadap 39 PD yang menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) PD melalui Aplikasi *E-monev performance*.

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, terdapat berbagai Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 5 Misi Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Keseluruhan Program Pembangunan Daerah, dijabarkan dalam RKPD 2022 secara lebih konkret menurut 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023

Pencapaian Program Pembangunan diatas, diukur dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan pada RKPD Provinsi Tahun 2022 menurut 5 Misi Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh 39 PD, yaitu :

- MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil terdiri dari 61 Program, 107 kegiatan dan dilaksanakan oleh 15 Perangkat Daerah;



- MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*) terdiri dari 4 Program 7 kegiatan oleh 1 Perangkat Daerah
- MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan terdiri dari 9 Program, 26 kegiatan oleh 3 Perangkat Daerah
- MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdiri dari 11 Program 22 kegiatan oleh 6 Perangkat Daerah
- MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdiri dari 24 Program 51 kegiatan oleh 14 Perangkat Daerah

Terdapat 15 PD yang melaksanakan program/kegiatan untuk pelaksanaan lebih dari satu Misi yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Berikut ini disampaikan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran perprogram yang dilaksanakan oleh 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2022 Keadaan Triwulan IV:

Tabel 2.19
Capaian Realisasi Anggaran
menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil				
1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.293.652.300	1.271.910.300	98,32
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.964.540.240	3.855.360.568	97,25
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	17.358.941.660	15.520.668.110	89,41
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	242.572.500	220.667.085	90,97



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	PERTANIAN			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.116.651.000	1.651.967.213	78,05
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15.145.203.625	8.545.260.174	56,42
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.917.649.800	2.168.188.471	74,31
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	979.566.210	885.175.184	90,36
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.584.267.800	2.375.647.116	91,93
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	22.544.326.600	21.419.060.866	95,01
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.446.803.900	4.114.811.400	92,53
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	432.021.050	388.656.831	89,96
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	596.282.600	594.666.200	99,73
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	20.840.400	20.324.000	97,52
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.333.545.540	134.072.290	10,05
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	32.169.800	26.736.800	88,20
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	343.056.100	298.627.740	87,05
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN	3.406.301.000	3.054.479.700	89,67



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.789.845.600	3.702.326.071	97,69
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	57.328.100	45.680.930	79,68
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	43.654.800	37.606.738	86,15
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	796.298.600	691.102.217	86,79
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	206.946.300	174.006.806	84,08
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	48.429.100	33.274.200	68,71
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	273.207.100	253.517.280	92,79
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	478.968.000	346.090.42	72,26
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	721.864.250	592.311.200	82,05
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	6.394.800	6.394.800	100
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	138.670.00	120.969.100	87,24
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	121.702.240	106.162.840	87,23
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	9.200.000	9.200.000	100
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	5.044.967.360	4.679.909.448	92,76
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	3.240.130.200	2.614.569.13	80,69



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	(UMKM)			
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	42.197.500	41.144.000	97,50
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	230.157.800	225.817.300	98,11
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	352.554.870	236.589.100	67,11
	PROGRAM PENATAAN DESA	62.158.100	58.176.40	93,59
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.666.273.680	1.379.095.622	82,77
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	27.116.401.543	26.755.956.580	98,67
1. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.560.179.650	1.979.806.650	77,33
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	324.539.100	218.664.325	67,38
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.379.984.876	9.600.899.383	92,49
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	31.053.535.400	23.590.408.388	75,97
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	465.318.800	148.742.944	31,97
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	107.868.100	107.866.300	100
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	269.981.850	189.966.270	70,36
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	191.906.100	118.371.159	61,68



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100.202.500	89.727.279	89,55
	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	137.793.800	137.793.800	100
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.372.415.900	1.255.662.800	91,49
	ROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	11.298.000	6.510.00	57,62
2. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, bagi penduduk miskin	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	55.375.526.523	44.702.556.413	80,73
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	312.114.000	46.324.124	14,84
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.379.116.200	1.472.674.940	61,90
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.056.582.762	797.336.020	38,77
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	18.006.000	15.560.299	86,42
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	45.833.600	39.351.099	85,86
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	47.482.000	39.522.156	83,24
	PROGRAM	18.188.700	13.261.898	82,88



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	19.858.508.960	12.054.578.650	60,70
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	204.498.500	100.443.799	49,12
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	89.589.640	31.225.499	34,85
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	0	0	0
2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.008.153.46	1.718.460.234	85,57
MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)				
1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata dengan pola pendekatan kawasan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	870.491.100	845.216.900	97,10
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.104.827.600	1.018.371.930	92,17
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	334.129.000	327.170.400	97,92
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	270.816.000	157.777.460	58,26
MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan				
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	70.005.925.108	64.672.860.326	92,38



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
infrastruktur				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	899.965.086.150	838.143.053.083	93,13
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	61.150.950	53.559.000	87,58
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.719.534.323	4.441.821.292	94,12
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	31.495.872.800	29.355.003.562	93,20
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	1.345.859.100	1.112.373.380	82,65
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.345.859.100	1.112.373.380	42,46
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	4.425.708.200	4.114.221.773	92,96
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.760.676.200	1.644.010.165	93,37
MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	887.266.134.207	0	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.480.000.000	1.302.292.377	87,99
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	29.559.705.600	28.648.672.611	96,92
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.000.000.000	1.000.000.000	100
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.420.988.700	1.113.760.612	78,38
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	53.503.000	8.346.200	15,60
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	625.469.850	448.114.870	71,64
	PROGRAM	63.488.100	47.436.800	74,72



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	156.725.134.167	136.730.289.046	87,24
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	28.067.979.503	20.273.577.076	72,23
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	511.424.423	467.352.840	91,38
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.241.488.172	30.096.529.43	56,53
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	25.277.771.200	8.944.217.516	35,38
3. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	156.725.134.167	136.730.289.046	87,24
MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik				
1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.721.639.751	3.652.831.000	98,15
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.040.652.600	1.039.819.750	99,92
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	2.103.846.531	1.620.945.359	77,05



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	PEMBANGUNAN DAERAH			
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.701.288.172	2.983.938.844	80,62
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	870.414.227	558.011.104	64,11
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	803.597.495.520	589.097.539.940	73,31
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.264.749.031	1.994.354.255	61,09
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	18.531.484.846	17.118.646.569	92,38
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.859.174.098	2.724.091.950	95,28
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	81.298.393.360	70.893.165.691	87,20
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.589.605.381	4.765.104.507	72,31
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	727.284.700	626.247.242	86,11
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.249.241.500	1.075.894.531	86,12
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.814.488.700	1.503.437.456	82,86
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	34.169.028.183	29.183.266.754	85,41
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.501.988.200	1.445.456.70	96,24
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.591.470.329	1.429.153.493	89,80
	ROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	257.213.700	231.769.628	90,11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	184.796.000	107.768.000	58,32



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
	ROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	8.351.660.000	6.745.597.694	80,75
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.273.860.050	1.913.586.280	84,16
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.018.570.000	2.791.490.550	92,48
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	140.234.700	35.483.400	25,30
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	351.291.700	273.438.000	77,84
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.733.365.400	3.845.701.305	67,08



Tabel 2.20
Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022

Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022		Realisasi2022			
			K	Rp	K		Rp	
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil								
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah								
1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan								
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi	2,79	%	1.293.652.300	2,10	%	1.271.910.300
		(Tambahan) Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	2,79	%		2,10	Poin	
		(Tambahan) Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan	9,30	%		6,96	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		Stunting						
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi							
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi	76,09	%	3.964.540.240	76,08	%	3.855.360.568
		Prosentase Penggunaan Alsintan	100	%		100	%	
		(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Jagung	1.401.120	Ton		1.401.120	Ton	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, 2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman							
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan	76,09	%	17.358.941.660	57,06	%	15.520.668.110
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka	5.013	Ton		3.759	Ton	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		peningkatan : PRODUKSI BAWANG MERAH						
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI CABE	8.486	Ton		6.364	Ton	
		(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Cengkeh	4.485	Ton		3.363	Ton	
		tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan :Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah	130	Ton		97,50	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Jagung	1.401.120	Ton		1.050.840	Ton	
		(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana	70.7	Ton		53.07	Ton	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI JAMBU METE	64			3		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi kacang hijau	7.982	Ton		5.986,50	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi kacang tanah	11.529	Ton		8.646,75	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI KAKAO	24.579	Ton		18.434,25	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Kopi	28.561	Ton		21.420,75	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka	4.485	Ton		3.363,75	Ton	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Cengkeh						
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas	1.300	Ton		975	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga	1.300	Ton		975	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah	130	Ton		97,50	Ton	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Jambu Mete	70.7 64	Ton		53.07 3	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kakao	24.5 79	Ton		18.43 4,25	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kelapa	82.8 12	Ton		62.10 9	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kopi	28.5 61	Ton		21.42 0	Ton	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Pinang	6.968	Ton		5.226	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi tepung = 10% x daun kering	13	Ton		9,75	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Padi	1.310.400	Ton		982.800	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Bawang Merah	5.013	Ton		3.759,75	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi	8.486	Ton		6.364,50	Ton	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Cabe						
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi kacang hijau	7.982	Ton		5.986,50	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Padi	1.310.400	Ton		982.800	Ton	
		(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI PINANG	6.968	Ton		5.226	Ton	
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan :Produksi tepung = 10% x daun kering	13	Ton		9,75	Ton	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : BAWANG MERAH	197,75	Ton		148,32	Ton	
		(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : KENTANG	115,44	Ton		86,58	Ton	
		(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate ; MANGGA	861,64	Ton		682,23	Ton	
		(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : SEMANGKA	107,70	Ton		80,79	Ton	
		(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : WORTEL	1.150,25	Ton		862,68	Ton	
		(TAMBAHAN) Produksi perkebunan di pariwisata estate : KELAPA	416,80	Ton		315,10	Ton	
		(TAMBAHAN) Produksi perkebunan di pariwisata estate : KOPI	471,73	Ton		326,79	Ton	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penataan Prasarana Pertanian peternakan							



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75	%	242.572.500	75	%	220.667.085
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi							
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani Menurut Kelas	50	%	2.116.651.000	37,5	%	1.651.967.213
		(tambahan) Peningkatan Kompetensi Penyuluh	100	%		150	%	
		(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Kelas Lanjut Baru)	100	%		150	%	
		(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Kelas Madya Baru)	10	Kelompok		7,5	Kelompok	
		(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	400	Kelompok		300	Kelompok	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		(Kelas Pemula Baru)						
		(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Kelas Utama Baru)	1	Kelompok		0,75	Kelompok	
		(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama	100	Orang		75	Orang	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian							
DINAS PETERNAKAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				15.145.203.625			8.545.260.174
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi							
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100	%	2.917.649.800	0	%	2.168.188.471
		Persentase penggunaan benih	100	%		0	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		bersertifikat						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penataan Prasarana Pertanian							
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar	100	Ton	979.566.210	4,10	Ton	885.175.184
		(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Ternak yang sehat	80	%		11,08	%	
		(tambahan) Prasarana Ternak yang memenuhi standar: Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	20	Ton		4,10	Ton	
		Ternak yang sehat	80	%		11,08	%	
		Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	20	Unit		4,10	Unit	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, 2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, 3. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan							
DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	(Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah	633.750	Ha	2.584.267.800	701.548,79	Ha	2.375.647.116
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, 2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, 3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	(Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap	185.000	ton/tahun	22.544.326.600	191.000,16	ton/tahun	21.419.060.866
		(Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	185.000	ton/tahun		191.000,16	ton/tahun	
		Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	6	%		3,90	%	
		Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	6	%		3,90	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		di Pariwisata Estate						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil, 2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, 3. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, 4. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi							
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	(Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya	2.14 5.00 0	ton/t ahun	4.446.803.900	2.169 .000, 43	ton/t ahun	4.114.811.400
		(Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	2.14 5.00 0	ton/t ahun		2.169 .000, 43	ton/t ahun	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, 4. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi							
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tambahan) Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	20	%	432.021.050	32,8 3	%	388.656.831



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil							
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	(Tambahan) Angka Konsumsi Ikan	50	Kg/K apita/ tahun	596.282.600	48,50	Kg/K apita/ tahun	594.666.200
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar							
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah								
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan penerapan sistem perijinan usaha dan investasi berbasis online	75	%	20.840.400	51,72	%	20.324.000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)							
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga setiap tahun	10	%	1.333.545.540	5	%	134.072.290
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi, 2. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, 3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah							



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya							
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Export	28,57	%	32.169.800	16,67	%	46.736.800
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi							
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan Barang tidak sesuai Standar yang ditetapkan	55,70	%	343.056.100	64,73	%	298.627.740
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, 3. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata estate	70	%	3.406.301.000	60	%	3.054.479.700
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri, 2. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi	2,24	%	3.789.845.600	1,21	%	3.702.326.071



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		industri						
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi							
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase penurunan pelanggaran ijin usaha industri	70	%	57.328.100	16,22	%	45.680.930
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi							
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINAS	11,41	%	43.654.800	53,85	%	37.606.738
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							
Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Implementasi Kebijakan Bidang Perekonomian	5	Reko mend asi	796.298.600	0	Reko mend asi	691.102.217
		Cakupan Implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA an BUMD/BLUD	10	Reko mend asi		0	Reko mend asi	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA dan BUMD/BLUD	1	Reko mend asi		0	Reko mend asi	
		Cakupan Implementasi Kebijakan Pengelolaan SDA	3	Reko mend asi		0	Reko mend asi	
		Cakupan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6	Reko mend asi		0	Reko mend asi	
		Presentase BUMD/BLUD Yang Memiliki Kinerja Baik	75	%		0	%	
		(Tambahan) Cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, SDA dan BUMD/BLUD	10	Reko mend asi		0	Reko mend asi	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, 2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam, 3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD							
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektifitas Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Memenuhi Standar	1	Lapor an	206.946.300	0	Lapor an	174.006.806



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		Akuntabilitas						
		Efektifitas Peningkatan Kinerja Administrasi Pembangunan Daerah	66,67	%		0	%	
		Efektivitas Peningkatan Kinerja Administrasi Pembangunan Wilayah	66,67	%		0	%	
		(tambahan) Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100	%		0	%	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, 2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk								
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMA)	114	PMA	48.429.100	131	PMA	33.274.200
		Jumlah investor (PMDN)	209	PMDN		406	PMDN	
		(Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan	90,0	%			%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		yang dikembangkan	0			75,0		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi							
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMA)	114	PMA	273.207.100	0	PMA	253.517.280
		Tambahan) Persentase calon investor yang menyatakan minat meningkat	87	%		55	%	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	%	478.968.000	93	%	346.090.42
		(Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100	%		132,5 2	%	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah inovasi pelayanan public	6	Inovasi	721.864.250	6	Inovasi	592.311.200



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		(Tambah) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	100	%		100	%	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	(Tambah) Persentase pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam bidang penanaman modal dan PTSP	100	%	6.394.800	100	%	6.394.800
		Tersedianya aplikasi Geodatabase perizinan investasi	1	Aplikasi		0	Aplikasi	
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	(tambahan) Persentasi Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	80	%	138.670.00	91	%	120.969.100
		(tambahan) Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	50	%		165,30	%	
		(tambahan) Persentasi meningkatnya PMI procedural	75	%		100	%	
		(tambahan) Persentasi Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	55	%		26,93	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	(tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	70	%	121.702.240	4,87	%	106.162.840
		(tambahan) Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	80	%		91,50	%	
		(tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	55	%		26,93	%	
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				9.200.000			9.200.000
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	(Tambahan) Persentasi Koperasi Aktif	96	%	5.044.967.360	77,80	%	4.679.909.448
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	(Tambahan) Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate	6	%	3.240.130.200	43,80	%	2.614.569.13
		(Tambahan) Persentasi UMKM yang memperoleh ijin usaha	50	%		2,41		
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80	%	42.197.500	88,24	%	41.144.000



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	(Tambah) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80	%	230.157.800	94	%	225.817.300
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	(Tambah) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80	%	352.554.870	86	%	236.589.100
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	(Tambah) Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (Jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi)	100	%	62.158.100	100	%	58.176.40
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	(Tambah) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	66,70	%	1.666.273.680	378,87	%	1.379.095.622
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah BUMDES aktif	242	Unit	27.116.401.543	1.480,	Unit	26.755.956.580
		(Tambah) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat	96,70	%		150,66	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		(BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023						
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial								
1. Meningkatkan peran semua penduduk dalam pembangunan daerah								
Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya penyelenggaraan Ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sesuai ketentuan	100	%	2.560.179.650	100	%	1.979.806.650
		(tambahan) Meningkatkan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Target Total PSKS 110 Unit)	90	%		90	%	
		Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan	100	%		100	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		PMKS						
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	tambahan) Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	90	%	324.539.100	100	%	218.664.325
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	100	%	10.379.984.876	100	%	9.600.899.383
		(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang social	90	%		90	%	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	(tambahan) Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)	90	%	31.053.535.400	90	%	23.590.408.388
		Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin	100	%		100	%	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	tambahan) Meningkatnya penanganan korban bencana skala provinsi (Jumlah korban	90	%	465.318.800	90	%	148.742.944



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K	Rp		K	Rp	
		bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial)						
		Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100	%		100	%	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	(tambahan) Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi	100	%	107.868.100	100	%	107.866.300
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	50,70	%	269.981.850	50,70	%	189.966.270
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	(Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585	80	%	356.266.400	98,34	%	187.874.500



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		Penanganan Kasus)						
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	(Tambahan) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 750 KK	64	%	129.960.000	45,86	%	45.613.900
		(tambahan) Meningkatnya lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga melalui champion gender (Target total = 16 Unit)	75	%		24,00	%	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	(Tambahan) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan data anak terpilah gender (Tahapan yang dicapai dalam pengelolaan data gender dan anak)	40	%	26.594.000	59,20	%	26.294.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)	75,60	%	191.906.100	75,60	%	118.371.159



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	(Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)	60	%	100.202.500	81,30	%	89.727.279
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL)	67	%	137.793.800	0	%	137.793.800
		(Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan (Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan)	67	%		0	%	
		(Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun)	67	%		0	%	
	Program Pengelolaan Perbatasan sebagaimana diatas dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, 2. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan, 3. Monitoring dan Evaluasi							



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	100	%	1.372.415.900	104,90	%	1.255.662.800
		(Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100	%		90,20	%	
	ROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	(Tambahan) Meningkatnya Penyelenggaraan pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	100	%	11.298.000	35,13	%	6.510.00
2. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin								
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	(Tambahan) Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani	76,74	%	55.375.526.523	0	%	44.702.556.413
		(Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi	66,90	%		0	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		masyarakat						
		(tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR)	80	%		0	%	
		(Tambahan) Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai)	95,4 5	%			%	
		(tambahan) Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat	66,9 0	%			%	
		(Tambahan) Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani	2	%		1	%	
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan								



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	tambahan) Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	78,60	%	312.114.000	4,54	Poin	46.324.124
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	(tambahan) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,42	Poin	2.379.116.200	0	Poin	1.472.674.940
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	(tambahan) Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	27,33	%	2.056.582.762	0	%	797.336.020
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	(tambahan) Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	7,09	%	18.006.000	6,77	%	15.560.299
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	(tambahan) Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	16,67	%	45.833.600	37,60	%	39.351.099



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	(tambahan) Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	41,67	%	47.482.000	22,63	%	39.522.156
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	(tambahan) Persentase pengurangan dan penanganan sampah	26	%	18.188.700	25,24	%	33.262.898
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1,22	%	19.858.508.960	9,70	Unit	12.054.578.650
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	(Tambahan) Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	75	%	204.498.500	0,94	%	100.443.799
		(Tambahan) Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	4,20	%		12,89	%	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	(Tambahan) Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	10,32	%	89.589.640	0	%	31.225.499
		(Tambahan) Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	32,75	%		0	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	(Tambahan) Persentase meningkatnya kualitas DAS	0,25	%	0	0	%	0
2. Meningkatkan ketangguhan bencana daerah								
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	(Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata	87,5	%	2.008.153.46	87,5	%	1.718.460.234
		(Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata	70	%		70	%	
		(Tambahan) Jumlah rencana Kontinjensi	80	%		80	%	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA sebagaimana diatas dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							
MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty)								
1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama								



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K	Rp		K	Rp	
ekonomi daerah (prime mover)								
1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan								
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	(Tambahan) Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola	79,17	%	870.491.100	6	%	845.216.900
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	(Tambahan) Pertumbuhan kunjungan wisatawan	42,27	%	1.104.827.600	20	%	1.018.371.930
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi							
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	(Tambahan) Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0,63	Poin	334.129.000	0,04	Poin	327.170.400
%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	(TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata	100	%	270.816.000	25	%	157.777.460



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	DAN EKONOMI KREATIF	pada PE (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)						
		(Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	86	%		6	%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan, 2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif							
MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan								
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat								
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur								
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	(Tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak di destinasi wisata	80	%	70.005.925.108	0	%	64.672.860.326
		Tambahan) Terselenggaranya pembangunan infrastruktur	0	Kawa san		0	Kawa san	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		permukiman di kawasan strategis daerah provinsi						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	(tambahan) Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata	100	%	899.965.086.150	0	%	838.143.053.083
		(Tambahan) Terselenggaranya Jalan Provinsi yang Fungsional dan mantap, sehingga meningkatkan aksesibilitas serta pengurangan waktu tempuh pada mobilitas barang dan jasa di jalan kewenangan Provinsi	100	%		0	%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	(Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waktu, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	84	%	61.150.950	0	%	53.559.000
Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat	45,60	%	4.719.534.323	14,41	%	4.441.821.292



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi	30	%		28,57	%	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dweling Time Pelabuhan	4	Hari	31.495.872.800	4	Hari	29.355.003.562
		Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	60	%		144,91	%	
		Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	30	%		0	%	
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Potensi sumber daya mineral yang terkelola	16	Jenis	1.345.859.100	0	Jenis	1.112.373.380
		(Tambahan) Pengelolaan Air Tanah	54	Rekomendasi		0	Rekomendasi	
		(Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	15,79	%		0	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K	Rp		K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, 2. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi							
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Potensi sumber daya mineral yang terkelola	16	Jenis	1.345.859.100	0	Jenis	1.112.373.380
		(Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola	6	Jenis		0	Jenis	
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	25	%	4.425.708.200	0	%	4.114.221.773
		(Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT	42,1 7	Mw		0	Mw	
		(Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	42,1 7	Mw		0	Mw	
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Listrik Pedesaan	1.03 5	Unit	1.760.676.200	0	Unit	1.644.010.165
MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia								



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk								
1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan								
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)	100	%	887.266.134.207	0	%	0
		(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB	100	%		0	%	
		(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)	75	%		0	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif	72	Organisasi	1.480.000.000	72	Organisasi	1.302.292.377
		Jumlah Wirausaha Muda dengan data terpilah gender	1.375	Wirau saha		1.375	Wirau saha	
		(Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA)	90	%		90	%	
		(Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI)	88,9	%		88,9	%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi							
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional	12	Cabor	29.559.705.600	9	Cabor	28.648.672.611
		jumlah olahraga rekreasi Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk	5	Unit		0	Unit	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		mendukung pariwisata estate						
		Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate	7	Unit		0	Unit	
		Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional	9	Cabor		0	Cabor	
		(Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabor Olahraga prestasi dan Paralympicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional)	75	% Medal i		72	% Medal i	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif	72	Organ isasi	1.000.000.000	72	Organ isasi	1.000.000.000
		(Tambahan) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	65,20	%		65,20	%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : Pembinaan dan							



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	Pengembangan Organisasi Kepramukaan							
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender	98	%	1.420.988.700	50	%	1.113.760.612
		(Tambahan) Meningkatya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)	75	%		50	%	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi, 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi							
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlaksananya Identifikasi Naskah Kuno	0	Kabu paten	53.503.000	0	Kabu paten	8.346.200
		Terlaksananya Identifikasi, Pengumpulan dan Pengolahan Karya Cetak Karya Rekam (Naskah Kuno)	9	Kabu paten		2	Kabu paten	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip	100	%	625.469.850	50	%	448.114.870
		(Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100	%		50	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan	100	%	63.488.100	50	%	47.436.800
		(tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100	%		50	%	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun, 2. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota, 3. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi							
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan								
Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita	0	-	156.725.134.167	81	-	136.730.289.046
		(Tambahan) Angka Kematian Bayi	0	-		838	-	
		(Tambahan) Angka Kematian Ibu	0	-		130	-	
		(Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate)	77,3	%		41,89	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		TBC>85%						
		(Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	95,50	%		157,40	%	
		(Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)	84,90	%		150,01	%	
		(Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)	100	%		100	%	
		(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	100	%		100	%	
		(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan	71,40	%		0,02	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022		Realisasi2022			
			K		Rp	K		Rp
		dan Kepulauan) (Total 7 Unit)						
		(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	71,40	%		0,02	%	
		(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)	66,70	%		100	%	
		(Tambahan) Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)	84,90	%		87,90	%	
		(Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria	90,9	%		45,41	%	
		(Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati	52	%		99,01	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		(Tambahan) Prevalensi Stunting	16	%		17,7	%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				28.067.979.503			20.273.577.076
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	(Tambahan) Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	90	%		90	%	
		(Tambahan) Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	97	%		95,34	%	
		(Tambahan) Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 39 PD)	76,90	%		51		
		(Tambahan) Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	80	%		87,06		
RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(Tambahan) Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	50	%	53.241.488.172	50	%	30.096.529.43



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		(Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	100	%		100	%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnta kapasitas SDM RS	100	%	25.277.771.200	100	%	8.944.217.516
		Tercapainya SPM RS	100	%		100	%	
3. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita								
Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(Tambahan) Gizi Buruk	7,5	%	156.725.134.167	4,2	%	136.730.289.046
		(Tambahan) Gizi Kurang	19,30	%		20,4	%	
MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik								
1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi,								



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
bebas dan bersih KKN								
1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif								
INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	(Tambahan) Opini BPK	1	WTP Opini	3.721.639.751	1	WTP Opini	3.652.831.000
		(Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi)	100	%		99,99	%	
		(Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan	100	%		99,99	%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tambahan) Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah	100	%	1.040.652.600	100	%	1.039.819.750



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		Provinsi (Jumlah Pendampingan dan asistensi terhadap PD provinsi)						
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional	85	%	2.103.846.531	0	%	1.620.945.359
		Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100	%		0	%	
		(Tambahan) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	100	%		100	%	
		(tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	100	%		100	%	
	Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan	80	%	3.701.288.172	0	%	2.983.938.844



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	PEMBANGUNAN DAERAH	data terpilah gender						
		Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD	85	%		0	%	
		Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan	100	%		100	%	
		(tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100	%		100	%	
		(Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS,	100	%		100	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA						
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah	100	%	870.414.227	0	%	558.011.104
		(TAMBAHAN) " Jumlah produk Inovasi/Invensi yang mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Peraturan Perundang- Undang"	4	Produ k		0	Produ k	
		(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provini/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi untuk	66,6 7	%		66,67	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022		Realisasi2022		
			K	Rp	K	Rp	
		mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual)					
		(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provini/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi Daerah yang diseleksi ke dalam Inkubator Inovasi Daerah)	100	%		100	%
		(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provini/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah rekomendasi (Data dan/atau Informasi) hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada PD	82,86	%		82,86	%



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya)						
		(TAMBAHAN) " Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah"	100	%		100	%	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi							
BADAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100	%	803.597.495.520	100	%	589.097.539.940
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diatas Dilaksanakan Melalui kegiatan : 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; 2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; 3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 5. enunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	(Tambah) Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100	%	3.264.749.031	28,94	%	1.994.354.255
		(Tambah) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	%		26,26	%	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	(Tambah) Kinerja Penagihan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan provinsi.	2,2	Triliun	18.531.484.846	0,72	%	17.118.646.569
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	(Tambah) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan)	100	%	2.859.174.098	43,62	%	2.724.091.950
		(Tambah) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%)	100	%		100	%	
		(Tambah) Persentase pelaksanaan lelang jabatan	100	%		100	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)						
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH sebagaimana diatas dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; 2. Mutasi dan Promosi ASN; 3. Pengembangan Kompetensi ASN; 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah	7	Perda	81.298.393.360	9	Perda	70.893.165.691
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD sebagaimana diatas dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD; 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran; 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; 4. Peningkatan Kapasitas DPRD; 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD; 7.							
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah	100	%	6.589.605.381	59,83	%	4.765.104.507
		(Tambahan) Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa	100	%		59,83	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		pemerintah daerah						
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA sebagaimana diatas dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, 2. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							
Biro Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Peringkat LPPD	15	Perin gkat	727.284.700	Tinggi	Perin gkat	626.247.242
		(Tambahan) Meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi daerah dan penataan urusan daerah (kegiatan tugas pemerintah, otda, penataan urusan dan fasilitasi kerja sama daerah)	100	%		0	%	
		(Tambahan) Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	100	%		0	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH sebagaimana diatas dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, 2. Pelaksanaan Otonomi Daerah, 3. Fasilitasi Kerjasama Daerah							
BIRO ORGANISASI	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien	92,98	%	1.249.241.500	92,98	%	1.075.894.531
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI sebagaimana diatas dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							
BIRO HUKUM	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	(Tambahan) Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum (rancangan peraturan yang diselesaian)	100	%	1.814.488.700	0	%	1.503.437.456
		(Tambahan) Meningkatnya penyelesaian masalah hukum (Jumlah kasus yang ditindaklanjuti)	100	%		0	%	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM sebagaimana diatas dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan, 2. Fasilitasi Bantuan Hukum							
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pelaksanaan pengendalian dan peningkatan mutu diklat	80	%	34.169.028.183	80	%	29.183.266.754
		(Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A"	100	%		100	%	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		(tambahan) Peningkatan pengendalian dan mutu pendidikan dan pelatihan	100	%		85	%	
		(Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal)	100	%		85	%	
		(Tambahan) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	100	%		85	%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA sebagaimana diatas dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi Teknis, 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							
Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	(tambahan) Cakupan penyediaan internet di kawasan Pariwisata Estate (22 Lokasi)	68,2	%	1.501.988.200	100	%	1.445.456.70
		(Tambahan) Tingkat keterbukaan informasi public	85	Skor		76,99	Skor	
		(Tambahan) Tingkat keterbukaan informasi publik	85	Skor		76,99	Skor	



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		di Destinasi Pariwisata						
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	(Tambahan) Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	2,5	Skor	1.591.470.329	3,35	Skor	1.429.153.493
	ROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	(Tambahan) Laju Pemanfaatan data sektoral berbasis TIK	75	%	257.213.700	100	%	231.769.628
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	(Tambahan) Indeks Kematangan Keamanan Informasi	9	Level	184.796.000	2	Level	107.768.000
Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	ROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL	75	%	8.351.660.000	0	%	6.745.597.694
		(Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan	100	%		0	%	
		(Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah	100	%		0	%	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141	85,1	%	2.273.860.050	85,1		1.913.586.280



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
		Lembaga)						
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	90,6	\$	3.018.570.000	3,55	%	2.791.490.550
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	65,30	%	140.234.700	42,85	%	35.483.400
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3	Dokumen	351.291.700	1	Dokumen	273.438.000
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	100		5.733.365.400	33,3	%	3.845.701.305



Perangkat Daerah	Program	Indikator	Target 2022			Realisasi2022		
			K		Rp	K		Rp
	FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							



Capaian target Kinerja dan Anggaran Triwulan IV lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan Pemerintahan (Wajib dan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2022. Capaian Realisasi Anggaran dihitung berdasarkan Realisasi Keuangan(belanja) dibagi Pagu sedangkan Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program(Outcome) yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.21
Pagu, Realisasi,Tingkat Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja
Pemerintahan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2022
Keadaan Triwulan IV

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Kinerja	Kirteria
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.866.587.011.708	463.555.224.327	24,83 (SR)	59.96	R
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	336.812.297.380	250.458.684.893	74,36 (S)	100	ST
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	219.660.350.297	187.014.684.693	85,14 (T)	74.19	S
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.076.052.762.663	990.295.296.123	92,03 (ST)	0	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.909.016.600	13.003.747.989	87,22 (T)	80.32	T
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.507.021.764	7.363.600.866	86,56 (T)	100	ST
7	Dinas Sosial	67.893.028.960	56.020.749.712	82,51 (T)	100	ST
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.372.441.990	5.765.301.132	78,20 (T)	74.26	S
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	114.238.334.713	81.367.158.487	71,23 (S)	52.9	R
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.616.024.678	35.176.964.389	96,07 (ST)	100	ST
11	Dinas Perhubungan	54.599.528.927	49.612.347.685	90,87 (T)	65.36	R
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.015.006.801	10.038.571.277	83,55 (T)	97,3	ST
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.827.913.617	24.385.202.752	74,28(S)	65.06	R
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.138.042.030	8.436.650.354	83,22 (T)	81,25	T
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	44.825.123.996	41.719.739.852	93,07(ST)	35.74	SR
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.075.898.980	11.718.294.475	83,25 (T)	42.19	SR
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.453.248.701	45.822.665.542	92,66 (ST)	93,91	ST
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.856.590.213	11.014.376.205	85,67 (T)	30.4	SR
19	Dinas Peternakan	39.581.544.655	27.572.231.135	69,66 (S)	23.54	SR
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.678.051.849	54.528.897.265	88,41 (T)	79.77	T
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	20.798.964.243	18.348.529.604	88,22 (T)	75	S
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.821.831.170	15.929.487.966	84,63 (T)	40.87	SR
23	Biro Umum	62.755.193.270	59.519.329.321	94,84 (ST)	100	ST
24	Biro Hukum	2.470.875.750	2.037.939.266	82,48 (T)	0	SR
25	Biro Organisasi	1.844.334.550	1.636.818.963	88,75 (T)	100	ST



No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Kinerja	Kriteria
26	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.522.376.160	1.371.146.814	90,07 (T)	0	SR
27	Biro Pemerintahan	24.688.086.948	14.236.804.691	57,67 (R)	31.59	SR
28	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.029.567.101	5.596.672.181	69,70 (S)	67.5	S
29	Biro Administrasi Pimpinan	3.429.807.200	3.265.916.872	95,22 (ST)	30	SR
30	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	8.351.660.000	6.745.597.694	80,77 (T)	28.04	SR
31	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	167.010.158.939	146.698.722.437	87,84 (T)	68.89	S
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.200.669.532	17.185.390.424	77,41 (T)	98.22	ST
33	Badan Keuangan Daerah	822.121.307.946	605.813.353.144	73,69 (S)	100	ST
34	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	113.683.187.084	80.918.444.211	71,18 (S)	30.78	SR
35	Badan Kepegawaian Daerah	13.411.602.898	8.599.368.839	64,12 (R)	39.79	SR
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50.137.205.218	40.887.845.232	81,55 (T)	88.75	T
37	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.425.567.242	4.628.252.693	85,30 (T)	0	SR
38	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	17.921.823.451	16.172.764.712	90,24 (T)	99.99	ST
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.689.748.754	9.709.052.383	51,95 (R)	49.23	SR

Sumber Data : Aplikasi e-Monev Performance Bappelitbangda NTT

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian anggaran dari 39 Perangkat Daerah pada Triwulan IV ini adalah sebesar 61,78% atau 3,375,458,566,790.00 dari total anggaran sebesar Rp 5,464,013,207,978.00 sedangkan rata-rata capaian dari seluruh PD adalah sebesar 77,14 % dengan predikat Sedang (S). Realisasi Kinerja Perangkat Daerah di Triwulan IV adalah sebesar 55, 28 %.

Ada beberapa Perangkat Daerah yang realisasi kinerja mencapai 100 % (persen) dikarenakan kegiatan tersebut tetap berjalan walaupun keterbatasan anggaran, sedangkan ada beberapa Perangkat Daerah yang realisasi kinerjanya masih 0 (nol) kaeran mereka hanya melaporkan realisasi keuangan, sedangkan realisasi kinerja tidak dilaporkan.

Berapa hal yang menjadi penyebabnya adalah adanya refocussing anggaran dan masih terdapat 2 (dua) PD tidak melaporkan realisasi capaian anggaran sampai dengan laporan ini diturunkan.

PD yang belum melaporkan realisasi capaian anggaran APBD sampai dengan Triwulan IV karena belum menginput pada Aplikasi E-Monev hingga saat ini antara lain :



1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

Terdapat 7 (tujuh) Perangkat Daerah yang belum melaporkan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV karena belum menginput pada Aplikasi E-Monev hingga saat ini antara lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
5. Biro Hukum
6. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
7. Badan Pengelola Perbatasan

Tabel 2.22
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
$91\% \leq 100\%$	SANGAT TINGGI (ST)
$76\% \leq 90\%$	TINGGI (T)
$66\% \leq 75\%$	SEDANG (S)
$51\% \leq 65\%$	RENDAH (R)
$\leq 50\%$	SANGAT RENDAH (SR)

Kriteria ini berlaku pada kondisi Triwulan IV dan Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang
Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah.
Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Kondisi permasalahan Pembangunan

Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan di Provinsi NTT.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang terjadi sampai dengan tahun 2022, yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan seperti adanya pandemi Covid-19, Badai Seroja, Krisis Ekonomi dan Perang Rusia-Ukraina.

Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara lain :

1. Masih tingginya angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih



tinggi, masih sebesar 20,23 % atau berjumlah 1,117 juta orang pada September tahun 2022 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang sudah mencapai single digit yaitu 9,57 %.

2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Agustus 2022 terhadap 436.129 balita, terdapat 77.338 balita yang mengalami Stunting di 22 Kab/Kota dengan data by name by address. Ini berarti, ada penurunan sebesar 3,2% dari 20,9% (81.354 balita) Tahun 2021 menjadi 17,7% (77.338 balita) Tahun 2022, berdasarkan E-PPGBM Bulan Agustus Tahun 2022. Ini berarti rata-rata 1-2 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permasalahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagai bentuk investasi untuk masa depan generasi muda.

3. Masih rendahnya pendapatan masyarakat

Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat.

Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp118,72 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 72,70 triliun sedangkan pertumbuhan Ekonomi NTT tahun 2022 adalah sebesar 3,45 persen.

4. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 15 tahun keatas di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,70 tahun pada 2022. RLS itu meningkat 0,01% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang selama 7,69 tahun. RLS tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk NTT bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 Sekolah



Menengah Pertama (SMP). RLS tersebut berada di bawah rata-rata RLS secara nasional yang selama 8,69 tahun pada 2022. Sementara, harapan lama sekolah (HLS) di NTT sebesar 13,21 tahun pada 2022. Angkanya meningkat 0,01% dibandingkan pada 2021 yang mencapai 13,20 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa setiap penduduk NTT yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau tamat Diploma 1 (D1). Angka HLS di NTT sedikit lebih rendah dari rata-rata secara nasional yang sebesar 13,28 tahun.

5. Infrastruktur yang masih belum memadai. Pembangunan infrastruktur jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi pembangunan dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh dan berkembang.
6. Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus menjadi daerah terluar dan terdepan, sebagian besar (13 dari 22) kabupaten/kota masih merupakan daerah tertinggal. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana.
7. Permasalahan birokrasi di Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan rendahnya capaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi di Nusa Tenggara Timur yang masih rendah yaitu nilai SAKIP yaitu CC tahun 2022, sedangkan nilai SPBE tahun 2022 yaitu 3,35 dengan kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan birokrasi di Nusa Tenggara Timur perlu ditingkatkan dari kualitas SDM, dan penguatan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.3.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Masih tingginya angka kemiskinan
2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



2.3.2.2 Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

- a. Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai kelas 1 atau 2 SMP.
- b. belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah.
- d. Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
- e. Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi.

2. Kesehatan

- a. Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
- b. Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
- c. Rendahnya SDM kesehatan.
- d. Masih tingginya angka stunting.
- e. Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2022.
- b. Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata.
- c. Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi.
- d. Rendahnya kualitas DAS.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Belum optimalnya Penanganan masalah air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin.
- b. Masih tingginya rumah tidak layak huni.
- c. Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T.



5. Perhubungan

- a. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang transportasi di Nusa Tenggara Timur sebagai upaya untuk penguatan konektivitas transportasi.
- b. Masih terbatasnya pemanfaatan sarana-prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan.
- c. Belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.
- c. Minimnya rambu lalu lintas dan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ).

6. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Masih rendahnya rasio elektrifikasi dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%;
- b. Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong-kantong kemiskinan.

7. Pertanian dan Peternakan

- a. Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura;
- b. Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampung;
- c. Belum optimalnya penyediaan pakan ternak yang masih bergantung pada supply dari pabrik pakan ternak luar NTT;
- d. Belum tersedianya statistik ternak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).

8. Perikanan dan Kelautan

- a. Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata pada khususnya dan wilayah NTT pada umumnya.
- b. Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan.

9. Sosial



Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 Kabupaten/Kota.

10. Tenaga Kerja

- a. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dari sisi tingkat pendidikan.
- b. Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja.
- c. Masih terdapat pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum.

11. Kebencanaan

Belum optimalnya upaya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kebakaran, pandemi, banjir, tanah longsor dan lain-lain.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya BUMDES.
- b. Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa.

13. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- a. Belum optimalnya pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- b. Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan.
- c. Kurangnya penanganan sampah dan limbah B3.
- d. Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.
- e. Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.
- f. Belum optimalnya Pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu berbasis perhutanan sosial.
- g. Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata.
- h. Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum).



14. Perindustrian dan Perdagangan

- a. Belum optimalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri.
- b. Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sector hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).
- c. Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

15. Perbatasan

Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.

16. Penunjang

- a. Reformasi Birokrasi Belum optimalnya penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan.
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender.

2.3.2.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Masih rendahnya pendapatan masyarakat Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Dimana Pertumbuhan PDRB di tahun 2022 sebesar 3,45 %. Pandemi Covid 19 merupakan salah satu penyebab utama menurunnya pertumbuhan ekonomi NTT dalam beberapa tahun ini.
2. Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah masih rendah sehingga perlu meningkatkan dan mendorong pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan.
3. Masih belum optimalnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional baik ekspor dan import yang dapat mendorong kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dimana persentase PAD terhadap



pendapatan daerah di tahun 2022 masih rendah yaitu 24,77%.

4. Masih tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat dimana rasio ketergantungan pada Tahun 2022 mencapai 64,10%.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH





BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh indikator pembangunan berupa laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi ketenagakerjaan, dan derajat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Gini. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi ini, digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi di tahun 2024. Sedangkan kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi pada tahun 2022 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2023. Selain itu arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2022. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2024.

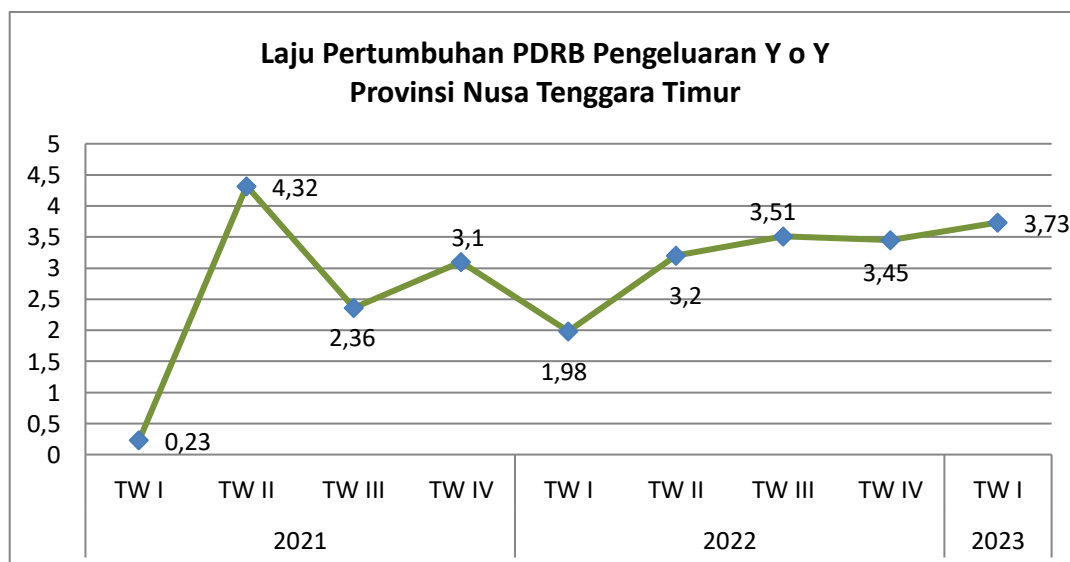
3.2.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022

3.1.1.1. PDRB/Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin besar pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan semakin besar output barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 ekonomi NTT tumbuh sebesar 3,45 persen (y to y) mengalami kenaikan sebesar 0,35 % dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,10% hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1. Perbaikan kinerja perekonomian didukung oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik yang semakin tinggi, kinerja berbagai lapangan usaha yang tetap baik dan seiring dengan pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemerintah pusat dalam Ranwal RKP tahun 2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 adalah sebesar 5,0 - 5,4 persen. Sedangkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 adalah sebesar 4,55 – 5,35 persen dibawah target nasional.

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Menurut Pengeluaran Provinsi NTT Tahun 2021-TW I 2023



Sumber : Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Januari 2023

Ekonomi NTT menurut pengeluaran pada triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 yang mengalami pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 3,26 persen. Kemudian pengeluaran konsumsi rumah tangga bertumbuh sebesar 1,94 persen. Sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi antara lain Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,15, pembentukan modal tetap bruto sebesar 0,05, ekspor barang dan jasa sebesar 17,37 dan net impor sebesar 7,01 persen. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010

No	Komponen	TW IV-2022 terhadap TW III-2022	TW I-2023 terhadap TW IV-2022	TW IV-2022 terhadap TW IV-2021
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	2,01	-5,4	1,94
2.	Pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga	1,64	-1,69	3,26
3.	Pengeluaran konsumsi pemerintah	33,63	-61,91	-5,15
4.	Pembentukan modal tetap bruto	13,34	-13,24	-0,05
5.	Perubahan inventori	-	-	-
6.	Ekspor barang dan jasa	-1,63	-25,46	-17,37
7.	Dikurangi impor barang dan jasa	24,08	-38,73	-7,01

Struktur Ekonomi NTT pada tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,60 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 70,43 persen.

Pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV-2022 menurut lapangan usaha tertinggi dicapai oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,68 persen. Sedangkan yang mengalami kontraksi adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,87 persen dan Konstruksi sebesar 0,51 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2



Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha
Tahun Dasar 2010

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (y-on-y) (Persen)					
		2022					2023
		TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,54	4,73	4,22	4,53	3,77	3,68
2	Pertambangan dan Penggalian	2,36	2,54	3,33	0,25	2,1	2,41
3	Industri Pengolahan	8,89	11,08	4,26	2,97	6,67	6,55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,2	13,33	7,77	2,1	6,16	0,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,45	4,66	0,06	0,02	2,01	2,13
6	Konstruksi	1,89	2,15	-5,39	-0,51	-0,67	3,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,79	8,4	7,35	7,68	7,08	4,68
8	Transportasi dan Pergudangan	7	5,25	5,38	1,59	4,74	3,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,91	23,36	30,4	-0,87	18,4	4,5
10	Informasi dan Komunikasi	3,39	5,51	4,43	4,51	4,46	4,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,5	0,73	0,99	2,92	1,26	-0,89
12	Real Estate	3,62	2,79	2,92	2,71	3	1,88
13	Jasa Perusahaan	5,02	5,31	2,28	1,4	3,47	1,34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,29	-1,84	7,91	4,32	1,91	4,94
15	Jasa Pendidikan	-0,17	-3,62	1,23	0,49	-0,52	3,51
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,02	2,38	-3,68	0,86	1	4,05
17	Jasa lainnya	1,04	0,23	0,15	0,66	0,52	2,25
	PDRB	1,98	3,2	3,51	3,45	3,05	3,73

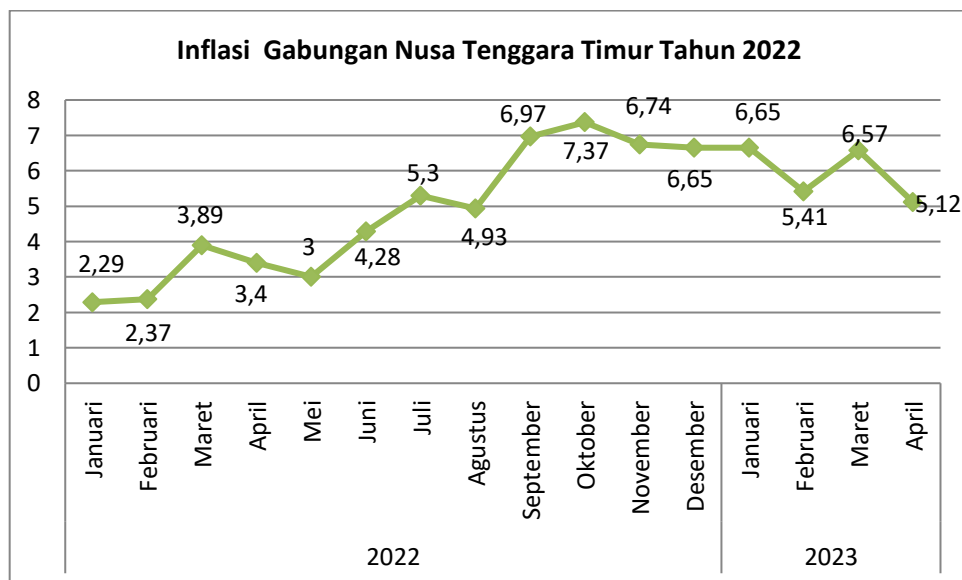
3.1.1.2. Inflasi

Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga erat kaitannya dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi upah/gaji, asumsi APBN dan sebagainya.

Pada Tahun 2022 inflasi Nusa Tenggara Timur sebesar 6,65 persen lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 5,51 persen. Nilai inflasi tahunan ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi sudah jauh lebih aktif dibandingkan tahun sebelumnya dimana dampak dari COVID-19 lebih terasa.

Gabungan 3 (tiga) Kota yaitu Kota Kupang, Maumere dan Waingapu pada Desember 2022 mengalami inflasi YoY sebesar 6,65 persen lebih rendah dibandingkan inflasi bulan November 2022 sebesar 6,74 persen hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut :

Gambar 3.2 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi NTT Tahun 2022



Sumber : Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Januari 2023

Menurut kelompok pengeluaran, kelompok transportasi mengalami inflasi (YtY) sebesar 21,52 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi YoY sebesar 0,58 persen. Perkembangan inflasi menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 3.3



Tabel 3.3. Inflasi dan Andil Inflasi Gabungan NTT Desember 2022

No	Kelompok Pengeluaran	Des-22			
		Inflasi MtM (%)	Andil MtM (%)	Inflasi YoY (%)	Andil YoY (%)
	Umum	0,81	0,81	6,65	6,65
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,99	0,99	7,52	2,51
2	Pakaian dan Alas Kaki	-0,16	-0,01	0,84	0,05
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,12	0,02	1,13	0,20
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,18	0,01	4,91	0,24
5	Kesehatan	0,11	0,00	2,59	0,04
6	Transportasi	-1,55	-0,24	21,52	2,92
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,04	0,00	-0,58	-0,03
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,25	0,00	2,20	0,03
9	Pendidikan	0,00	0,00	1,76	0,06
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,01	0,00	1,52	0,09
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lain	0,72	0,05	7,92	0,54
	Komponen Bahan Makanan	3,72	0,90		

Sumber : Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Januari 2023

3.1.1.3. Penduduk Miskin

Tingkat Kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi.

Jumlah penduduk penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 mencapai 1.131 ribu orang menurun sebesar 37,69 ribu orang dibandingkan bulan tahun 2021 sebesar 1.169 orang penduduk miskin. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian harga bahan bakar (BBM) pada tanggal 3 September 2022 untuk jenis bahan bakar pertalite, solar dan pertamax (non-subsidi).
2. Pertumbuhan ekonomi Triwulan IV-2022 menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan yang positif dibanding Triwulan III-2022.



Pengeluaran konsumsi pemerintah pada Triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 33,63 persen dibanding Triwulan III-2022

3. Laju Inflasi Triwulan IV-2022, mengalami penurunan yaitu dari 6,97 persen pada September 2022 menjadi 6,65 pada Desember 2022 hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat semakin membaik.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2022 sebesar 3,54 persen turun sebesar 0,23 persen poin dibandingkan Agustus 2021 sebesar 3,77 persen.

Pemerintah pusat dalam Ranwal RKP Tahun 2024 menargetkan presentase kemiskinan Provinsi NTT sebesar 16,5 - 16,9 persen jauh dibawah target RPD Provinsi NTT Tahun 2024 sebesar 20 - 19,63 persen.

Tabel 3.4 Jumlah dan presentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2020-2022

Wilayah	Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota					
	2020		2021		2022	
	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Presentase	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Presentase	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Presentase
Sumba Barat	36,95	28,17	37,78	28,39	37,06	27,47
Sumba Timur	77,30	29,65	78,33	29,68	75,28	28,22
Kupang	94,94	22,77	91,25	22,98	88,02	21,70
Timor Tengah Selatan	128,98	27,49	125,68	26,64	120,45	25,45
Timor Tengah Utara	56,98	22,28	58,33	22,62	55,88	21,50
Belu	34,18	15,37	35,41	15,68	33,98	14,84
Alor	43,55	21,09	43,83	21,09	42,30	20,25
Lembata	37,92	26,14	38,75	26,21	37,88	25,18
Flores Timur	27,89	10,84	28,90	11,14	28,08	10,75
Sikka	42,18	13,12	43,09	13,35	40,87	12,61
Ende	65,22	23,76	66,38	24,13	63,40	23,00
Ngada	20,62	12,51	20,98	12,58	20,14	11,93
Manggarai	69,52	20,34	71,03	20,48	69,68	19,84
Rote Ndao	48,77	27,54	51,71	28,08	52,43	27,45
Manggarai Barat	49,40	17,71	51,15	17,92	49,95	17,15
Sumba Tengah	25,37	34,49	25,48	34,27	24,49	32,51
Sumba Barat Daya	97,81	28,00	100,42	28,18	98,50	27,16
Nagekeo	18,51	12,61	19,11	12,91	18,01	12,05
Manggarai Timur	76,69	26,52	77,17	26,50	74,55	25,35
Sabu Raijua	30,14	30,18	30,60	30,13	30,00	28,73
Malaka	31,12	16,04	32,17	16,33	30,48	15,26
Kota Kupang	39,72	8,96	41,77	9,17	40,20	8,61
NTT	1.153,76	20,90	1.169,31	20,99	1.131,62	20,05

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

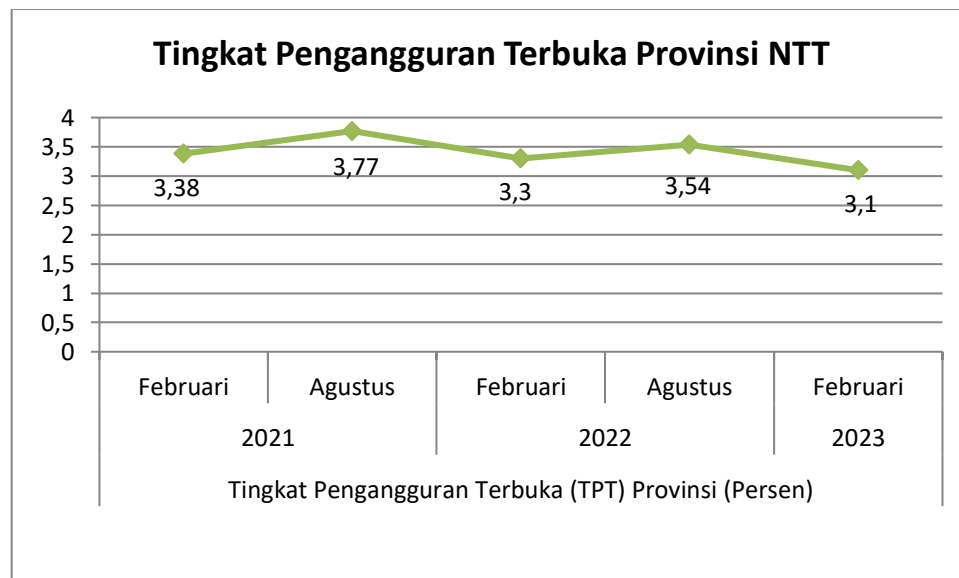
3.1.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Tingkat pengangguran terbuka pada agustus 2022 sebesar 3,54 persen artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada bulan Februari 2023 TPT mengalami penurunan sebesar 0,20 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Pemerintah pusat menargetkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebesar 2,6 – 3,3 persen sama dengan target dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yaitu sebesar 2,66-3,37.

Gambar 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT Feb 2021 – Feb 2023

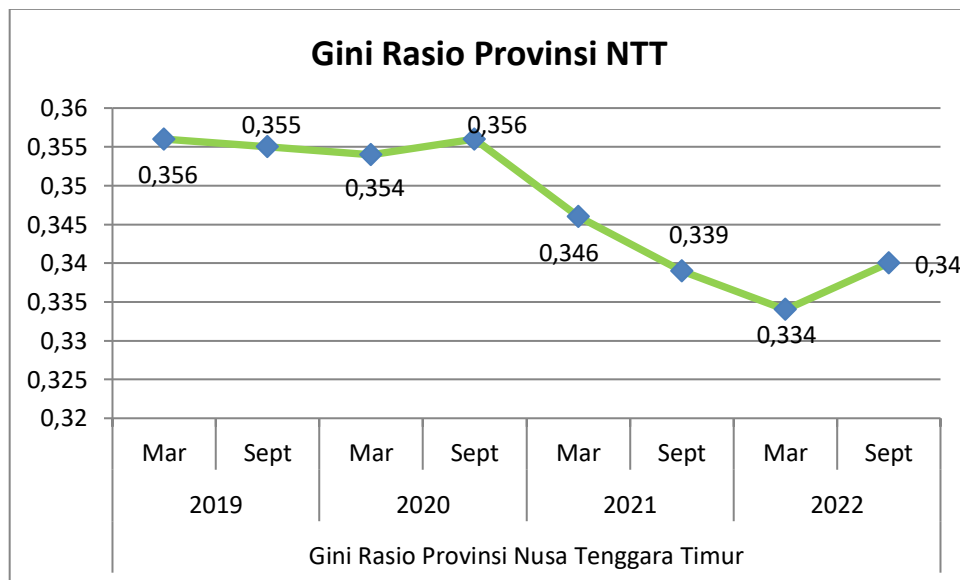


3.1.1.5. Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 relatif stabil. Rasio gini pada September 2022 tercatat 0,34 relatif stabil dibanding Maret 2022 sebesar 0,33. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut ini :

Gambar 3.4 Gini Rasio Provinsi NTT Mar 2019 – Sept 2022





3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan



3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 , Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah.

Pada tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp. 1.105.853 Juta meningkat sebesar Rp.179.721 Juta apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 52.689 Juta menurun sebesar Rp. 17.201 Juta dibanding tahun 2021. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp. 36.919 Juta menurun sebesar Rp. 28.062 juta. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2022 sebesar Rp. 168.536 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 8.760 Juta dibanding tahun 2021. juta dibanding tahun 2020.

Dana perimbangan masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2021 besarnya dana perimbangan adalah Rp. 3.018.444 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 982.210 Juta dibanding tahun 2021. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah

yang sah tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 7.950 Juta menurun sebesar Rp. 65.808 Juta dibanding tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2020-2022

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022*
1.	PENDAPATAN	5.419.935.156.637,49	5.312.446.872.608,51	4.390.124.257.515,86
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.166.570.596.936,49	1.238.032.648.888,51	1.363.729.389.742,12
1.1.1	Pajak Daerah	924.189.837.048,00	925.862.559.388,00	1.105.583.994.987,35
1.1.2	Retribusi Daerah	34.959.171.078,00	69.890.857.732,45	52.689.094.629,05
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	65.135.467.629,92	64.982.172.050,00	36.919.619.641,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	142.286.121.180,57	177.297.059.718,06	168.536.680.484,72
1.2	Dana Perimbangan	4.171.362.593.723,00	4.000.655.446.445,00	3.018.444.461.241,74
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	67.539.025.428,00	77.108.302.308,00	3.018.444.461.241,74
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.716.206.146.000,00	1.726.712.089.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.368.294.056.295,00	2.189.395.443.137,00	
1.2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	19.323.366.000,00	7.439.612.000,00	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	82.001.965.978,00	73.758.777.275,00	7.950.406.532,00
.3.1	Hibah	82.001.965.978,00	73.758.777.275,00	7.950.406.532,00
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)			
1.3.4	Pendapatan Lainnya			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

- Realisasi Pendapatan sebelum diaudit

Mendasarkan pada kondisi realisasi tahun 2020-2022, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka

proyeksikan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6. Proyeksi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2024

Uraian	Proyeksi Pendapatan Daerah 2024	Proyeksi Indikatif Pendapatan Daerah 2024	Proyeksi Pendapatan Daerah 2025
PENDAPATAN	5.187.875.284.953	4.935.483.597.691	5.033.775.109.329
Pendapatan Asli Daerah	1.986.960.409.953	1.615.490.869.950	1.647.800.687.349
Pajak Daerah	1.517.175.551.519	1.247.452.245.000	1.272.401.289.900,00
Retribusi Daerah	144.996.275.950	98.190.557.000	100.154.368.140,00
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	65.370.767.209	76.110.783.950	77.632.999.629,00
Lain-lain PAD yang sah	259.417.815.275	193.737.284.000	197.612.029.680,00
Pendapatan Transfer	3.199.163.279.000	3.246.101.104.741	3.312.082.798.980
Transfer Pemerintah Pusat	3.199.163.279.000	3.246.101.104.741	3.312.082.798.980,00
Dana Perimbangan	3.199.163.279.000		3.312.082.798.980,00
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		54.861.209.000	
Dana Alokasi Umum		1.874.917.755.741	
Dana Alokasi Khusus		1.308.657.100.000	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		7.665.040.000	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.751.596.000	73.891.623.000	73.891.623.000
Hibah	1.751.596.000	73.891.623.000	73.891.623.000
Dana Darurat			
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)			
Pendapatan Lainnya			
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah



3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :



Tabel 3.7. Realisasi Belanja Daerah tahun 2020-2022 (Rp.Juta)

Rek	Uraian	Realisasi		
		2020	2021	2022*
2.	BELANJA DAERAH	5.290.121.484.382,14	5.100.995.655.110,69	4.226.105.808.042,66
2.1	BELANJA OPERASI	4.022.397.290.093,34	4.061.962.995.625,69	3.002.993.350.436,32
2.1.1	Belanja Pegawai	1.444.646.968.075,00	1.608.464.234.033,00	1.408.088.482.166,01
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.221.574.013.528,45	1.078.288.386.249,19	1.353.546.803.049,07
2.1.3	Belanja Bunga	5.875.483.689,89	17.483.698.421,50	19.018.591.359,24
2.1.4	Belanja Hibah	1.329.334.450.800,00	1.347.483.386.922,00	190.288.673.862,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.966.374.000,00	10.243.290.000,00	32.050.800.000,00
2.2	BELANJA MODAL	1.026.785.278.414,80	903.257.622.800,00	1.212.262.943.486,34
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	147.952.000,00	750.293.656,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.160.307.477,95	185.901.613.833,00	151.456.542.674,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.836.474.129,85	135.344.543.385,00	139.553.967.360,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	504.964.198.116,00	572.412.496.697,00	920.056.957.796,34
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	141.824.298.691,00	9.451.016.885,00	445.182.000,00
		0,00	0,00	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	240.938.915.874,00	135.775.036.685,00	10.849.514.120,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	240.938.915.874,00	135.775.036.685,00	10.849.514.120,00
3.	TRANSFER	465.136.531.811,50	407.772.251.022,00	540.770.869.801,00
3.1.	BELANJA TRANSFER	465.136.531.811,50	407.772.251.022,00	540.770.869.801,00
3.1.1	Belanja Bagi Hasil	460.136.531.811,50	397.772.251.022,00	527.502.869.801,00
3.1.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	13.268.000.000,00
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	5.755.258.016.193,64	5.508.767.906.132,69	4.766.876.677.843,66

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

- Realisasi Pendapatan sebelum diaudit

Komponen dalam belanja dibagi menjadi belanja daerah dan belanja transfer. Belanja daerah dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3.002.993 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 1.058.969 Juta dibandingkan tahun 2021, hal tersebut karena penurunan belanja hibah yang besar yaitu sebesar Rp. 1.157.194 Juta. Untuk belanja modal tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.212.262 Juta meningkat sebesar Rp. 309.005 Juta dibanding tahun 2021. Belanja tak terduga juga mengalami

penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp. 124.925 Juta dibanding tahun 2021.

Belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2020-2022 Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk: 1) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD.

Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi dana untuk PILKADA, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun restocking asset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD. Proyeksi belanja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

4.869.235.881.185

Tabel 3.8 Proyeksi Belanja Provinsi NTT tahun 2024

Uraian	Proyeksi Tahun 2023 (n-1)	Proyeksi Indikatif Belanja Daerah TAHUN 2024	Proyeksi tahun 2025 (n+1)
BELANJA	5.182.527.370.059	4.999.502.181.099	4.869.235.881.185
Belanja Operasi	3.740.225.538.443	3.626.374.823.499	3.540.252.863.729
Belanja Pegawai	1.740.189.777.996	2.052.268.897.000	2.043.462.894.666
Belanja Barang dan Jasa	1.604.385.302.519	1.389.695.052.099	1.323.166.742.103
Belanja Bunga	70.214.974.393	76.534.400.000	76.534.400.000
Belanja Hibah	276.946.883.535	80.217.674.400	72.195.906.960
Belanja Bantuan Sosial	48.488.600.000	27.658.800.000	24.892.920.000
Belanja Modal	644.854.518.033	406.041.708.600	365.680.974.540
Tanah		0	-



Uraian	Proyeksi Tahun 2023 (n-1)	Proyeksi Indikatif Belanja Daerah TAHUN 2024	Proyeksi tahun 2025 (n+1)
Peralatan dan Mesin	170.202.199.029	67.591.255.000	60.832.129.500
Gedung dan Bangunan	285.674.956.483	196.854.187.600	177.168.768.840
Jalan, Jaringan dan Irigasi	185.734.344.471	138.553.306.000	124.697.975.400
Aset Tetap Lainnya	3.243.018.050	3.042.960.000	2.982.100.800
Belanja Tidak Terduga	16.081.127.697	136.196.697.000	135.369.533.524
Belanja Tidak Terduga	16.081.127.697	136.196.697.000	135.369.533.524
Belanja Transfer	781.366.185.886	830.888.952.000	830.888.952.000
Belanja Bagi Hasil	769.891.429.886	790.605.621.000	790.605.621.000
Belanja Bantuan Keuangan	11.474.756.000	40.283.331.000	40.283.331.000
Surplus/Defisit	5.347.914.894	-64.018.583.408	163.479.556.000

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 3.9 Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT tahun 2020-2022 (Rp.Juta)

No	Uraian	REALISASI		
		2020 (Rp. Juta)	2021 (Rp. Juta)	2022* (Rp. Juta)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	430.706.217.940,55	503.023.089.714,99	795.794.281.899,61
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	282.629.763.942,00	68.383.358.383,99	62.544.957.626,61
1.2	Penerimaan Kembali Investasi non permanen	4.159.731.999,00	3.405.345.681,00	730.098.883.256,00
1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dan obligasi daerah	143.916.722.000,00	431.234.385.650,00	3.150.441.017,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.000.000.000,00	244.157.098.564,20	322.953.545.889,90
2.1	Penyertaan Modal Daerah/ Investasi Pemerintah Daerah	27.000.000.000,00	127.300.000.000,00	100.000.000.000,00
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	114.357.098.564,20	14.000.000.000,00
2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.500.000.000,00	208.953.545.889,90
3	PEMBIAYAAN NETTO	403.706.217.940,55	258.865.991.150,79	472.840.736.009,71
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	68.383.358.383,99	62.544.957.626,61	96.088.315.681,91

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

- Realisasi Pendapatan sebelum diaudit

Sepanjang periode 2020-2022, Penerimaan Pembiayaan daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Komponen Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (silpa) yang termasuk dalam kelompok ini sepanjang periode yang sama mengalami kontraksi dari Rp Rp. 282.630 Juta pada tahun 2020 untuk menurun menjadi Rp. 68.383 Juta pada tahun 2021 dan 62.544 pada tahun 2022. Kenaikan terbesar yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pembiayaan datang dari komponen Penerimaan Kembali Investasi non permanen yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 730.098 juta, meningkat sebesar Rp. 726.693 Juta dari tahun 2021. Komponen penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 143.916 Juta menurun pada tahun 2021 menjadi Rp. 431.324 Juta dan mengalami penurunan menjadi Rp. 3.150 Juta pada tahun 2022.

Pengeluaran Pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya



dari Rp.27.000 Juta pada tahun 2020 meningkat tajam menjadi Rp.244.157 Juta pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi Rp. 322.953 Juta. Pertumbuhan yang tinggi ini disumbangkan oleh meningkatnya pemberian pinjaman daerah. Pertumbuhan pengeluaran pendapatan yang tinggi juga disebabkan karena pada tahun anggaran 2021 pemerintah daerah melakukan pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebesar Rp. 114.357 Juta dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.2.500 Juta yang mana kedua komponen ini tidak terealisasi pada struktur pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dihitung sebagai pembiayaan netto, mengalami kontraksi pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dari Rp. 403.706 Juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 258.865 Juta pada tahun 2021 dan kembali tumbuh pada tahun 2022 menjadi Rp. 472.840 Juta

Setelah menutup defisit, sisa dari pembiayaan netto dihitung sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan. Pertumbuhan rata-rata silpa tahun berkenaan dalam realisasi APBD NTT dari Rp.68.383 Juta pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 62.544 juta dan kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp.96.088 Juta tahun 2022.

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Adapun proyeksi pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 berdasarkan pada realisasi Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 3.10 Proyeksi Pembiayaan Provinsi NTT tahun 2024

Uraian	Proyeksi Tahun 2023 (n-1)	Proyeksi Indikatif Pembiayaan Daerah Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025 (n+1)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	267.194.430.804	493.832.090.000	0
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun sebelumnya	83.034.698.805		
Penerimaan pinjaman daerah			
Pencairan Dana Cadangan	180.000.000.000	486.250.000.000	
Investasi non permanen			
Penerimaan kembali pinjaman daerah	4.159.731.999	7.582.090.000	
Pengeluaran Pembiayaan	271.704.354.575	429.813.506.592	163.479.556.000
Pembentukan dana cadangan	240.000.000.000	169.333.950.592	
Penyertaan Modal		92.000.000.000	
Investasi non permanen		5.000.000.000	
Pembayaran pokok hutang	31.704.354.575	163.479.556.000	163.479.556.000
Pemberian pinjaman daerah		-	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	837.991.123	0	0
Total APBD	5.455.069.715.757	5.429.315.687.691	5.032.715.437.185

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH





BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus terkait dengan capaian akselerasi dalam rangka sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dari hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan pada tahun sebelumnya, serta rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2024 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2020-2024 dan RPD 2024-2026 Provinsi NTT untuk tahun rencana 2024.

4.1 ARAHAN RPJMN 2020-2024 DAN RPD 2024-2024

4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena merupakan RPJMN periode akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong**



Royong”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

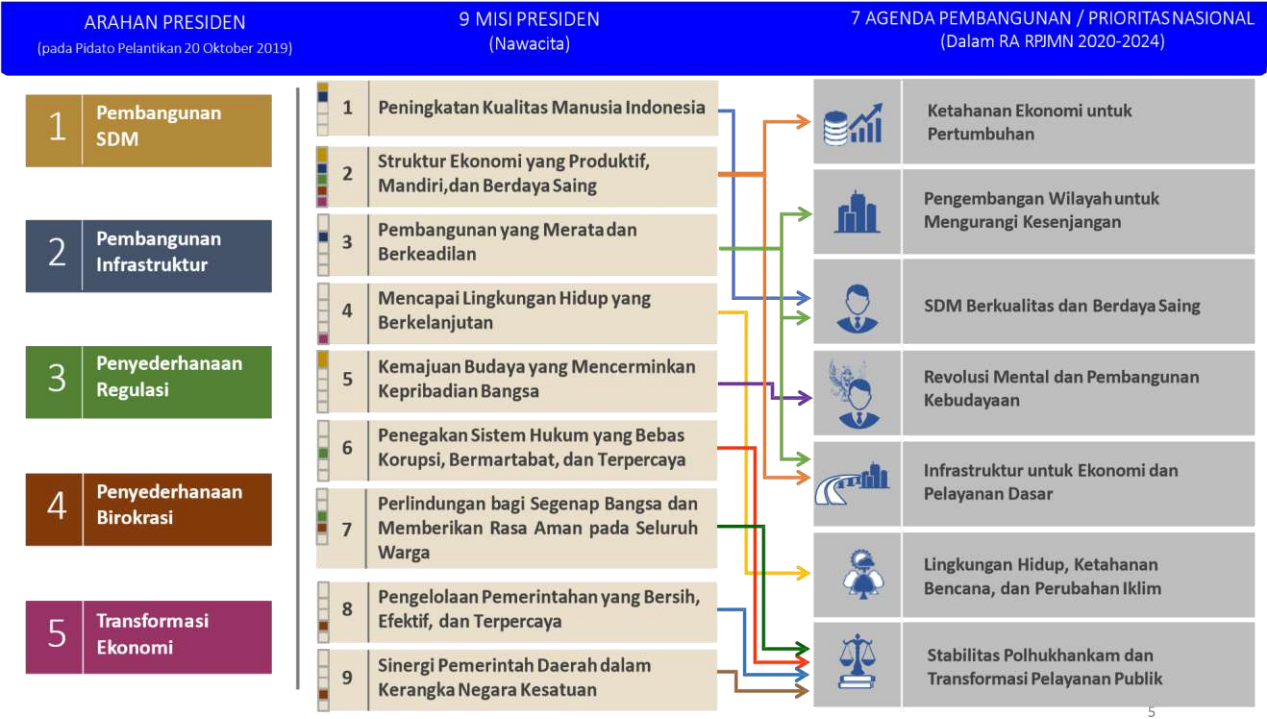
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arahan Presiden, Nawacita dan 7 (tujuh) agenda/prioritas Nasional terlihat pada Gambar 4.1 berikut.



*) Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dapat diunduh di<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/re/>

Gambar 4.1
Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional

Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Indikator Makro Pembangunan Nasional

Indikator	Satuan	Rencana Jangka Menengah				Rencana Tahunan	
		RPJMN (2023)	RPJMD-P (2023)	RPJMN (2024)	RPD (2024)	RKP 2024	RKPD 2024
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,7-6,0	6,7-7,3	6,8	6,7-7,3	7,50	6,7-7,3
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,0-7,5	15-12	12,35	15-12	12,35	15-12
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,0-4,6	1,9-1,5	2,0	1,9-1,5	2,0	1,9-1,5
Gini Rasio	Indeks	0,374-0,377	0,34-0,32	0,374-0,377	0,34-0,32	0,360-0,374	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,77	70-71	74,77	70-71	75,54	70-71

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2024, Bappenas

4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk Wilayah Nusa Tenggara

Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan



pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui: 1) pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE); 2) industri kreatif berbasis budaya; 3) percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; 4) pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan 5) pengembangan industri pangan dan tembaga.

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

- 1 Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
 - a. meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
 - b. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur;
 - c. pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022);
 - d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
 - e. percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
 - f. pelaksanaan pembangunan afirmatif.
- 2 Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui:



- a. pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
 - b. pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT/WPP;
 - c. pengembangan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN;
 - d. revitalisasi kawasan transmigrasi;
 - e. pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
 - f. pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan;
 - g. destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
 - h. pengembangan kawasan perkotaan;
 - i. pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
 - j. peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan
 - k. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 3 Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui:
- a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
 - b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
 - c. percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah.
- 4 Penguatan konektivitas dilakukan antara lain melalui:



- a. pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi;
 - b. penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
- 5 Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui:
- a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
 - b. peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Pulau Lombok dan sekitarnya;
 - c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
 - d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan
 - e. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran 1

Gambar 4.2

Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian,



perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Tabel 4.2 Koridor Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024

KORIDOR PERTUMBUHAN		KORIDOR PEMERATAAN	
1.	Kab. Manggarai Barat	1.	Kab. Sumba Timur
2.	Kab. Manggarai	2.	Kab. Sumba Tengah
3.	Kab. Manggarai Timur	3.	Kab. Sumba Barat
4.	Kab. Ngada	4.	Kab. Sumba Barat Daya
5.	Kab. Nagekeo	5.	Kab. Timor Tengah Selatan
6.	Kab. Ende	6.	Kab. Timor Tengah Utara
7.	Kab. Sikka	7.	Kab. Malaka
8.	Kota Kupang	8.	Kab. Belu
9.	Kab. Kupang		

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran 4

Terlihat dari Tabel 4.2 bahwa terdapat 5 (lima) kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tidak masuk dalam 2 (dua) koridor pembangunan di RPJMN 2020-2024 yaitu Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelompokkan kelima kabupaten dimaksud dalam koridor pembangunan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Pengelompokan Kabupaten yang belum dimasukkan ke dalam Koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024

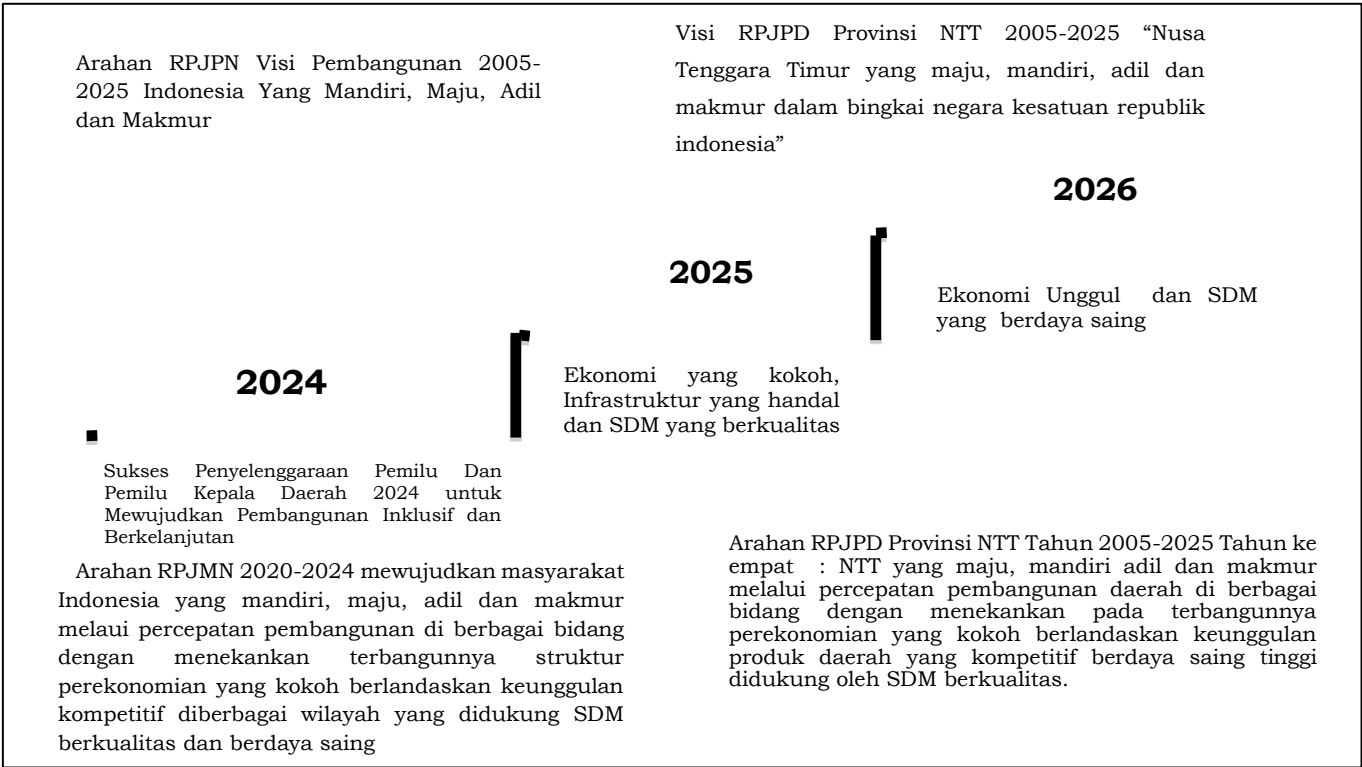
KORIDOR PERTUMBUHAN		KORIDOR PEMERATAAN	
Yang belum masuk di dalam RPJMN didorong sebagai berikut :			
1.	Kab. Flores Timur	1.	Kab. Rote Ndao
2.	Kab. Lembata	2.	Kab. Sabu Raijua
3.	Kab. Alor		

Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, Tahun 2023



4.1.3 Arahan RPD 2024-2026

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama tiga tahun dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Tabel 4.4 berikut.



Gambar 4.3 Arah Kebijakan Provinsi NTT Tahun 2024-2026

Tabel 4.4
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

ARAH KEBIJAKAN		
TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILU KEPALA DAERAH 2024 UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	EKONOMI YANG KOKOH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN SDM YANG BERKUALITAS	EKONOMI UNGGUL DAN SDM YANG BERDAYA SAING
➤ Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan ➤ Pengembangan dan	➤ Pengembangan Rantai Nilai ekonomi lokal ➤ Penguatan system ekonomi masyarakat	➤ Kerjasama lintas daerah dan para pemangku kepentingan dalam



ARAH KEBIJAKAN		
TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
penguatan potensi-potensi ekonomi lokal ➤ Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar ➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM ➤ Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya. ➤ Mensukseskan penyelenggaraan Pemili dan Pemilu Kepala daerah serentak tahun 2024	➤ Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya ➤ Peningkatan kualitas hidup masyarakat ➤ Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur ➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM	pengelolaan ekonomi berkelanjutan ➤ Peningkatan kualitas hidup masyarakat ➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM

Arah kebijakan dari tahun 2024-2026 akan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.

Keempat prioritas pembangunan daerah tersebut akan dijalankan melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan indikator kinerja Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

No	Indikator	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,55-5,35
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,66 – 3,37
3	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.598
4	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20-19,63
5	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	24,71
6	Indeks Pembangunan Gender (%)	93



No	Indikator	Target 2024
7	Indeks Gini (Poin)	0,336-0,338
8	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	68
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	66,58-66,73
10	Rata-rata lama sekolah (Poin)	7,75
11	Harapan lama sekolah (Poin)	14,2
12	Usia Harapan Hidup (Poin)	67,5
13	Prevelensi Stunting (%)	12-10
14	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	100
15	Rasio Konektivitas Provinsi	92
16	Ratio Elektrifikasi (%)	93
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73,62
18	Indeks Resiko Bencana (Poin)	140
19	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	63-64
20	OPINI BPK	WTP
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	A
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,3
23	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	88
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	85
25	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,4

Sumber : RPD 2024-2026 Provinsi NTT

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai Sasaran, Indikator dan Target yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 Provinsi NTT, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini disinkronkan dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6



Table 4.6. Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2024
Provinsi NTT

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2024
1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	1. Meningkatnya produksi dan produktifitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah	Pertumbuhan PDRB (%)	4,55-5,35
	2. Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian	Kontribusi pariwisata pada PDRB (%)	7,59
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)	80.758,35
	3. Meningkatnya investasi dan neraca perdagangan	Realisasi Nilai investasi (Rp. Trilyun)	5,3
		Neraca perdagangan (Rp Triliun)	-26,78
	4. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,66 – 3,37
	5. Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.598
		Inflasi	3,5 ± 1
	6. Menurunnya kemiskinan masyarakat	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20-19,63
	7. Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	Indeks Gini (Poin)	0,336-0,338
	8. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	24,71
	9. Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Gender (%)	93
	10. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	68
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	66,58-66,73
		Rata-rata lama sekolah (Poin)	7,75
		Harapan lama sekolah (Poin)	14,2
	2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (Poin)	67,5
		Prevelensi Stunting (%)	12-10



Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2024
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	1. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	100
		Ratio Elektrifikasi (%)	93
	2. Meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73,62
	3. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)	140
4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	63-64
		OPINI BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,3
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	85
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	85
		Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,4

Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.6 menunjukkan keselarasan tujuan dan sasaran sesuai amanat RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026.

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.3.1. Tema, Arah kebijakan dan Pembangunan Nasional 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.



Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian: a). Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%; b). Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
 - b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
 - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0); MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.



3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter; MP Pengelolaan Terpadu UMKM; MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan); Transformasi Digital.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
- b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
- b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3; MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
- b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
- c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
- d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
- e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;



f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.

7. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:

- a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
- b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
- c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Ibu Kota Nusantara; MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

4.3.2. Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi



Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.



Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;



- 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;



- 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) peningkatan ketersediaan
 - 6) n dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan



daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
 - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
 - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,
 - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,



- Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan
 - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
 - 4) prestasi olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan



- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;



- 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) transportasi perkotaan; dan
 - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
 - c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut; dan
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.3.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2024 disusun dengan mempedomani RPD 2024-2026 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2022 serta memperhatikan RKP 2024.

Selaras dengan Tema dan arah kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun 2024 adalah : **“SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILU KEPALA DAERAH 2024 UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”**

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPD 2024-2026 serta dukungan untuk suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows priority programs*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPD Provinsi NTT 2024-2026.

Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2024, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2024 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka



waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.

Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah.

4.3.4. Prioritas Daerah RKPD 2024 Provinsi NTT

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro Pembangunan Daerah pada tahun 2024 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam empat Prioritas Daerah (PD).

Pertama	:	Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial
Kedua	:	Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
Ketiga	:	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana
Keempat	:	Reformasi Birokrasi

Empat Prioritas Daerah (PD) dimaksud selanjutnya dijabarkan dan disinergikan dengan tujuh Prioritas Nasional, sebagai berikut:

PD1	:	Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.
PN 1	:	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung : Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).
PN 2	:	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial).

PD2 : Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : penurunan prevalensi stunting).

PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP, menurunkan gizi kurang, gizi buruk, menurunnya prevalensi stunting, rasio tenaga kesehatan, rasio tenaga pendidikan dan distribusi serta meningkatkan rata-rata lama sekolah, APM, APS).

PD3 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana

PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang didukung : Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).

PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa dan peningkatan pendapatan masyarakat).

PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial).

PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (indikator yang didukung : peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT)

PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (indikator yang didukung (cakupan desa/kelurahan tangguh bencana, rasio taruna siaga bencana, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT setiap tahun, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT di kawasan pariwisata estate, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah, cakupan pembangunan TPA/TPSP/SPA terbangun lingkup provinsi, cakupan limbah domestik yang tertangani, persentase pengurangan dan



penanganan sampah, cakupan lahan kritis yang tertangani, cakupan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial).

PD4 : Reformasi Birokrasi dan sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah.

PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).

PN 7 : memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ((indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE)

Empat Prioritas Daerah dalam RKPD 2024 untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan yang merupakan Isu Strategis Pembangunan. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah:

A. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% (yoy), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang mencapai Rp 7,32 juta jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.10,66 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata-rata nasional.

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber



daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

a. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian. Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.

Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT 47.931,54 km² atau 4.739.174 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1,5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006.

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil (Dinas Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan.



Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian dari subsistem dan intermedier/semi komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertaniandengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.

b. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya



masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

c. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset-aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.

d. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun,



meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 70,81%.

e. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang *right-sizing* adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. *Right-sizing* organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi.

Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak



buruk dari “kebiasaan lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif.

Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu menerapkan sistem *e-government* untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem secara digital sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandardisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi-regulasi yang memiliki tujuan yang sama.

f. Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan demokratisasi sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Konsep Pilkada secara langsung hal ini merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Dalam perkembangannya muncul sebuah ide untuk melakukan setralisasi (penyatuan) pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Konsep ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tepatnya Pasal 201 yang mengatur secara limitatif jadwal pelaksanaan Pilkada serentak. Penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2015, kemudian tahap kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya secara bertahap gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018, berikutnya tahun 2020, hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara serentak nasional untuk pilkada di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Selanjutnya dalam Pasal 166 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.3.6 Fokus per Perangkat Daerah

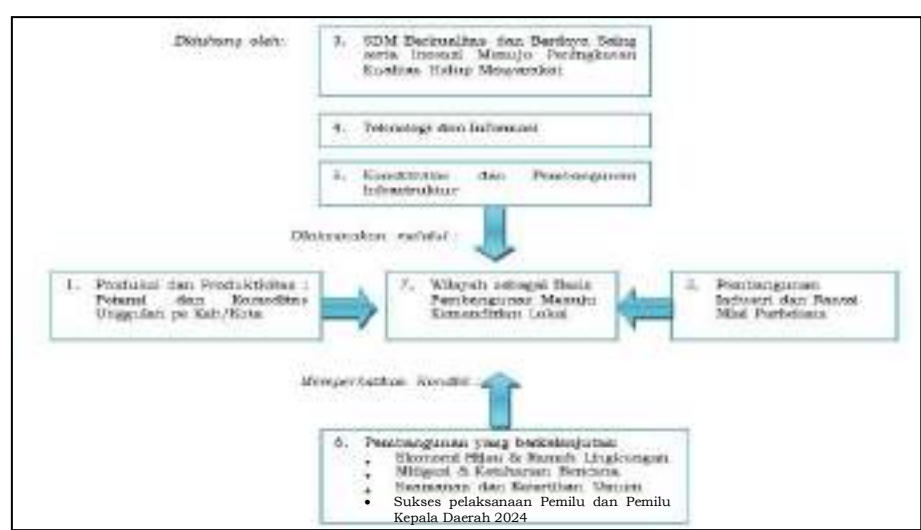
Fokus pembangunan Tahun 2024 adalah pada pencapaian Program Strategis dan Unggulan yang berbasis kemandirian lokal sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Provinsi NTT Tahun pada Perangkat Daerah Utama. Perangkat daerah lain adalah pendukung di dalam pencapaian program strategis. Dengan demikian, semua sumber daya difokuskan pada pencapaian indikator dan target program-program strategis tersebut.

Dengan demikian, masing-masing Prioritas daerah dijabarkan dalam Fokus Kegiatan dan usulan yang akan dikelompokkan berdasarkan:

1. Konektivitas Wilayah;
2. Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan;

3. Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata; dan
4. Peningkatan Kualitas hidup Manusia, termasuk didalamnya peningkatan prestasi olahraga.
5. Reformasi Birokrasi dan Sukses pelaksanaan Pemilu serta Pemilu Kepala Daerah.

Adapun kerangka pikir penentuan Fokus dan usulan adalah dengan memperhatikan potensi dan komoditas unggulan per Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi serta Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur yang memadai serta pembangunan industry dan rantai nilai pariwisata sebagai *primemover* untuk pembangunan wilayah menuju kemandirian lokal. Adapun kondisi-kondisi khusus yang perlu menjadi perhatian adalah prinsip pembangunan yang berkelanjutan dari sisi ekonomi hijau dan ramah terhadap lingkungan, adanya mitigasi dan ketahanan terhadap multi bencana, keamanan dan ketertiban umum yang kondusif serta sukses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024 seperti pada Gambar 4.10 di bawah ini



Gambar 4.10 Kerangka Pikir Penentuan Fokus dan Usulan Tahun 2024

Dengan peta sebaran lokasi prioritas RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 pada 22 Kabupaten/Kota dapat di lihat pada Gambar 4.11 (Wilayah Flores,

Lembata dan Alor), Gambar 4.12 (Wilayah Timor, Rote Ndao dan Sabu) dan Alor) dan Gambar 4.13 (Wilayah Sumba) yang berdasarkan Kabupaten/Kota se NTT di bawah ini:



Gambar 4.11 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Flores, Lembata dan Alor



Gambar 4.12 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Timor, Rote dan Sabu



Gambar 4.13 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Sumba

4.4 INOVASI DAERAH

Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 Provinsi NTT, maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Perencanaan pembangunan sebagai salah satu produk kebijakan, penting menerapkan "planning by research dan research based policy" agar kebijakan menjadi terukur, keberlanjutan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak selesai/gagal. Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan juga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018. Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan



daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing-masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovatif untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh Nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain :

1. Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri, pasti akan lebih survive. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan.
2. Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovation Government Award (IGA) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi dan laku inovatif di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Model pengukuran IID ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian pemerintah daerah dalam ekosistem inovasi secara keseluruhan. Gambaran utuh IID menunjukkan positioning inovasi di lingkungan pemerintah dari suatu daerah dari daerah-daerah lainnya. Hasil pengukuran IID ini, pada akhirnya dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasaran, serta mendorong usaha-usaha dan penciptaan ekosistem inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Indeks Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam IGA tahun 2022 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NTT dalam kerangka ekosistem inovasi selama dua tahun terakhir (2020/2021 dan 2021/2022). Dengan menjelaskan 26 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NTT terus dimonitor dari tahun ke tahun.

Tabel. 4.13 Profil Pencapaian Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2022

Daerah	Skor 2021	Predikat 2021	Skor 2022	Predikat 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur	53,38	Inovatif	59,76	Inovatif
Kabupaten Alor	3,2	Kurang Inovatif	9,1	Kurang Inovatif
Kabupaten Belu	54,04	Inovatif	46,08	Inovatif
Kabupaten Ende	10,4	Kurang Inovatif	0,4	Kurang Inovatif
Kabupaten Flores Timur	47,88	Inovatif	1,8	Kurang Inovatif
Kabupaten Kupang	27,08	Kurang Inovatif	38,76	Inovatif
Kabupaten Lembata	24,17	Kurang Inovatif	0	Tidak Dapat Dinilai
Kabupaten Malaka	5,6	Kurang Inovatif	45,4	Inovatif
Kabupaten Manggarai	49,63	Inovatif	47,56	Inovatif
Kabupaten Manggarai Barat	55,96	Inovatif	54,65	Inovatif
Kabupaten Manggarai Timur	48,02	Inovatif	5,4	Kurang Inovatif
Kabupaten Nagekeo	2,8	Kurang Inovatif	52,8	Inovatif
Kabupaten Ngada	11,2	Kurang Inovatif	41,96	Inovatif
Kabupaten Rote Ndao	34,86	Inovatif	36,11	Inovatif
Kabupaten Sabu Raijua	15,04	Kurang Inovatif	33,98	Kurang Inovatif
Kabupaten Sikka	23,29	Kurang Inovatif	43,36	Inovatif
Kabupaten Sumba Barat	0,8	Kurang Inovatif	35,22	Inovatif

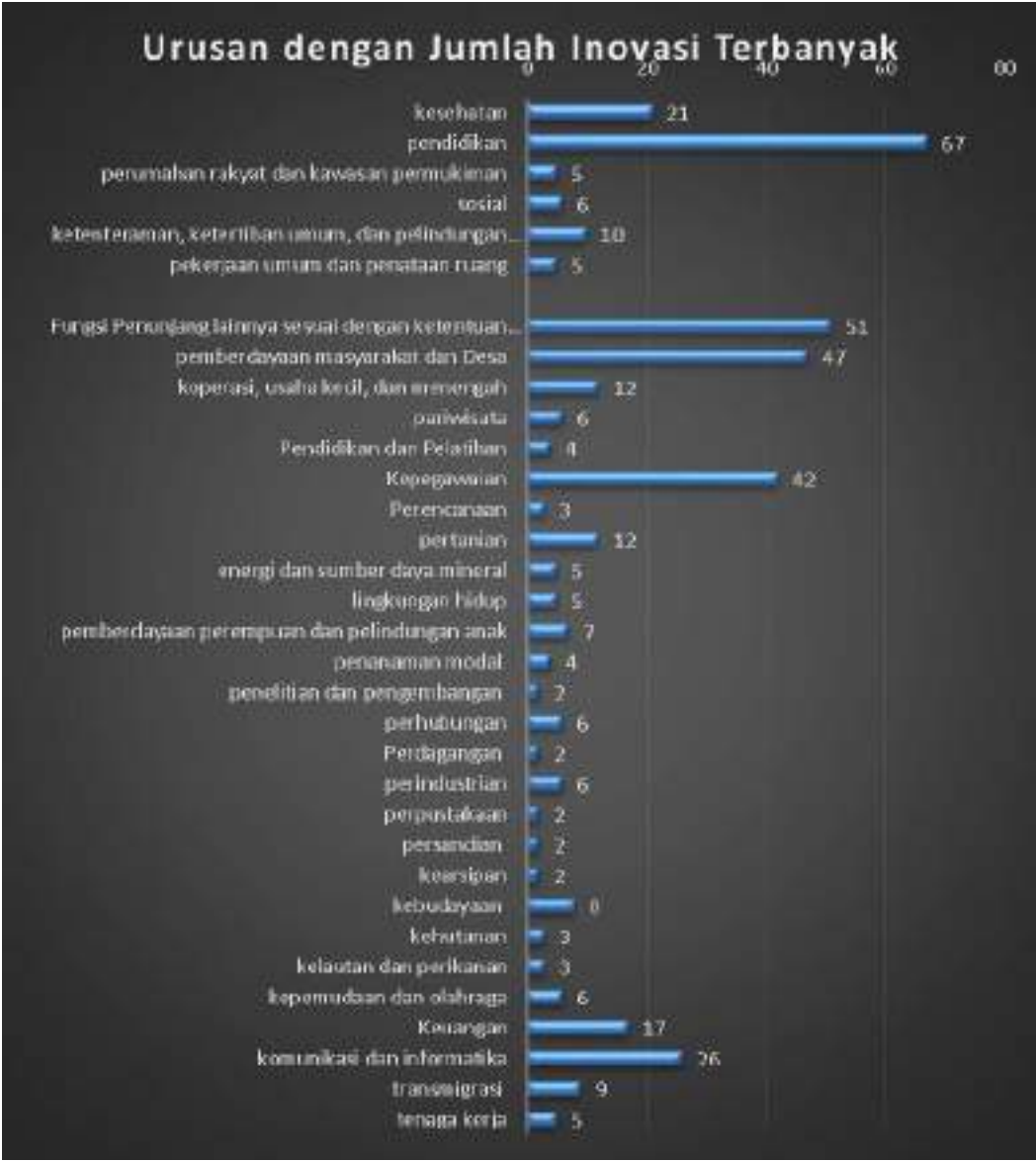


Kabupaten Sumba Barat Daya	52,81	Inovatif	39,6	Inovatif
Kabupaten Sumba Tengah	29,88	Kurang Inovatif	41,96	Inovatif
Kabupaten Sumba Timur	58,36	Inovatif	46,88	Inovatif
Kabupaten Timor Tengah Selatan	3,56	Kurang Inovatif	12,5	Kurang Inovatif
Kabupaten Timor Tengah Utara	37,56	Inovatif	43,2	Inovatif
Kota Kupang	47,34	Inovatif	43,24	Inovatif

Sumber BSKN Kemendagri, Tahun 2022

Hasil perhitungan indeks inovasi daerah tahun 2021 Pemerintah Provinsi NTT menempati peringkat 12 dari total 34 Provinsi dengan raihan nilai 53,5 dan mendapat predikat inovatif. Pencapaian ini mengalami kenaikan pada tahun 2022 , dimana Pemerintah Provinsi NTT memperoleh raihan nilai 59,6 dan mendapat predikat inovatif. Dari hasil perhitungan indeks inovasi tahun 2022 terdapat 7 kabupaten/ kota yang memperoleh predikat kurang inovatif dan 15 kabupaten kota yang memperoleh predikat inovatif.

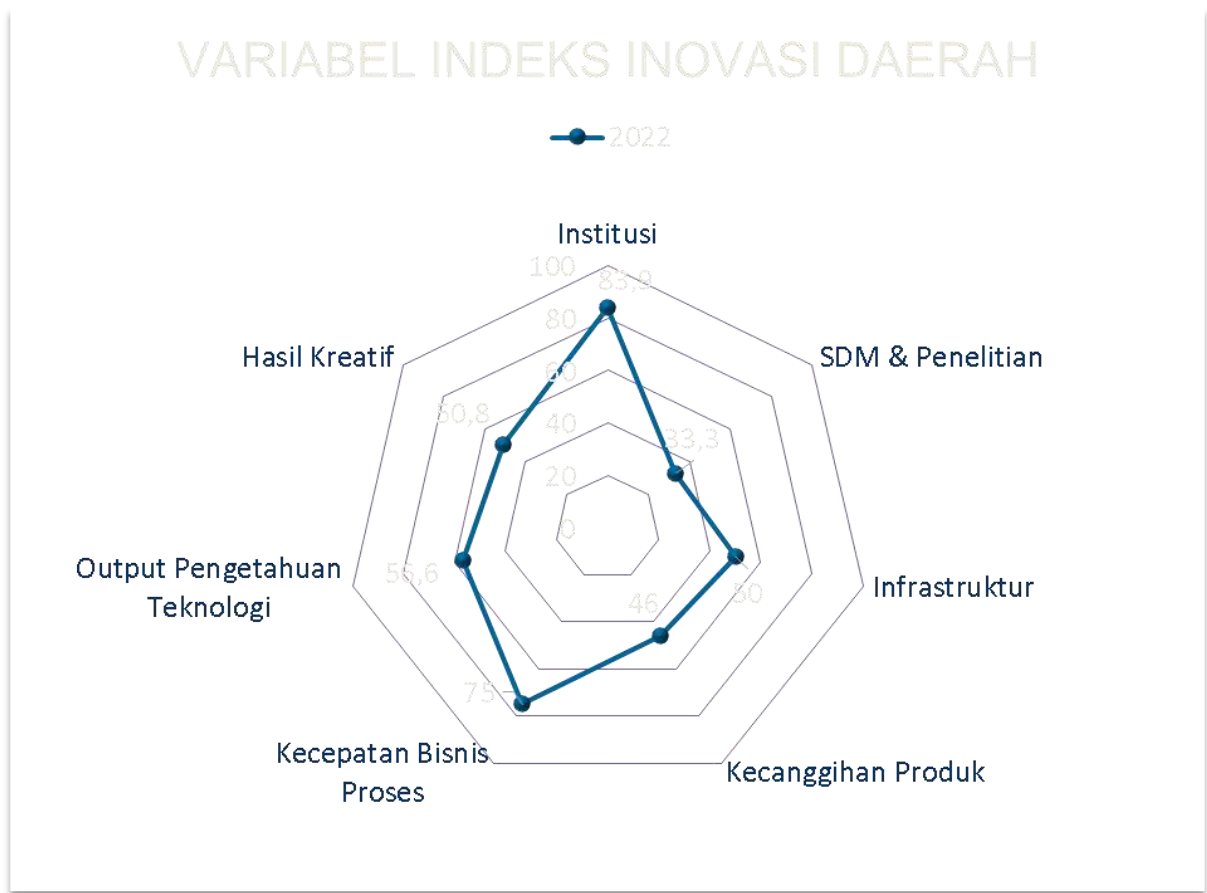
Tabel. 4.12 Profil Inovasi Pemerintah Provinsi NTT Berdasarkan Urusan



Tercatat 128 inovasi tahun 2022 yang dapat terkirim dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Dari 128 inovasi yang diusulkan dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya, urusan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan memiliki inovasi paling banyak (67 inovasi) dan urusan penunjang memiliki jumlah inovasi paling sedikit.

Ada 7 (tujuh) aspek penilaian yang menjadi area fokus untuk penilaian yaitu: Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Hasil

Kreatif (Gambar 4. 14). Ketujuh aspek ini dijalin pemenuhannya menjadi jejaring laku inovasi yang dilakukan di dalam sebuah institusi/perangkat daerah lingkup provinsi NTT.



Source: <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard>
(Akses tanggal 1 Desember 2022)

Gambar 4.14 Aspek Penilaian Indeks Inovasi

berdasarkan variabel ukur indeks inovasi daerah tahun 2022, Provinsi NTT unggul pada variabel institusi masih rendah pada variabel sdm & penelitian serta kecanggihan produk serta variabel infrastruktur, output iptek dan hasil kreatif yang belum maksimal.

Pada RKPD Tahun 2024, khusus untuk Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam periode 2021 – 2023 antara lain TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi), Bambu, Pariwisata dan Desa Model dengan rincian masing – masing sebagai berikut:

4.4.1 TANAM JAGUNG PANEN SAPI POLA KEMITRAAN (TJPS-PK)

1. Input

A. Regulasi

Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Stakeholder Terkait, tentang Ekosistem Pembiayaan Sektor



Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Non Kredit Usaha Rakyat (Non-KUR) atau Pembiayaan Lainnya, tanggal 19 November 2021. Peraturan Gubernur NTT Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi.

B. Anggaran

Sumber anggaran berasal dari Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT setiap Tahun Anggaran untuk dukungan Manajemen pelaksanaan TJPS Pola Kemitraan:

1. Kemitraan Bank NTT (Skin Kredit Mikro Merdeka)
2. Kredit Usaha Rakyat dari Himpunan Bank Negara (Himbara)
3. Offtaker untuk pembelian hasil produksi jagung
4. Sumber Daya Manusia

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ini adalah :

1. Petani sebagai Wirausaha Mandiri
2. Pendamping Lapangan (PL) TJPS-PK
3. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan Kabupaten
5. Tim Ahli TJPS dan Tim Sekretariat TJPS
6. Tim Pelaksana TJPS tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa Pelaksana.

C. Institusi

4 (empat) Pilar utama yang mendukung Gerakan TJPS Pola Kemitraan yaitu : Akademisi (Tim Ahli), Bussines (Offtaker), Community (Petani/Wirausaha Mandiri), Government/Pemerintah (Pendamping Lapangan (PL), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Bidang Tanaman Pangan Provinsi dan Kabupaten. Didukung stakeholders terkait.

D. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang mendukung dalam Gerakan TJPS Pola Kemitraan adalah Benih (Jagung Hibrida Varietas Unggul), Pupuk Urea, Pupuk NPK, Pupuk Hayati Padat/Cair, Herbisida (Kontak dan Selektif), Insektisida (Belalang dan Ulat Grayak/Tentara (FAW)), Bahan dan peralatan (karung dan terpal), dan Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Pra-tanam dan Pasca Panen).



2. Proses

a. Proses pengawalan dan pendampingan pada setiap musim tanam dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi dan identifikasi;
- 2) Verifikasi, rekapitulasi dan pengusulan oleh PL-TJPS;
- 3) Verifikasi dan Pengesahan daftar CWCL oleh Bidang Tanaman Pangan serta Surat;
- 4) Pengantar dari Dinas yang membidangi tanaman pangan untuk diteruskan proses ke Bank;
- 5) Proses SLIK dan verifikasi lapangan oleh Perbankan;
- 6) Pemberkasan dan proses RAB oleh PL-TJPS, Perbankan dan Offtaker;
- 7) Buka Rekening, Akad Kredit dan Pendebetan ke rekening Wiman;
- 8) Penyediaan dan distribusi Saprodi oleh Offtaker;
- 9) Tanam, pemeliharaan, panen, pasca panen oleh petani/wirausahawan mandiri;
- 10) Pembelian hasil wiman oleh Offtaker dan transfer uang ke rekening petani/wirausahawan mandiri;
- 11) Pendebetan penjaminan kredit petani/wiman sesuai RAB oleh Bank;
- 12) Informasi pendapatan/sisa uang di rekening Wiman;
- 13) Petani/Wiman menggunakan sebagian pendapatan untuk integrasi/membeli ternak dan juga untuk memenuhi kebutuhannya dengan pola pemeliharaan : paket 1 (ternak sapi 1 ekor); paket 2 (ternak babi 3 s/d 5 ekor + ternak ayam 25 ekor); paket 3 (ternak kambing 3 s/d 5 ekor ditambah ayam 25 ekor); dan
- 14) PL TJPS-PK menyampaikan laporan secara periodik perkembangan areal tanam, areal panen, produktivitas, produksi, penjualan dan pembelian/integrasi ternak sesuai form pelaporan.

3. Masalah

Masalah yang dihadapi dari kegiatan gerakan TJPS-Pola Kemitraan adalah Kolaborasi berbagai stakeholders terkait dalam suatu ekosisten masih memerlukan proses bersama/ belum berjalan optimal. Merubah petani/wirausahawan mandiri yang sudah terbiasa menerima bantuan sarana produksi dari pemerintah ke bantuan permodalan usaha berbasis kredit butuh proses dan waktu. Tahapan proses yang masih terkendala pada SOP masing-masing stakeholder dalam suatu luasan usaha tani jagung berskala ekonomi.

4. Output

Adapun output dari kegiatan ini adalah tercapainya pengembangan areal tanam jaging TJPS Pola Kemitraan Tahun 2022 seluas 105.000 Ha di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Outcome

Outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya produktivitas jagung hibrida dengan target produktivitas minimal 7 Ton/Ha.

4.4.2 REVITALISASI BALAI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) NOELBAKI

1. Input

a. Regulasi

- 1) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Timur Nomor: 413.2/06.1/DPMD.4.2/ 2.2021 Teknologi Tepat Guna Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025;
- 2) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 413.2/81/DPMD.4.2/7.2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 345 KEP/HK/2020 tentang Kelompok Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;



- 4) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259A/KEP/HK/2020 tentang Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Biogas dari
- 5) Kotoran Ternak di Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020;
- 6) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259A/KEP/HK/2021 tentang Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Biogas dari Limbah Ternak di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
- 7) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 231/KEP/HK/2021 tentang Kelompok Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- 8) Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Menengah Negeri 2 Kupang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421.5/SMK.2/239/VIII/2021 dan Nomor: 413.2./V.1/90/DPMD/IX/2021, tentang Program Magang dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang.

b. Anggaran

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 911/9/ DPA/BKUD2/2021, tentang DPA - SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp. 1.478.714.624 . Proses dalam mendukung penganggaran inovasi ini, dapat dilihat dari progress penganggaran untuk pengembangan TTG sebelum dilakukan rencana inovasi (2018-2020) sampai dengan persiapan inovasi (2021-2022) hingga implementasi tahun inovasi (2023-2025), yang dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut:



Tabel 4.13 Alokasi Anggaran Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki

Kegiatan	Tahun dan Anggaran (Rupiah)							
	Sebelum Inovasi				Tahun Rencana Inovasi			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pengembangan Inovasi Peralatan TTG	38.510.000	227.261.000	200.629.000	163.480.618	200.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Pelatihan dan Pemasangan Sarana Alternatif Biogas	65.250.000	198.420.000	129.685.000	115.233.976	145.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Pendirian gedung	-	-	-	1.195.999.970	28.530.000.000	-	-	-
Pengadaan Meubeler	-	-	-	-	-	1.500.000.000	-	-
Pengadaan Peralatan Kerja untuk Bengkel	-	-	-	-	-	3.500.000.000	-	-
Pengadaan Kendaraan Operasional Balai	-	-	-	-	-	500.000.000	-	-
Total	103.750.000	425.681.000	330.314.000	1.478.714.624	28.175.000.000	5.950.000.000	450.000.000	450.000.000

- c. Sumber Daya Manusia
- Dukungan SDM terhadap Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025, terdiri dari:
- 1) Pengarah : 1 orang

2) Penanggung Jawab : 1 orang

3) Koordinator Umum dan Wakil Koordinator Umum : 2 orang

4) Kepala Unit : 4 orang

5) Teknisi Mesin dan Peralatan: 2 Orang

6) PTT: 1 Orang
- d. Institusi
- Keterlibatan Aktor Inovasi antara lain:
- 1) Kepala Dinas DPMD Provinsi NTT sebagai Pengarah Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 orang);

2) Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa sebagai Penanggungjawab Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat



- Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 orang);
- 3) Kasie Pengembangan dan Pendayagunaan SDA dan TTG dan Kasie Bina Sarana Prasarana Desa, sebagai koordinator dan wakil koordinator umum Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2 orang); dan
 - 4) Para Kepala Unit Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (4 orang).
- e. Sarana Prasarana
- Bengkel Peralatan TTG, Asrama dan Aula. Lahan Persawahan, Gedung Display, Kolam Pemancingan dan Sarana Publik Lainnya.

2. Proses

- a. Proses yang dilakukan
- Jangka waktu pelaksanaan dari tahun 2021-2025. Dimulai dengan tahapan persiapan inovasi tahun 2021-2022, dengan fokus pada sarana prasarana Balai TTG. Tahun 2023-2025 adalah fokus pada pengelolaan Balai TTG sebagai salah satu sumber PAD bagi daerah, rincian kegiatan sebagai berikut:
- 1) Tahun 2021:
 - Pembangunan Gedung Display;
 - Penandatanganan MOU Kerjasama Magang Siswa SMK Kejuruan dan Mahasiswa Politeknik;
 - Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang; dan
 - Produksi Peralatan TTG skala kecil.
 - 2) Tahun 2022:
 - Pembangunan Gedung Kantor dan Aula;
 - Pembangunan Gedung Asrama;
 - Pembangunan Bengkel Besi dan Kayu;
 - Pembangunan Gedung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - Pembangunan Kolam Pemancingan dan Resto Apung;
 - Pengadaan Peralatan Kerja Besi dan Kayu;



- Pengadaan Meubeler Kantor, Aula dan Asrama -
Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang.

3) Tahun 2023-2025:

- Produksi Peralatan TTG (Peralatan Kecil, Sedang dan Besar);
- Penjualan Peralatan TTG;
- Penjualan Produk-Produk BUMDES se-NTT;
- Pemasaran penggunaan Aula dan Asrama;
- Pemasaran Areal Kolam Pemancingan dan kuliner;
- Pembentukan POSYANTEK tingkat Kecamatan dan Desa; dan
- Peningkatan Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang.

3. Masalah

Kecepatan inovasi sangat ditentukan dengan ketersediaan anggaran, karena sebagian besar anggaran dibutuhkan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai dapat menciptakan peningkatan produktivitas dan peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pengembangan dan inovasi peralatan TTG. Hasil inovasi yang baik dapat terlihat dengan adanya revitalisasi fisik dan manajemen pengelolaan yang lebih modern untuk memungkinkan pada masyarakat secara maksimal dapat terwujud. Oleh karenanya dasar inovasi ini adalah pembangunan fisik di persiapan inovasi dan kemudian memasuki tahun inovasi dengan penguatan pada manajemen dan pelayanan masyarakat.

4. Output

Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan dalam wujud kemanfaatan inovasi sebagai berikut:

- a Melayani kebutuhan pelatihan teknis dan ketrampilan pembuatan peralatan TTG;
- b Melakukan pengembangan/perekayaan dan penerapan TTG (merancang, memproduksi dan memasyarakatkan) baik yang dihibahkan ke kelompok masyarakat dan juga untuk komersial;



- c Melayani penyewaan sarana aula dan asrama untuk pertemuan, yang diselenggarakan oleh Dinas PMD atau instansi/lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta, dan organisasi pemuda/kemahasiswaan, di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, serta Kabupaten lainnya di NTT;
- d Menerima pesanan peralatan TTG yang dibutuhkan pihak luar berdasarkan pengembangan alat yang telah dibuat;
- e Menyediakan jasa pelayanan pertukangan dan bengkel TTG;
- f Melakukan pengelolaan lahan persawahan terpadu;
- g Melakukan pemasaran peralatan TTG ke berbagai pihak seperti desa (APBDes), BUMN (CSR);
- h Mengadministrasi hasil pengelolaan sarana dan prasarana Balai TTG untuk penyetoran PAD Pemerintah Provinsi NTT; dan
- i Menerima dan menyetorkan PAD sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Outcome

Tersedianya sarana dan prasarana pada Balai Pelatihan TTG yang representatif dan modern dalam rangka pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan produk unggulan yang akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa. Hal ini akan berdampak adanya penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu adanya peningkatan PAD daerah dari aktifitas TTG dan sarana pendukung lainnya.

4.4.3 PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN BAMBU

1. Input

- a. Regulasi
 - 1) PKS dan MOU dengan PMD
 - 2) PKS dan MOU dengan DLHK

- b. Anggaran

Tahun 2021 Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8,6 miliar untuk pemberdayaan kelompok perempuan. Dengan dukungan dana ini telah dihasilkan 2,5 juta bibit bambu di tujuh kabupaten, yaitu Manggarai,



Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.

- c. Sumber Daya Manusia
Yayasan Bambu Lestari (Staf Bali, Korkab, Fastek, Fasdes), dan Mama Bambu
- d. Institusi
Gubernur, Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH, dan PKK
- e. Sarana Prasarana
 - 1) HP (Handphone) dibagikan ke 350 mama bambu untuk kebutuhan digitalisasi input data dan untuk media pembelajaran.
 - 2) Polybag
 - 3) Paranet/naungan

2. Proses

Proses yang dilakukan:

- a. Pengajuan Proposal dan anggaran tahun 2021
- b. Teknis Lapangan
 - 1) Survey & assessment
 - 2) Sekolah Lapang
 - 3) Pembibitan Keluarga

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8,6 miliar untuk pemberdayaan kelompok perempuan. Dengan dukungan dana ini, telah dihasilkan 2,5 juta bibit bambu di tujuh Kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pembibitan dan penyemaian termaksud sinergis dengan program penguatan KPH dan percepatan perhutanan sosial.

- 4) Monev Lapangan
- c. Laporan Pelaksanaan Program 2021

3. Masalah

Tantangan yang dihadapi lebih pada siklus pencairan anggaran, perubahan musim, sebaran dan kapasitas sumber bibit, serta dinamika kelompok yang kemudian membutuhkan penyesuaian target bibit yang diproduksi baik dari sisi jumlah maupun jenis.



4. **Output**

Tersedianya 2,5 juta bibit bambu sehat dan siap tanam dengan berbagai jenis (Petung, Pering & Aur) di 7 Kabupaten.

5. **Outcome**

- a. Komitmen lintas stakeholder yaitu Gubernur, Bupati, DPMD, DLHK, KPH, PKK) dalam pelaksanaan program desa wanatani bambu.
- b. Komitmen mama bambu dalam implementasi pelaksanaan program (Pembibitan, pemantauan dan konteks digitalisasi)
- c. Memberikan sumber pendapatan alternatif baru bagi mama bambu dan keluarga dari kegiatan pembibitan
- d. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan mama bambu dalam budidaya bamboo
- e. Peningkatan peran mama bambu dalam musyawarah pembangunan tingkat desa.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA





BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan mendukung prioritas provinsi dan nasional menjadi bagian kabupaten/kota dalam menyusun RKPD tahun 2024. Pada bab ini, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan mendukung prioritas dan sasaran provinsi dan nasional yang disertai dengan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat makro. Analisis terhadap capaian indikator makro digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Tema pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2024 adalah **“PENGUATAN EKONOMI DAN PEMANTAPAN KUALITAS PELAYANAN DASAR”**.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan empat prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagai berikut:

- Prioritas Pertama : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
- Prioritas Kedua : Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- Prioritas Ketiga : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
- Prioritas Keempat : Reformasi birokrasi.

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, Pemerintah menetapkan tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Untuk mencapainya ditetapkan tujuh (7) Prioritas Nasional sebagai berikut :

- 
- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
 - PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PN. 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PN. 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 - PN. 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam kaitan dengan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, dalam RKP tahun 2024, Pemerintah menetapkan target sasaran pembangunan makro daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Pertumbuhan Ekonomi 4,55-5,35, Penurunan Kemiskinan 20-19,63%, Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,66-3,37.

Sesuai dengan amanat dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, dan selaras dengan Rancangan Awal RKP 2024, maka pada tahun rencana 2024, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan capaian indikator Makro sebagai berikut :

- 1. Pertumbuhan Ekonomi : 4,55-5,35%
- 2. Tingkat Kemiskinan : 20-19,63%
- 3. Tingkat Pengangguran terbuka : 2,66-3,37%

Dengan target capaian sasaran pembangunan yang digariskan dalam RPD 2024, arahan pembangunan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan memperhatikan besaran kontribusi Kabupaten/Kota terhadap capaian Provinsi NTT secara umum dan dengan memperhatikan trend performa Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir.





Dimana peta sebaran lokasi prioritas RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 pada 22 Kabupaten/Kota dapat di lihat pada Gambar 1 Wilayah Flores, Lembata dan Alor Gambar 2 Wilayah Sumba, dan Gambar 3 Wilayah Timor, Rote Ndao dan Sabu Raijua, yang tersebar di Kabupaten/Kota se NTT di bawah ini :

Gambar 5.1 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 di seluruh Kabupaten wilayah Flores, Lembata dan Alor



Gambar 5.2 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Sumba



Al

Gambar 5.3 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Timor, Rote Ndao, dan Sabu Raijua



5.1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin besar pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan semakin besar output barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 ekonomi daerah tumbuh sebesar 5,24% lebih tinggi 0,13 persen jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 yang sebesar 5,11% meskipun masih sedikit berada dibawah target RPJMD sebesar 5,87%. Pada Tahun 2020, ekonomi daerah mengalami kontraksi sebesar - 0,85%. Perkembangan yang tidak diduga dan tidak ada presedennya ini juga dialami pada level nasional dan global, khususnya karena dalam rangka antisipasi meluasnya virus covid-19, pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk membatasi aktivitas sosial yang mendorong melambatnya aktivitas ekonomi.

Gambar 5.4 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2023



Sumber : Berita Resmi Statistik , BPS 2023

Pertumbuhan ekonomi NTT tahun triwulan I-2023 tumbuh sebesar 3,73 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Industri Pengolahan yaitu sebesar 6,55 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 5,25 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan I-2023 mengalami kontraksi sebesar 6,15 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 3,68 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam sebesar 61,91 persen. Dengan memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi kabupaten/Kota se-NTT sepanjang 2020-2023, dan dalam rangka mencapai target pertumbuhan di tahun rencana 2023, maka arahan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota adalah antara 3,09% (terendah) sampai 4,11% (tertinggi). Tabel 5.1 menampilkan target pertumbuhan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2023.

Tabel 5.1 Prediksi Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Tahun 2022-2024

Al



KABUPATEN/KOTA	TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2024	
	low	high
Sumba Barat	4.45%	5.25%
Sumba Timur	5.02%	5.82%
Kupang	4.82%	5.62%
Timor Tengah Selatan	4.55%	5.35%
Timor Tengah Utara	4.86%	5.66%
Belu	4.49%	5.29%
Alor	4.71%	5.51%
Lembata	5.05%	5.86%
Flores Timur	5.93%	6.74%
Sikka	4.31%	5.11%
Ende	4.57%	5.37%
Ngada	4.61%	5.41%
Manggarai	5.43%	6.24%
Rote Ndao	4.13%	4.93%
Manggarai Barat	3.61%	4.40%
Sumba Tengah	5.07%	5.87%
Sumba Barat Daya	3.91%	4.70%
Nagekeo	4.54%	5.34%
Manggarai Timur	3.96%	4.76%
Sabu Raijua	4.64%	5.44%
Malaka	3.97%	4.77%
Kota Kupang	4.25%	5.05%
NTT	4.55%	5.35%

Sumber :BPS dan Hasil Analisis, 2023

Meskipun momentum pemulihan ekonomi akan pada tahun rencana 2024 diprediksi terjadi secara merata pada kabupaten/kota, namun variasi akan ditentukan oleh karakteristik wilayah masing-masing. *Rebound* ekonomi di Nusa Tenggara Timur diperkirakan akan lebih cepat terjadi pada wilayah yang merupakan pusat aktivitas perdagangan dan jasa, dan pada daerah-daerah yang memiliki luas wilayah relatif kecil. Daerah-daerah yang sektor jasanya tumbuh juga diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ekonominya masih sangat tergantung kepada sektor primer.

Momentum pemulihan dampak pandemi Covid-19 perlu dimanfaatkan dengan mendorong sektor-sektor yang cepat tumbuh, memiliki rantai keterkaitan industrial yang panjang dan banyak menyerap tenaga kerja. Sektor-sektor ekonomi terutama sektor perdagangan (sekunder) dan jasa (tersier) perlu di dorong untuk tumbuh kembali. Namun di atas itu semua, mendorong peningkatan produktivitas sektor primer mutlak dilakukan karena dua hal. *Pertama*: sektor primer masih menjadi sektor terbesar dalam

Al



ekonomi daerah sehingga peningkatan produktivitas sektor ini akan memberi dampak paling besar dalam upaya pemulihan dan pertumbuhan; dan *kedua*: meningkatkan ketahanan pangan daerah menjadi salah satu pelajaran penting yang dapat diambil dari pandemi Covid-19, karena ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas penting pada masa krisis. Mendorong meningkatnya produktivitas sektor primer, selain dalam rangka mengusahakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga menjamin ketahanan Nusa Tenggara Timur menghadapi potensi bencana yang mungkin masih akan terjadi di masa yang akan datang.

5.2 PENDUDUK MISKIN

Jumlah penduduk miskin sepanjang 2013 sampai 2022, jumlah maupun persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur cenderung memiliki trend yang konstan, tidak signifikan meningkat namun juga tidak mengalami pengurangan yang signifikan. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Provinsi NTT adalah dari sektor pengangguran terselubung yaitu sektor pekerja tanpa upah (angka pengangguran tidak naik karena pekerja tetap bekerja akan tetapi tidak diupah, sehingga berkontribusi pada angka kemiskinan). Dengan demikian, data pada September 2012, terdapat 998 ribu jiwa lebih penduduk Miskin yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini setara dengan 20,41% dari total Penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun tersebut. Sepanjang periode September 2012 sampai dengan September 2014 terlihat trend penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada September 2014, jumlah Penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur berkurang menjadi 992 ribu orang, atau setara dengan 19,60% dari total populasi Nusa Tenggara Timur. Namun kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi pada Maret 2015. Jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 1.160 ribu jiwa, atau setara dengan 22,61% dari total populasi Nusa Tenggara Timur. Periode Maret 2015 adalah periode dimana persentase penduduk Miskin di NTT tercatat paling tinggi sepanjang 2012-2021 sedangkan pada periode September 2015 merupakan periode dimana jumlah Miskin di Nusa Tenggara Timur tertinggi sepanjang 2012-2021. Pada Periode tersebut jumlah orang miskin meningkat menjadi 1,161 ribu jiwa, meskipun secara

Al

persentase, berkurang 0,03 poin persen dibandingkan semester sebelumnya 22,58%.

Gambar 5.5 Perkembangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Maret 2013 - September 2022



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 16 Januari 2023

Sepanjang periode Maret 2013 sampai dengan September 2022, terlihat trend penurunan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur, walaupun bila ditinjau dari jumlah penduduk miskin mengalami fluktuatif dari rentang waktu Maret 2013 sampai September 2022. Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur kembali terjadi pada periode Maret 2020 sebesar 20,90% sampai September 2020 menjadi 21,21% dan mengalami kenaikan lagi pada periode September 2022 menjadi 20,23. Kenaikan persentase pada periode Maret dan September 2020 dipengaruhi terutama oleh Kontraksi pada pertumbuhan ekonomi sehingga tumbuh - 2,27% (*y on y*).

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 1,15 juta orang, meningkat 17,6 ribu orang terhadap Maret 2022 dan meningkat 2,9 ribu orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,84 persen, naik menjadi 9,00 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 23,86 persen, naik menjadi 24,11 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin

Al

September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 4,6 ribu orang (dari 126,80 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 131,36 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 13,0 ribu orang (dari 1.004,83 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 1.017,81 ribu orang pada September 2022). Dengan memperhatikan performa pengentasan kemiskinan pada Kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur, dan dalam rangka mendukung pencapaian target pengentasan kemiskinan Nusa Tenggara Timur di tahun rencana 2024, maka target penurunan kemiskinan untuk Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2024 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 5.2. di bawah ini :

Tabel 5.2 Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2023-2024

Wilayah	2022 (%)	2024 (%)
Sumba Barat	27.22	26.14
Sumba Timur	27.14	26.79
Sumba Tengah	34.66	31.97
Sumba Barat Daya	27.67	26.09
Lembata	28.33	24.94
Flores Timur	8.30	8.10
Sikka	12.45	12.09
Nagekeo	12.73	11.75
Ende	24.36	22.99
Ngada	12.29	11.84
Manggarai Timur	27.41	25.12
Manggarai Barat	16.71	16.62
Manggarai	20.50	19.06
Alor	20.31	20.07

Al



Wilayah	2022 (%)	2024 (%)
Sabu Raijua	28.71	28.27
Rote Ndao	29.18	26.90
Belu	14.84	14.63
Malaka	15.33	15.24
Timor Tengah Utara	24.42	21.05
Timor Tengah Selatan	25.44	21.30
Kupang	19.54	16.33
Kota Kupang	9.36	8.25
Nusa Tenggara Timur	20.09	15-12

Sumber : BPS dan Hasil Analisis, 2023

Tantangan terbesar Provinsi NTT adalah menjaga kelompok masyarakat miskin tidak menjadi semakin miskin dan masyarakat rentan miskin tidak masuk ke dalam kategori miskin pada saat dan pasca pandemi, serta bagaimana memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi untuk mengentaskan lebih banyak penduduk dari kemiskinan. Pemerintah daerah memiliki berbagai instrumen baik itu fiskal maupun kewenangan meregulasi untuk mencegah bertambahnya orang miskin. Akan tetapi, permasalahan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana meminimalisasi efek resesi ekonomi daerah bagi kelompok rentan.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melaksanakan program-program perlindungan sosial untuk melindungi kelompok-kelompok rentan miskin menjadi korban yang paling terdampak dari resesi ekonomi. Pilihan kebijakan jaring pengaman sosial dapat menjadi salah satu cara untuk memberi perlindungan kepada kelompok masyarakat miskin di masa-masa resesi, disamping kebijakan-kebijakan ekonomi daerah untuk menstimulasi kebangkitan ekonomi daerah pasca resesi.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan secara kolaboratif melalui 3 (tiga) pilar percepatan

Al

penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu: Pilar 1 : Komitmen Pemerintah, Pilar 2: Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran, Pilar 3: Pemantauan dan Evaluasi seperti pada Tabel 5.3 di bawah ini:

Tabel 5.3 Tiga Pilar Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pilar 1: Komitmen Pemerintah	Pilar 2: Konvergensi Program, Anggaran, dan Sasaran		Pilar 3: Pemantauan dan Evaluasi
	Tingkat Pusat	Tingkat Daerah	
- Program dan kegiatan dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022-2024. - Penetapan regulasi dan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem	- Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk urusan wajib. - Pengalokasian APBN dan pedoman penyusunan RKPD dan APBD terhadap pelayanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan. - Pemutakhiran data sasaran program. - Mendorong pelibatan sektor swasta dan masyarakat - Memastikan afirmasi pelaksanaan program terhadap kelompok rentan, antara lain lansia, penyandang disabilitas, anak, dan perempuan.	- Dukungan terhadap program nasional terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan. - Inovasi program komplementer /inisiatif daerah - Penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait. - Penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah	- Penetapan indikator capaian penghapusan kemiskinan ekstrem. - Penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan berkala - Evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten/kota

Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2023

5.3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Al

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Sejalan dengan mulai bangkitnya secara perlahan ekonomi di tahun 2021, TPT Provinsi NTT pada tahun 2021 tercatat 3,77%, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 4,28%, sedangkan pada Agustus 2022 sebesar 3,54 persen, turun 0,23 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Tabel 5.4 Angka TPT Kab/Kota se-NTT

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	
	TARGET TAHUN	
	2024 (low)	2024 (high)
Sumba Barat	0.39%	0.56%
Sumba Timur	2.90%	4.11%
Kupang	3.06%	4.34%
Timor Tengah Selatan	2.27%	3.22%
Timor Tengah Utara	3.37%	4.77%
Belu	3.55%	5.04%
Alor	1.20%	1.70%
Lembata	3.04%	4.31%
Flores Timur	2.34%	3.31%
Sikka	3.43%	4.87%
Ende	1.57%	2.23%
Ngada	2.51%	3.55%
Manggarai	2.43%	3.45%
Rote Ndao	2.68%	3.79%
Manggarai Barat	4.29%	6.09%
Sumba Tengah	0.54%	0.76%
Sumba Barat Daya	1.61%	2.28%
Nagekeo	0.56%	0.79%
Manggarai Timur	1.37%	1.94%
Sabu Raijua	0.69%	0.98%
Malaka	2.19%	3.11%
Kota Kupang	5.83%	8.26%
Nusa Tenggara Timur	2.66%	3.77%

Sumber : BPS dan Hasil Analisis, 2023

Pelambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 memberi dampak pada angka pengangguran di Nusa Tenggara Timur. Menurut data BPS,



Penduduk yang bekerja sebanyak 2,92 juta orang, meningkat sebanyak 0,11 juta orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (0,88 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian (1,02 persen poin). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 3,54 persen, turun 0,23 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 47,41 ribu orang (1,18 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (2,01 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (2,05 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,85 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (42,50 ribu orang).

Pada tahun rencana 2023, pemerintah dalam RPJMN 2023 menargetkan tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur menurun menjadi sebesar 7,5,0%. Penetapan target tersebut tidak lepas dari kalkulasi mengenai pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19 terhadap angka pengangguran. Upaya *recovery* ekonomi daerah difokuskan untuk kembali menstimulasi dunia usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja. Dalam RPD PProvinsi NTT tahun 2024-2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target penurunan angka pengangguran sebesar 2,66-3,37 pada tahun rencana 2024 jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun rencana 2024 untuk NTT sebesar 2,00%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Sejalan dengan mulai bangkitnya secara perlahan ekonomi di tahun 2021, TPT Provinsi NTT pada tahun 2021 tercatat 3,77%, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 4,28%. Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2021 menempati peringkat ke-tujuh sebagai provinsi dengan TPT terendah setelah Provinsi Sulawesi Tengah (3,75%), Bengkulu (3,65%), Papua





(3,33%), Sulawesi Barat (3,13%), Gorontalo (3,01%) dan Nusa Tenggara Barat (3,01%). Sehingga secara Nasional, kondisi TPT Provinsi NTT pada Agustus 2021 lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 6,49%.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Agustus 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2020. TPAK pada Agustus 2021 tercatat sebesar 73,78% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 70,11%.

5.6 FOKUS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT TAHUN 2024

5.6.1 Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata

Arahan umum untuk kabupaten kota dalam rangka mendukung pengembangan rantai nilai pariwisata adalah pengembangan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung pengembangan rantai pasok dan rantai nilai pariwisata melalui pengolahan komoditas unggulan daerah berskala menengah dan kecil. Fokusnya adalah penguatan terhadap pariwisata estate untuk Tahun 2024 adalah dukungan amenities, penguatan promosi untuk 22 kabupaten/kota, pameran ekonomi kreatif dan festival. Untuk komoditas unggulan pertanian dan peternakan, agar kabupaten/kota mendukung program Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK) yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan areal tanam jagung dan meningkatkan produktivitas jagung.

5.6.2 Pemulihan Kesehatan Daerah

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, penguatan sistem kesehatan daerah diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui :

- (1) Peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas
- (2) Perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
- (3) Penurunan angka kematian ibu dan anak,
- (4) Peningkatan status gizi anak
- (5) Peningkatan promosi kesehatan dan advokasi Kesehatan,
- (6)





Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, (7) Peningkatan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan (8) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan. Semuanya dicapai melalui pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan baik mutu SPM kesehatan provinsi dan mutu SPM kesehatan kabupaten/kota.

5.6.3 Penanganan Kemiskinan Dan Eradikasi Stunting

Dalam kondisi Tatanan New Normal ini, maka perluasan pelayanan kesehatan di daerah diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui : (1) Upaya pencapaian SPM Kesehatan (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan (3) Pemberdayaan Masyarakat, dan (4) Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Rumusan program kegiatan yang dapat dilakukan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah:

1. Paradigma hidup sehat: Promosi dan preventif tatanan kehidupan baru yang sehat sesuai protokol Covid-19 melalui penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah serta Peningkatan peran serta masyarakat melalui Gerakan Masyarakat (Germas).
2. Penguatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terutama pada FKTP dan Penyediaan Faskes Bergerak (Ambulans, RS Bergerak).
3. Perluasan JKN dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat prevelensi stunting tertinggi di Indonesia. Itulah sebabnya eradikasi stunting dan penanganan kemiskinan menjadi prioritas daerah yang utama untuk ditangani pada tahun 2023, disamping tetap mengarahkan adanya pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah di destinasi-destinasi pariwisata estate. Tentu saja hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh provinsi, tetapi harus dilaksanakan bersama oleh semua pelaku pembangunan di Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat pada Gambar 5.5 berikut



Gambar 5.6 Skema Intervensi Penurunan Kemiskinan dan Stunting



Sumber: Bappelitbangda Provinsi NTT, 2023

Sedangkan, strategi dan aksi nyata penanggulangan kemiskinannya itu menggunakan 4 (empat) strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan, mendorong pengembangan UMKM, dan mensinergikan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga melalui program – program seperti pada Gambar 5.6 di bawah ini.

Gambar 5.7 Strategi dan Program Aksi Nyata Penanggulangan Kemiskinan



Penanganan Stunting yang dilakukan tidak saja memperhatikan 29 (dua puluh sembilan) indikator penyebab terjadinya stunting melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitive tetapi dari segi implementasinya,



19	Loli	Ubu Raya
20	Loli	Dede Kadu
B. KABUPATEN SUMBA TIMUR		
1	Ngadu Ngala	Kakaha
2	Matawai Lapawu	Katikuwai
3	Mahu	Lahiru
4	Pandawai	Palakahembi
5	Karera	Nggongi
6	Paberiwai	Karera Jangga
7	Pahunga Lodu	Kadembul
8	Paberiwai	Pabera Manera
9	Pahunga Lodu	Kaliuda
10	Paberiwai	Kananggar
C. KABUPATEN KUPANG		
1	Amarasi Timur	Rabeka
2	Amfoang Barat Laut	Honuk
3	Amarasi Timur	Pakubaun
4	Kupang Timur	Nunkurus
5	Fatuleu	Sillu
6	Taebenu	Bokong
7	Kupang Barat	Sumlili
8	Amarasi Barat	Tunbaun
9	Kupang Timur	Manusak
10	Amfoang Barat Laut	Soliu
D. KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN		
1	Amanuban Selatan	Linamnutu
2	Amanuban Barat	Nifukani
3	Amanuban Selatan	Batnun
4	Amanuban Selatan	Oebelo
5	Amanuban Selatan	Bena
6	Amanuban Selatan	Pollo
7	Amanuban Barat	Nulle
8	Amanuban Barat	Mnelalete
9	Amanuban Selatan	Kiubaat
10	Amanuban Selatan	Mio
11	Oenino	Hoi
12	Kuanfatu	Basmuti
13	Kolbano	Oeleu
14	Amanuban Barat	Pusu
15	Mollo Selatan	Klani/Noinbila
16	Mollo Selatan	Kesetnana
17	Amanuban Selatan	Oekiu
18	Amanuban Tengah	Oekam
19	Amanuban Barat	Haumenbaki
20	Amanuban Tengah	Ononeten
E. KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA		
1	Mutis	Naekake A

AL



2	Mutis	Tasinifu
3	Insana Utara	Humusu C
4	Insana Tengah	Tainsala
5	Insana	Oinbit
6	Bikomi Tengah	Oenenu Selatan
7	Biboki Anleu	Tuamese
8	Biboki Anleu	Ponu
9	Biboki Anleu	Sifaniha
10	Kota Kefamenanu	Maubeli
11	Bikomi Nilulat	Nainaban
12	Insana Utara	Humusu A
13	Biboki Selatan	Supun
14	Kota Kefamenanu	Kefamenanu Tengah
15	Kota Kefamenanu	Bansone
16	Bikomi Anleu	Motadik
17	Biboki Anleu	Nifutasi
18	Bikomi Tengah	Buk
19	Bikomi Tengah	Oenenu
20	Bikomi Tengah	Oenino

F. KABUPATEN BELU

1	Atambua	Kel. Manumutin
2	Tasifeto Barat	Tukuneno
3	Atambua Selatan	Kel. Fatukbot
4	Atambua Selatan	Kel. Manuaman
5	Tasifeto Timur	Manleten
6	Lamaknen Selatan	Lakmaras
7	Kakuluk Mesak	Jenilu
8	Atambua Selatan	Kel. Lidak
9	Kakuluk Mesak	Kabuna
10	Kakuluk Mesak	Dualaus

G. KABUPATEN ALOR

1	Alor Barat Daya	Probur
2	Alor Barat Daya	Tribur
3	Mataru	Mataru Barat
4	Alor Barat Laut	Dulolong
5	Alor Tengah Utara	Petleng
6	Alor Timur Laut	Waisika
7	Pantar Timur	Batu
8	Alor Timur Laut	Kenarimbala
9	Teluk Mutiara	Lendola
10	Pantar Tengah	Aramada

H. KABUPATEN LEMBATA

1	Nubatukan	Lewoleba Selatan
2	Omesuri	Meluwiting
3	Omesuri	Meluwiting I
4	Omesuri	Walangsawah
5	Omesuri	Leubatang

Al



6	Omesuri	Hingalamamengi
7	Buyasari	Roho
8	Buyasari	Benihading II
9	Buyasari	Panama
10	Buyasari	Loyobohor
I. KABUPATEN FLORES TIMUR		
1	Ile Boleng	Lewopao
2	Ile Boleng	Helanlangowuyo
3	Ile Boleng	Boleng
4	Wulanggitang	Pululera
5	Ilebura	Nobo
6	Tanjung Bunga	Waibao
7	Solor Timur	Menanga
8	Solor Timur	Lohayang II
9	Adonara Timur	Terong
10	Adonara	Sagu
J. KABUPATEN SIKKA		
1	Waiblama	Pruda
2	Magepanda	Reroroja
3	Magepanda	Kolisia
4	Waiblama	Tanarawa
5	Waiblama	Natarmage
6	Talibura	Nangahale
7	Waigete	Watudiran
8	Talibura	Hikong
9	Waiblama	Ilinmedo
10	Talibura	Talibura
K. KABUPATEN ENDE		
1	Maukaro	Kebirangga Tengah
2	Ndonga Timur	Sokoria
3	Maukaro	Kebirangga Selatan
4	Maukaro	Nabe
5	Ndonga Timur	Demulaka
6	Ndonga Timur	Roga
7	Kotabaru	Hangalande
8	Ende Utara	Kel. Roworena
9	Ndonga	Kelikiku
10	Wolojita	Pora
L. KABUPATEN NGADA		
1	Bajawa	Susu
2	Bajawa	Beiwali
3	Bajawa	Ubedolumolo
4	Aimere	Legelapu
5	Riuang Barat	Ngara
6	Bajawa	Wawowae
7	Golewa Selatan	Were III
8	Golewa Barat	Turekisa

Al



9	Bajawa	Bajawa
10	Wolomeze	Nginamanu
M. KABUPATEN MANGGARAI		
1	Cibal	Riung
2	Lelak	Bangka Lelak
3	Cibal	Rado
4	Wae Rii	Wae Rii
5	Wae Rii	Satar Ngkeling
6	Wae Rii	Wae Mulu
7	Cibal	Langkas
8	Cibal	Ladur
9	Ruteng	Pong Leko
10	Langke Rembong	Wali
N. KABUPATEN ROTE NDAO		
1	Loaholu	Oelua
2	Rote Barat Daya	Oebafok
3	Rote Barat Daya	Oebatu
4	Rote Selatan	Daleholu
5	Loaholu	Holulai
6	Loaholu	Tolama
7	Loaholu	Oebole
8	Loaholu	Tasilo
9	Loaholu	Boni
10	Loaholu	Oebela
11	Loaholu	Mundek
12	Rote Timur	Papela
13	Rote Barat Daya	Oetefu
14	Rote Barat Daya	Sakubatun
15	Rote Barat Daya	Dalek Esa
16	Rote Barat	Mbueain
17	Landuleko	Daiana
18	Landuleko	Lifuleo
19	Rote Selatan	Tebole
20	Rote Barat Laut	Hundihuk
O. KABUPATEN MANGGARAI BARAT		
1	Welak	Golo Ronggot
2	Komodo	Pasir Putih
3	Boleng	Mbuit
4	Welak	Rehak
5	Lembor	Poco Rutang
6	Lembor	Tangge
7	Lembor	Pong Majok
8	Lembor Selatan	Repi
9	Lembor Selatan	Watu Rambung
10	Lembor	Liang Sola
P. KABUPATEN SUMBA TENGAH		
1	Mamboro	Bondu Sula

Al



2	Mamboro	Ole Ate
3	Mamboro	Weeluri
4	Mamboro	Ole Dewa
5	Mamboro	Weendewa Timur
6	Mamboro	Watu Asa
7	Mamboro	Susu Weendewa
8	Mamboro	Cendana
9	Umbu Ratu Nggay	Ngadu Mbolu
10	Umbu Ratu Nggay	Lenang
Q. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA		
1	Kodi Utara	Kalena Rongo
2	Wewewa Selatan	Wee Baghe
3	Kodi Utara	Billa Cenge
4	Kodi Utara	Hoha Wungo
5	Wewewa Selatan	Weri Lolo
6	Kodi Utara	Waiholo
7	Wewewa Selatan	Buru Deilo
8	Kodi	Ate Dalo
9	Kodi	Onggol
10	Kodi	Watu Wona
11	Kodi Utara	Moro Manduyo
12	Kodi Utara	Bukambero
13	Kodi Utara	Mangganipi
14	Kodi Utara	Waitaru
15	Kodi Utara	Kadu Eta
16	Kodi Utara	Kandagu Tana
17	Kodi Utara	Kori
18	Wewewa Tengah	Weepatando
19	Kodi Balaghar	Waikarara
20	Wewewa Timur	Dangga Mango
R. KABUPATEN NAGEKEO		
1	Nangaroro	Pagomogo
2	Nangaroro	Ulupulu
3	Nangaroro	Ulupulu I
4	Mauponggo	Selalejo
5	Nangaroro	Riti
6	Nangaroro	Utetoto
7	Nangaroro	Nangaroro
8	Nangaroro	Kotakeo I
9	Keo Tengah	Wajo
10	Keo Tengah	Keli
S. KABUPATEN MANGGARAI TIMUR		
1	Rana Mese	Bea Ngencung
2	Elar Selatan	Gising
3	Rana Mese	Watu Mori
4	Poco Ranaka Timur	Rengkam
5	Rana Mese	Sita

Al



6	Elar	Haju Ngendong
7	Kota Komba	Golo Nderu
8	Kota Komba	Gunung Baru
9	Rana Mese	Lalang
10	Lamba Leda	Golo Munga Barat
T. KABUPATEN SABU RAIJUA		
1	Sabu Tengah	Eimau
2	Hawu Mehara	Lobohede
3	Sabu Barat	Raemude
4	Sabu Tengah	Eilode
5	Sabu Barat	Raekore
6	Raijua	Bolua
7	Sabu Barat	Raedewa
8	Sabu Barat	Raemadia
9	Hawu Mehara	Molie
10	Hawu Mehara	Daieko
U. KABUPATEN MALAKA		
1	Malaka Barat	Motaulun
2	Kobalima	Babulu Selatan
3	Weliman	Forekmodok
4	Kobalima	Sisi
5	Malaka Barat	Motaian
6	Wewiku	Badarai
7	Wewiku	Lorotolus
8	Weliman	Angkaes
9	Laen Manen	Naekekusa
10	Wewiku	Biris
V. KOTA KUPANG		
1	Maulafa	Sikumana
2	Kelapa Lima	Lasiana
3	Maulafa	Fatukoa
4	Maulafa	Bello
5	Kelapa Lima	Oesapa
6	Maulafa	Maulafa
7	Kelapa Lima	Oesapa Barat
8	Kota Lama	Fatubesi
9	Maulafa	Oepura
10	Alak	Batuplat

Sumber : Pemerintah Provinsi NTT, 2023

Al

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH





BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana amanat RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026 untuk tahun pertama pelaksanaannya diterjemahkan dalam rencana dan pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 yang didanai oleh APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Namun demikian, dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, dibutuhkan kerja sama dan sinergi baik dalam hal perencanaan, kebijakan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, maupun Lembaga donor/mitra.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan ini sejalan dan mendukung pencapaian sasaran dan prioritas nasional sekaligus mendukung pencapaian prioritas daerah. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diprioritaskan dalam RKPD Tahun 2024 mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2024.

Jika dikaitkan dengan Agenda pembangunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 – 2025 untuk periode keempat yang difokuskan pada aspek kehidupan dan penghidupan manusia “NTT yang maju, mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif, berdaya saing tinggi didukung oleh SDM Berkualitas” serta memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan yang tertuang dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 untuk Tahun 2024 yaitu **“Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar”** dengan 5 (lima) fokus utama pada :1). Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan; 2). Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal; 3). Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar; 4). Pencapaian dan pemenuhan SPM; 5). Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya.

Al



Prioritas pembangunan tahun 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, adalah : 1) pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, 2) pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, 3) pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana serta 4) reformasi birokrasi, yang dilaksanakan secara kolaboratif dan sinergi antar sektor dan aktor pembangunan.

Adapun pagu Anggaran per Prioritas Daerah tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut

Tabel 6.1
Pagu Anggaran per Prioritas per Perangkat Daerah Tahun 2024

PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT
1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	BADAN KEUANGAN DAERAH	910.292.801.355,73
	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	17.280.000.000,00
	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	88.005.356.471
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	32.215.049.776,00
	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10.894.327.000,00
	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.041.821.233,00
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.600.000.000,00
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	548.469.400,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.084.651.173,00
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.986.936.820,00
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	26.741.211.175,00
	DINAS PETERNAKAN	19.653.862.241,00
	DINAS SOSIAL	24.184.000.000,00
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	20.034.920.941,00
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.763.412.278,00
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.497.866.745,00
	DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	194.792.246.924,00
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.060.414.711.009,00

Al



PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT
	DINAS SOSIAL	3.986.000.000,00
	RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG	103.096.362.588,00
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.419.687.500,00
	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.899.927.160,00
	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	418.428.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	19.811.945.128,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	159.305.426.591,00
	DINAS PERHUBUNGAN	6.123.071.824,00
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.125.000.000,00
4. Reformasi birokrasi	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.824.047.207,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.588.953.973,00
	BADAN KEUANGAN DAERAH	20.000.000.000,00
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	975.333.326,00
	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT DI JAKARTA.	591.301.000,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.989.683.858,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.120.643.795,00
	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT	7.526.518.260,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.860.842.261,00
	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	17.932.238.702,00
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	74.676.943.331,00
	Total Prioritas Daerah	2.842.129.796.686
	Pagu Non Urusan	2.157.372.384.414
	Total Pagu	4.999.502.181.099

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, Tahun 2023, diolah

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai fokus yang telah ditetapkan tersebut, maka diberikan pagu indikatif anggaran pada masing-masing perangkat daerah yang digunakan untuk membiayai Program, kegiatan dan sub

Al



kegiatan juga Pembiayaan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar.

Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) harus menjadi prioritas daerah. Bentuk konkrit prioritisasi SPM dalam pembangunan daerah terlihat pada sejauh mana pelayanan dasar tersebut menjadi tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta perangkat daerah.

Perencanaan SPM atau secara teknis integrasi SPM dalam dokumen perencanaan daerah dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Sedangkan rincian penyusunan program/kegiatan/ subkegiatan SPM dan penganggaran/pembiayaan SPM dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pagu Indikatif per Perangkat Daerah untuk tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
NON URUSAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	100	2.155.842.681.866,00	Semua Perangkat Daerah	
	Meningkatnya sarana dan prasarana	%	100		Semua Perangkat Daerah	
	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	%	100		Semua Perangkat Daerah	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah			1.038.874.781.169,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SPM
	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	%	80.00.00		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB	%	76.85		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	%	85.00.00		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan SMA, SMK dan SLB berakreditasi B			7.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	1. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	%	45.13.00		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	2. Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit)	%	44.07.00	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	3. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	%	6	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun			10.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	1. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	%	27.44.00		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	2. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	%	28.60		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	3. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	%	20.07		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan Penyelesaian Proses Izin Operasional SMA, SMK dan SLB.	%		10.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.	%	53		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	%	75.00.00	230.452.640,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				164.512.554.424	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SPM
	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	%	100		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Balita Stunting	Persen (%)	15,7		Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Balita Wasting	Persen (%)	19,5		Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Balita Underweight	Persen (%)	7,5		Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Angka Kematian Ibu	Kasus/10 0.000 KH	172/100.000 KH		Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Angka Kematian Bayi	Kasus/10 00 KH	9/1000 KH		Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Angka Kematian Balita	Kasus/10 00 KH	11/1000 KH		Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	100		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria	%	70		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%	%	85		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
	Persentasi Kasus HIV Yang diobati	%	58		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar	%	60		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Persentasi jumlah penyelenggaraa n Kabupaten/Kot a Sehat	% (Kab/Kota)	36 (8 Kab/Kota)		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	70		Rs Jiwa Naimata Kupang	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				102.871.801.504	Rsud Prof. W.Z Johannes	SPM
	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	%	100		Rsud Prof. W.Z Johannes	
	Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	%	52		Rsud Prof. W.Z Johannes	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				2.777.452.800	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	%	100		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	%	100	218.039.184	Rsud Prof. W.Z Johannes	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	%	100	199.860.000	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	100	2.831.893.500	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				17.349.999.000	Dinas PUPR	SPM
	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang	M3	125,72		Dinas PUPR	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
	ketahanan pangan					
	Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	%	20		Dinas PUPR	
	Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	%	33.33.00		Dinas PUPR	
	Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	1000		Dinas PUPR	
	Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi	%	23.58		Dinas PUPR	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	%	100	4.500.000.000	Dinas PUPR	SPM
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	%	20	100.000.000	Dinas PUPR	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang Disusun	%	60	2.690.000.000	Dinas PUPR	
	Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	%	100		Dinas PUPR	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	%	0	-	Dinas PUPR	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Lokasi Penyelenggaraa n Infrastruktur Permukiman pada KSDP	Lokasi	1	1.600.000.000	Dinas PUPR	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	%	100	100.000.000	Dinas PUPR	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan	%	33.33.00	100.000.000	Dinas PUPR	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
	Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/ Kota yang disusun					
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86,86	128.811.877.591	Dinas PUPR	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	%	63,84	143.550.000	Dinas PUPR	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				200.000.000	Dinas PUPR	
	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	43,48		Dinas PUPR	
	Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	%	30		Dinas PUPR	
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman						
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				840.000.000	Dinas PUPR	
	Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	100		Dinas PUPR	
	Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi	%	100		Dinas PUPR	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	95	2.112.500.000	Dinas PUPR	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	4,55	577.500.000	Dinas PUPR	
Urusan Ketenteraman, Ketenteraman Umum Dan Linmas						
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	1.808.842.261	Satuan Polisi Pamong Praja	SPM
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki	%	100	1.419.687.500	Bpbd	SPM

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
	dokumen Kebencanaan					
	Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	%	80		Bpbd	
	Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	%	93,75		Bpbd	
	Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih	%	45,45		Bpbd	
	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki buffer stok logistik	%	100		Bpbd	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	100	52.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	80	3.457.000.000	Dinas Sosial	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	260.000.000	Dinas Sosial	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	%	100	10.300.000.000	Dinas Sosial	SPM
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	90	13.524.000.000	Dinas Sosial	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100.000.000	Dinas Sosial	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	%	80	529.000.000	Dinas Sosial	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						

AK



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	90	150.000.000	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
	Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	60		Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	75	519.662.000	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang membentuk Sarana Hubungan Industrial	%	12,40	365.000.000	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	%	65	300.000.000	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG	%	95	3.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	%	90	448.681.400	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	%	64	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	%	15	3.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kot a Layak Anak	%	9	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	%	90	83.788.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan						
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	%	20	862.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)	%	24,5	300.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	%	20	300.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	%	33.33.00	45.000.000	Dinas Pupr	
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	18.18	135.000.000	Dinas Pupr	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	%	50	24.463.142	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	%	100	490.505.567	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang diolah	%	25	984.355.840	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	%	98	872.162.700	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	%	82		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	95		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 15 PD)	%	77		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan	%	100	10.000.000	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						
PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)			43.184.393	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Desa	32 Desa Persiapan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan			555.838.472	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	141 Perbub	1 Dokumen		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kab/ Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.454 BUMdes di 21 Kabupaten	21 Kabupaten		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)			1.112.106.286	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
	Masyarakat Hukum Adat					
	Jumlah alat TTG yang diproduksi	678 Unit	20 unit		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	%	17	3.896.352.824	Dinas Perhubungan	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	%	11	2.226.719.000	Dinas Perhubungan	
	Cakupan Operasi Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan	%	33		Dinas Perhubungan	
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	85	1.072.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,5	4.990.569.734	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
	Indeks Penyelenggara n Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	PD	34		Dinas Komunikasi Dan Informatika	
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah						
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	100	2.736.326.000	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang dilatih	%	8	158.182.000	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase kelompok UMKM yang dibina	%	100	418.428.000	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
	Persentase kelompok UMKM perempuan yang dibina	%	80		Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	%	9	5.390.928.000	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal						
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pertumbuhan Investor	%	35	200.463.142	Dpmptsp	

AC



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun	%	65	195.705.136	Dpmptsp	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SO	%	100	212.583.763	Dpmptsp	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	%	100	415.899.132	Dpmptsp	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	%	61,38	60.000.000	Dpmptsp	
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan	orang	250	472.866.745	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan			7.000.000.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
	Medali	Medali	50		Dinas Pemuda Dan Olahraga	
	Cabor	Cabor	10		Dinas Pemuda Dan Olahraga	
	Peningkatan perolehan medali dari atlet paralimpik				Dinas Pemuda Dan Olahraga	
	Medali	Medali	15			
	Cabor	Cabor Atletik	3		Dinas Pemuda Dan Olahraga	
	Cabor Tradisional	Medali	5		Dinas Pemuda Dan Olahraga	
	Cabor Rekreasi	Cabor	5		Dinas Pemuda Dan Olahraga	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Organisasi (Kwarcab)	7	25.000.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	%	85	22.710.143	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	III	35.363.918	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan	%	92.05.00	2.089.297.525	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

AL



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
	(Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)					
	Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	%	60		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	%	60.00.00	5.996.386.055	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sanggar) Budaya 25 Unit)	%	24.00.00	330.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	%	37.04.00	1.477.293.620	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	%	100.00.00	4.416.500.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	%	75	818.412.278	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
	Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	%	50		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
	Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun	%	100		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/di lestarikan setiap tahun	%	50	75.000.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan						
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	100	761.500.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
	Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	Angka Pengawas an Arsip	60		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100	108.500.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
Urusan Pemerintahan Pilihan						
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan						
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	Ha	790.420	2.975.098.000	Dkp	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	200.000	24.813.592.799	Dkp	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.620.000	2.339.624.019	Dkp	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%	0,3118056	1.964.896.800	Dkp	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	kg/perkap ita/tahun	56.00.00	121.838.158	Dkp	
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara	%	100	519.769.719	Disparekraf	
	Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	%	4,17		Disparekraf	
	Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100		Disparekraf	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kot a per tahun)	%	31,82	900.000.000	Disparekraf	
	Persentase produk ekraf yang dipromosikan berbasis digital	%	33,33		Disparekraf	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan produk ekraf yang yang mendapatkan HKI	%	33,33	363.452.443	Disparekraf	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku usaha pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	%	33,33	258.599.071	Disparekraf	
	Persentase pelaku usaha Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	%	33,33		Disparekraf	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Besar	%	06.05	18.808.734.165	Dinas Peternakan	
	Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Kecil	%	11.02		Dinas Peternakan	
	Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Unggas	%	0,2708333		Dinas Peternakan	
	Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	%	0,2916667		Dinas Peternakan	
	Persentase Konsumsi Daging	%	0,4173611		Dinas Peternakan	
	Persentase Konsumsi Telur	%	03.20		Dinas Peternakan	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
	Produksi Tanaman Padi	Ton	847,240.27	23.729.211.175	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
	Produksi Tanaman Jagung	Ton	869,618.32		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
	Produksi Tanaman Sorgum	Ton	3,610.63		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
	Produksi kedelai	Ton	2,654.43		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
	Produksi kacang hijau	Ton	12,126.12		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
	Produksi Tanaman Jeruk	Ton	65,770.46		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
	Produksi Tanaman Mangga	Ton	101,061.82		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
	Produksi Tanaman Bawang Merah	Ton	13,230.50		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
	Produksi Tanaman Cabe	Ton	6,269.70			
	Produksi Tanaman Kelapa	Ton	71,065.97			
	Produksi Tanaman Kopi	Ton	28,229.32			
	Produksi Tanaman Kakao	Ton	22,502.89		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
	Produksi Tanaman Jambu Mete	Ton	57,382.95			
	Produksi Tanaman Cengkeh	Ton	4,419.00			
	Produksi Tanaman (daun basah)	Ton	3,713.15			
	Cakupan penggunaan benih bersertifikat	%	100.00.00			
	Cakupan Penggunaan Pupuk	%	17.00			
	Rasio ketersediaan alsintan	%	0,5965278			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	%	100	5.000.000	Dinas Peternakan	

AC



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	%	75	100.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak yang sehat	%	82	840.128.076	Dinas Peternakan	
	Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	Unit	43		Dinas Peternakan	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	%	75	1.125.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)	%	86.45.00	1.450.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut)	%	78.01.00		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya)	%	64.91		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama)	%	33.33.00		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan						
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	01.03	18.197.672.189	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	0,4854167	17.363.057	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	%	15.43	97.585.333	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral						
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	%	40	575.700.520	Dinas Esdm	
	Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59	%	50		Dinas Esdm	

AC



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
	Rekomendasi Teknis)					
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)	%	17	619.114.120	Dinas Esdm	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik berbasis EBT setiap tahun	% (KW)	20	87.127.050.101	Dinas Esdm	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Presentase Cakupan Rumah Tangga yang terlayani listrik	Unit	93	878.306.370	Dinas Esdm	
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	45	35.000.000	Disperindag	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun	%	3 s/d 10	138.615.068	Disperindag	
	Persentase rata-rata kenaikan barang penting per tahun	%	3 s/d 10		Disperindag	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	28,57	50.000.000	Disperindag	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	%	60	500.341.666	Disperindag	
	Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian	%	20		Disperindag	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai transaksi produk yang dipasarkan	%	60	899.916.614	Disperindag	
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan	%	1,5	270.561.372	Disperindag	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan ketaatan ijin usaha industri	%	15	42.502.100	Disperindag	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kesesuaian data informasi industri dalam mendukung Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	37	50.000.000	Disperindag	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi						
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%	89	275.000.000	Dinas Koperasi, Nakertrans	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	%	89	535.000.000	Dinas Koperasi, Nakertrans	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase unit pemukiman trnsmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	%	89	464.229.000	Dinas Koperasi, Nakertrans	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
Sekretariat Daerah						
PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat RB “Istimewa” (Kategori AA/Nilai=80-90)	%	45,45	632.137.500	Sekretariat Daerah	
	Level Maturitas Kelembagaan	Nilai	45		Sekretariat Daerah	
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,85 (Cukup)		Sekretariat Daerah	
	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	%	15,15		Sekretariat Daerah	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	%	100	820.319.213	Sekretariat Daerah	
	Persentase cakupan fasilitas Kepala Daerah dan DPRD	%	100		Sekretariat Daerah	
	Persentase Kabupaten/Kot a yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan	%	100		Sekretariat Daerah	
	Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggara n pemerintahan	%	100		Sekretariat Daerah	
	Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi	%	100		Sekretariat Daerah	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	%	100	8.796.475.476	Sekretariat Daerah	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	%	100	782.820.540	Sekretariat Daerah	
	Cakupan penanganan kasus Litigasi, Non-Litigasi dan HAM setiap tahun	%	100		Sekretariat Daerah	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro dan SDA)	%	100	562.652.782	Sekretariat Daerah	
	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kot a yang tekonsolidasi dengan baik	%	100		Sekretariat Daerah	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa	%	100	6.239.980.846	Sekretariat Daerah	
	Persentase jumlah paket pengadaan langsung yang dilakukan melalui e-Purchasing	%	100		Sekretariat Daerah	
	Persentase JF Pengelola PBJ	%	64		Sekretariat Daerah	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	%	100	97.852.345	Sekretariat Daerah	
Sekretariat DPRD						
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	74.676.943.331	Sekretariat DPRD Provinsi Ntt	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
Perencanaan						
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	%	100	1.997.630.556	Bappelitbangda	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan	%	100	4.806.925.005	Bappelitbangda	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
	Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
KEUANGAN						
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	%	100	910.292.801.356	Badan Keuangan Daerah	
	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kot a yang difasilitasi tepat waktu	%	100		Badan Keuangan Daerah	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	2.255.000.000	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	
	Persentase pemanfaatan aset	%	100		Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	
	Persentase Pemindahtangan an dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100		Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	22	15.025.000.000	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	
Kepegawaian						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	85	3.824.047.207	Badan Kepegawaiaandaerah	
	Presentase Penurunan indisipliner ASN	%	90		Badan Kepegawaiaandaerah	
	Persentase Capaian Kinerja “BAIK” ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	%	95		Badan Kepegawaiaandaerah	
	Presentase Penurunan indisipliner ASN	%	90		Badan Kepegawaiaandaerah	
Pendidikan Dan Pelatihan						
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Predikat akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Predikat Akreditasi	A	20.034.920.941	Bpsdm	
	Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	Predikat Akreditasi	A		Bpsdm	
	Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Predikat Akreditasi	B		Bpsdm	
	Akreditasi Program Pelatihan	Predikat Akreditasi	B		Bpsdm	

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
	Kepemimpinan Administrator					
	Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional	%	20		Bpsdm	
	Pelatihan sesuai standar	%	100		Bpsdm	
	Pelatihan sesuai kebutuhan	%	100		Bpsdm	
	Tersertifikasinya tenaga pelatihan pada BPSDMD	%	100		Bpsdm	
	Terisinya formasi jabatan fungsional widyaiswara sesuai formasi	%	100		Bpsdm	
	Tersedianya tenaga ahli atau narasumber sesuai kebutuhan pelatihan	%	100		Bpsdm	
Penelitian Dan Pengembangan						
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	%	100	1.185.128.297	Bappelitbangda	
Pengelolaan Perbatasan						
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	%	100	975.333.326	Badan Perbatasan Daerah	
	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	100		Badan Perbatasan Daerah	
	Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	%	100		Badan Perbatasan Daerah	
Pengelolaan Penghubung						
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Meningkatnya Cakupan Pembinaan Masyarakat	%	80	591.301.000	Badan Penghubung	
	Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	%	80		Badan Penghubung	
	Meningkatnya cakupan Promosi Daerah	%	80		Badan Penghubung	
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
Inspektorat Daerah						

Al



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah	SPM
			Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini BPK	Opini	WTP	5.767.233.792	Inspektorat Daerah	
	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pada PD di Provinsi dan Kabupaten/Kot a	%	100		Inspektorat Daerah	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD di Provinsi	%	100	1.759.284.468	Inspektorat Daerah	
Unsur Pemerintahan Umum						
Kesatuan Bangsa Dan Politik						
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	%	70	1.355.556.698	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM	%	73	3.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakata n dan Ijin penelitian.	%	70	40.523.684	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas	%	70	300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	63	1.850.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	
TOTAL NON URUSAN (A)				2.157.372.384.414		
TOTAL URUSAN (B)				2.842.129.796.686		
JUMLAH TOTAL (A+B)				4.999.502.181.099		

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, Tahun 2023, diolah

Al



Salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Penelaahan pokok-pokok Pikiran DPRD, hal ini disebutkan pada beberapa Pasal yaitu Pasal 78, Pasal 153, Pasal 178 dan Pasal 348 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/ kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Adapun Rincian Pokok-poko pikiran DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Rekapan Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD tahun 2024

Perangkat Daerah	Usulan				Total Usulan	Total Pagu Pokir
	Usulan di Tolak	Verifikasi Perangkat Daerah	Verifikasi TAPD	Usulan Disetujui		
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	8				8	-
Dinas Energi Sumber Daya Mineral	3	23			26	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	0			34	34	11.890.000.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0			31	31	4.240.000.000,00
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2		114	110	226	1.500.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15			16	31	11.500.000.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1			16	17	77.250.000.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2			29	31	313.600.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7			121	128	5.174.500.000,00
Dinas Peternakan	7			28	35	19.643.150.000,00
Dinas Sosial	30	1109			1139	11.090.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	0			78	78	1.480.000.000,00
Grand Total	75	1132	114	463	1784	144.081.250.000,00

Al

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 berdasarkan pada hasil capaian kinerja tahun 2022, dan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah dan indikator kinerja urusan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa kinerja diukur dengan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan mandat (core business) yang diemban. IKU diambil dari indikator sasaran yang sifatnya strategis.

Indikator Kinerja Utama sesuai RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut pada Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2022	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,05	3,1
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3,10	2,66 – 3,37
3	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.877	7.598
4	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20,23	20-19,63
5	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	23,30	24,71

Al



No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2022	Target 2024
6	Indeks Pembangunan Gender (%)	92,96	93
7	Indeks Gini (Poin)	0,336	0,336-0,338
8	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	67.9	68
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	65,90	66,58-66,73
10	Rata-rata lama sekolah (Poin)	7,70	7,75
11	Harapan lama sekolah (Poin)	13,21	14,2
12	Usia Harapan Hidup (Poin)	67,47	67,5
13	Prevelensi Stunting (%)	15	12-10
14	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	90	100
15	Rasio Konektivitas Provinsi	NA	92
16	Ratio Elektrifikasi (%)	89,01	93
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73,29	73,62
18	Indeks Resiko Bencana (Poin)	142,52	140
19	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	61,5	63-64
20	OPINI BPK	WTP	WTP
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	BB	A
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,22	2,3
23	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	88,38	88
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	NA	85
25	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	NA	82,4

Sumber: RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu kiranya ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode

Al



waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (outcome) merupakan indikator kinerja program yang terdiri dari Program Perangkat Daerah dan Program Prioritas atau Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan. Indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah seperti pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	-	Pertumbuhan PDRB	%	2,51	3,1	4,33-5,13
	-	Laju Inflasi	%	2,91	3,5 ± 1	3,5 ± 1
	-	PDRB per Kapita	(Rp. Juta)	19,2	20,5	22,5
	-	Indeks Gini	Poin	0,339	0,35-0,34	0,34-0,32
	-	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	01,05	0,06458333	0,052083333
	-	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	3,96	3,63	3,25
	-	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65,28	66,58-66,73	67,02-67,25
	-	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,69	7,75	8,2
	-	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,77	2,66 – 3,37	2,25-2,05
	-	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,15	24,71	26,85
	-	Umur Harapan Hidup	Tahun	67,15	67,5	69
	-	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73,78	74,05	75,25
	-	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
	-	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	67,9	68	68,5
B	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	Layanan Urusan Wajib Dasar					
1	Pendidikan Menengah					
	-	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA)	Tahun	54,29	55,15	56,5
	-	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA	%	75,77	76	78
2	Urusan Kesehatan					
	-	Kasus Kematian Ibu	Kasus	118	0	0
	-	Kasus Kematian Bayi	Kasus	913	0	0
	-	Kasus Kematian Balita	Kasus	1.05	0	0
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	-	Persentase Jalan Provinsi dalam KondisiMantap	%	85	100	100

Al



No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
	-	Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	70	77	90
	-	Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	%	73	83	90
	-	Persentase Rumah tangga dengan Sanitasi Layak	%	60	77	90
	-	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang	%	41,7	50,73	60
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	-	Ratio Rumah Layak Huni	Ratio	50	55	60
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
	-	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100
	-	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100
	-	Persentase Kabupaten/kota yang menetapkan dokumen resiko bencana	%	85	87	95
6	Urusan Sosial					
	-	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	70	80	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
7	Urusan Tenaga Kerja					
	-	Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	26,02	24,36	21,02
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	-	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi	%	10,16	30	30
	-	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani	%	60	75	100
	-	Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani	%	60	75	100
9	Urusan Pangan					
	-	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100
	Urusan Pertanian					
10	-	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	50	55	60
11	Urusan Lingkungan Hidup					
	-	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi		Ada	Ada	Ada
12	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil					

Al



No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
	-	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	-	Persentase Posyandu Aktif	%	70	75	80
	-	Persentase BUMDes Aktif	%	80	85	90
	-	Persentase PKK Aktif	%	90	95	100
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	-	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak per wanita	2,79	2,27	2,23
14	Urusan Perhubungan					
	-	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	50	74,81	80
15	Urusan Komunikasi dan Informatika					
	-	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	80	95	100
16	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
	-	Persentase Koperasi Aktif	%	60	65	75
	-	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Masif	%	20	25	35
17	Urusan Penanaman Modal					
	-	Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rp.T	5	5,5	6,5
18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
	-	Cakupan Pembinaan Wirausaha Muda	%	80	90	100
	-	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	80	90	90
19	Urusan Statistik					
	-	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak	Tidak	Ada	Ada
20	Urusan Kebudayaan					
	-	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100
21	Urusan Perpustakaan					
	-	Persentase Angka kunjungan Perpustakaan per Tahun	%	75	100	100
21	Urusan Kearsipan					
	-	Pengelolaan Arsip secara Baku	%	90	100	100
	Layanan Urusan Pilihan					

Handwritten signature or mark.



No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
22	Urusan Pertanian					
	-	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	30,01	31	33
23	Urusan Pariwisata					
	-	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.634.144	1.725.123	1.926.234
	-	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3	4	5
24	Urusan Kehutanan					
	-	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,02	1,14	1,3
25	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					
	-	Rasio Elektrifikasi (%)	Ratio	89,01	95	97
26	Urusan Kelautan dan Perikanan					
	-	Nilai Tukar Nelayan	Poin	105	106	106,8
27	Urusan Perindustrian					
	-	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	10	12	16
27	Urusan Perdagangan					
	-	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	10	12	16
28	Urusan Transmigrasi					
	-	Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	%	80	100	100
	Penunjang Urusan					
29	Urusan Perencanaan Pembangunan					
	-	Persentase Penjabaran Program RPD ke dalam RKPD	%	100	100	100
	-	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100
30	Urusan Keuangan					
	-	Waktu Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
31	Urusan Kepegawaian					
	-	Persentase Ketercapaian pengisian Sikinerja	%	NA	100	100
32	Pendidikan dan Pelatihan					
	-	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	NA	50	60
33	Urusan Penelitian dan Pengembangan					
	-	Capaian Indeks Inovasi Daerah	Poin	13.852	13.852	13.852

Al



No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Tahun 2024	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
	-	Capaian Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4,008	4,008	4,008
33	Urusan Pengawasan					
	-	Persentase tindak lanjut temuan	%	100	100	100
34	Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat					
	-	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	76,33	100	100
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Nilai Tukar Petani		Poin	101,31	102	104
2	Rasio Ketergantungan		%	64,1	63	60
3	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)		%	55,83	60	62

Indikator Kinerja Urusan (IKUR) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan sesuai hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan. Indikator kinerja Urusan meliputi kinerja urusan Pemerintahan daerah seperti pada Tabel 7.3

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Urusan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim Inklusivitas SMA	Nilai	81.55.00	84.36.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53.61	48.65
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	100	100
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61.79	59.83
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang	%	100	100

Handwritten signature/initials.



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus			
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56.31.00	53.16.00
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64.18.00	57.06.00
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54	49.94
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65.96	65.01.00
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	90	94
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69.70	69.51.00
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62.84	48.76
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54.56.00	51.77
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	79	89.05.00
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64.83	60.97
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim keamanan SMA	Nilai	84.78	88.66
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim keamanan SMK	Nilai	85.31.00	85.76

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim keamanan SDLB	Nilai	87.88	87.06.00
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim keamanan SMPLB	Nilai	85.73	85.95
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim keamanan SMALB	Nilai	84.25.00	80.05.00
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim kebinekaan SMA	Nilai	85.33.00	86.95
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim kebinekaan SMK	Nilai	86.67	84.47.00
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim kebinekaan SDLB	Nilai	92.39.00	85.72
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim inklusivitas SMALB	Nilai	85.98	86.24.00
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim inklusivitas SMPLB	Nilai	86.48.00	83.13.00
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim Inklusivitas SDLB	Nilai	83.58.00	78.96
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	80.82	82.96
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim kebinekaan SMALB	Nilai	78.51.00	73
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	80.36.00	76.97
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	%	14	10
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	%	27.05.00	27.05.00
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun		21.08	
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR	kabupa ten/kot a	474	20
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	90	100

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	90	85
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	kabupaten/kota	405	15
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	100	100
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV		95	
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	83	40
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase FKTP terakreditasi	%	100	100
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Presentase rumah sakit yang terakreditasi		100	
42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	%	96	96
43	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Kab/Kota yang mencapai eliminasi kusta		514	
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100
45	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)		7	
46	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	%	100	100

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			Berpotensi Bencana			
47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Presentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi rutin	%	75	95
48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	%	30.45.00	23
49	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Panjang infrastruktur pengendalian banjir/ abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan provinsi		35	
50	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi		1	
51	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun		34125	
52	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi		143826	
53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Tambahan Debit Air Baku		11.43	
54	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Fasilitas Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kasus	9	0
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses	%	90	80

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman			
56	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	%	15	30
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	100	55
58	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	100	95
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	75	72.05.00
60	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan andal	Persentase Kabupaten/ Kota dengan bangunan gedung yang sudah memenuhi PBG dan SLF	%	100	100
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi	Jumlah Tenaga kerja konstruksi ahli bersertifikat di wilayah provinsi		50	
62	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya Rumah Layak dan Terjangkau	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau		70	
63	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Fasilitas Pembiayaan Penyediaan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/ Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)		220000	

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
64	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100
65	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Ha	1000	10
66	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	100
67	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Fasilitas Pembiayaan Penyediaan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan		161540	
69	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu		1520.70	
70	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitas Pemerintah		261565	
71	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha		355387	
72	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota		10	

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
73	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)		10000	
74	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar		75000	
75	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas		250910	
76	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	100	100
77	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Jumlah aparatur terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	%	25	25
78	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100
79	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Jumlah daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah	%	100	100

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
80	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kab upaten/kota yang ditangani	%	100	100
81	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	%	20	20
82	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase pemberkasan penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda yang bersanksi pidana	%	30	30
83	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	%	80	80
84	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP	%	30	30
85	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	%	40	40
86	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota	%	20	20
87	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Jumlah daerah yang telah membentuk struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat	%	50	50

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
88	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat)	%	50	50
89	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100	100
90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100
91	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	100	100
92	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	100	100
93	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100
94	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	%	50	50
95	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa	Perda/Perkada	10	10

Handwritten signature



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			dan kerusuhan massa) yang ditetapkan			
96	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan	Dokumen	1	1
97	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Orang	5	5
98	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota	%	30	30
99	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana	%	100	100
100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase pendampingan pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota	%	100	0
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	%	25	25
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTER AMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur		1	1

Handwritten signature or mark.



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25	25
104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial		100	
105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	70	100
106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100	1008
107	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3400	2800
108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3400	84
109	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi	%	100	100

Handwritten signature



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			kebutuhan dasarnya di dalam panti			
110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100
111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100
112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB)		38	
113	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		340	
114	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah Warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan		2847	
115	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tersedianya Data Fakir Miskin	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center		864	
116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi		100	
117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan		1000	

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga		25	
119	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial		100	
120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Sosial dan non alam yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial		50000	
121	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti		100	
122	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		136	
123	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tersedianya Data Fakir Miskin	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam DTKS		200	
124	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan		2	
125	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah		100	

Handwritten signature or mark.



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			tanggap darurat bencana provinsi			
126	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		10	
127	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial		25000	
128	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		1360	
129	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah TJSLBU yang mendapatkan pembinaan		200	
130	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial		100	
131	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		2720	
132	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti		100	
133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		5000	

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
134	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tersedianya Data Fakir Miskin	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya		7230	
135	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia di rumah singgah/shelter		514	
136	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti		100	
137	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		340	
138	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar		10230	
139	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		100	
140	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga		25	
141	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar		100	

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
142	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya		26188	
143	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		2	
144	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar		3400	
145	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		1	
146	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penuluruhan keluarga		680	
147	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		100	
148	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial		7500	
149	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses		136	
150	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah paket bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		514	
151	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang		200	

Handwritten signature



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			Mendapatk n Penguatan			
152	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		135000	
153	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependuduk an di dalam panti		50	
154	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatka n asistensi rehabilitasi sosial		100	
155	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti		68	
156	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		514	
157	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependuduk an di dalam panti		50	
158	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti		1	
159	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		136	
160	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatk an paket perbekalan		50	

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			kesehatan di rumah singgah/shelter			
161	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tersedianya Data Fakir Miskin	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		514	
162	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		25	
163	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana kelompok rentan		6750	
164	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat		10000000	
165	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tersedianya Data Fakir Miskin	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center		514	
166	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan		850	
167	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)		10000000	
168	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan		204330	

Handwritten signature or mark.



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			Kesiapsiagaan Dan Mitigasi			
169	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kab/Kota		514	
170	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha		7500	
171	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tersedianya Data Fakir Miskin	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar		7230	
172	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial		38	
173	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan		135000	
174	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial		38	
175	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		100	
176	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		100	

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
177	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme		250	
178	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional		2000	
179	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako		18800000	
180	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan		135000	
181	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi		38	
182	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		1700	
183	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2		100	
184	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	11289510	10000
185	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	50000	2000
186	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil	Orang	325000	2000

Handwritten signature



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			pelatihan kerja			
187	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	75	75
188	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Orang	2164920	50
189	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	11289510	36000
190	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	91.30.00	92.08.00
191	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	%	0,386111111	02.05
192	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100
193	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	64.34.00	50
194	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	79.16.00	75.05.00
195	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
196	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya pemanfaatan pangan yang berkualitas dan terjaminnya keamanan dan mutu pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	80.00.00

Handwritten signature



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
197	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	30971	330.44.00
198	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya pemanfaatan pangan yang berkualitas dan terjaminnya keamanan dan mutu pangan	Skor Pola Pangan Harapan		95.02.00	76
199	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	Persentase daerah rentan rawan pangan		12	
200	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	300614	22200
201	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	130700	4400
202	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	70	95
203	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69.74	73.55.00
204	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	75	75
205	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	76	2
206	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	99	99
207	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
208	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Pemanfaatan data kependudukan	%	100	80
209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100
210	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan	%	100	100
211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%	100	100
212	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	6.444	30
213	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya status Perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Nilai	58.07.00	56.06.00
214	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien	Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	Desa	7.500	11
215	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUM Desa Maju	Bumdes	1.800	5
216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Maju	Bumdes Bersama	200	4
217	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Desa	7.500	111

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	Orang	13.494	100
219	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang	Bumdes Bersama	300	8
220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	9.152	1.195
221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUM Desa Berkembang	Bumdes	10.000	40
222	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Berkembang	Desa	59.291	1.460
223	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	63.41.00	52.29.00
224	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18	14
225	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61	58.20.00
226	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	07.04	26.52.00
227	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	02.01	02.27
228	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	On Time Performance Layanan Transportasi		82.08.00	
229	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan		88.05.00	

Handwritten signature



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			Publik Sektor Transportasi			
230	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio konektivitas Provinsi		0,529861111	
231	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkat an		1,007638889	
232	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	%	65	35
233	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatk an akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100	100
234	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	90	90
235	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase Kabupaten/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	50	25
236	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatka n literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	2	2
237	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tem a: protokol kesehatan,	%	85	75

Handwritten signature



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi			
238	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	100
239	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Orang	100	100
240	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	100
241	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	74	85
242	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	85	85

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
243	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	%	85	50
244	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	4	33
245	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	4	4
246	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	20	7
247	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	Persentase Koperasi Berkualitas	Persentase	10	7
248	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	75	4
249	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp	1.293	05.31
250	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir	%	40	28.52.00
251	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Provinsi	Dokumen	1	1
252	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	terbentuknya tim koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat provinsi	Dokumen	1	1
253	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
254	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	Indeks Pembangunan Pemuda	Index	57.67	57.40.00
255	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	%	100	85
256	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	85
257	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	%	100	85
258	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	85
259	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	80	1
260	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	daerah	32	1
261	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	50	1

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
262	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV	Orang	500	5
263	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	%	100	62.02.00
264	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	23.06	25.93
265	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	02.04	0,108333333
266	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	15.00	0,646527778
267	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	50.00.00	0,713888889
268	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni		50.00.00	
269	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung		02.04	

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			pertunjukan seni			
270	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah		15.00	
271	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		23.06	
272	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	00.50	00.02
273	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Pemajuan Kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	00.56	40
274	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	61.62	0,610416667
275	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	15	75.00.00
276	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71	67.03.00
277	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	Provinsi /Kab/Kota	32	7
278	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi	Rekomendasi	32	21
279	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	738836	3000

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
280	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Penerapan e-Arsip terintegrasi	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	Provinsi /Kab/Kota	158	23
281	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Pengguna	452194	2700
282	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Dokumen	1	1
283	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	21430000	1700000
284	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Konsumsi ikan	Kg/KAP /TH	58.76	56
285	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	Forum	1	1
286	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8350000	210000
287	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Dokumen	1	1
288	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	17800000	790420
289	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi garam	Ton	2000000	20000
290	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa	Dokumen	1	1

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			kepatuhannya			
291	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Provinsi	10	1
292	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	Kelompok	1110	110
293	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Operasi kapal perikanan tangkap/speedboat pengawas	Dokumen	1	1
294	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	1,347E+12	4,01069E+11
295	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Kontribusi PDRB Pariwisata	%	04.05	05.02
296	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1500000000	2700000
297	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis Tebu		01.33	
298	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis kedelai	%	0,060416667	-5.78
299	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kakao	%	00.29	04.22
300	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80.05.00	93.00.00
301	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Jumlah Produksi Susu	Ton	815390	48
302	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis lada	%	0,043055556	0,166666667
303	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kelapa	%	05.51	04.52

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
304	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kopi	%	00.24	02.32
305	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis Cengkeh	%	0,095138889	04.28
306	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis jagung	%	0,086111111	-2.31
307	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis pala	%	00.00	03.04
308	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis padi	%	0,108333333	0,139583333
309	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis bawang merah	%	0,098611111	00.28
310	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	4710620	64071.31
311	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	95	27.39.00
312	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	75.80	82.68
313	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	45	25.20.00
314	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan	%	50	75.00.00

Handwritten signature



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			gan bencana DPI tanaman hortikultura			
315	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis cabai	%	0,186805556	00.08
316	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulan gan bencana DPI tanaman pangan	%	60.80	75.00.00
317	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulan gan bencana DPI tanaman perkebunan	%	40	50
318	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Jumlah Produksi Telur	Ton	6465230	19000
319	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis karet	%	0,084722222	0
320	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	1500670.98	2880
321	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	30000	500
322	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi	%	100	97
323	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	100	99
324	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	19.05	30.48.00
325	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	92	92
326	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	0,351388889	2
327	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang	%	05.09	05.09

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
			Kebutuhan Pokok			
328	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan	Inflasi Pangan Bergejolak	%	5	5
329	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)	%	50	50
330	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	55	55
331	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	90
332	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Tertib Usaha	%	90	90
333	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	75	50
334	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	0,940277778	315350
335	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	0,8125	01.07
336	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	08.40	4
337	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	181.59.00	0.025
338	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	613.85	0,052083333

Al



No	Bidang Urusan	Kinerja Urusan	Indikator	Satuan	Target Nasional 2024	Kesepakatan Target 2024
339	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	46.10.00	31.83
340	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index	57.50.00	48.20.00
341	PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya tata kelola infrastruktur di Kawasan Perbatasan	Persentase tata kelola infrastruktur di Kawasan Perbatasan		25	
342	PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya tata kelola batas darat, batas laut, dan batas udara	Persentase peningkatan tata kelola batas darat, batas laut, dan batas udara		25	
343	PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya tata kelola perdagangan di Kawasan Perbatasan	Persentase tata kelola perdagangan di Kawasan Perbatasan		25	
344	PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya tata kelola pelayanan pendidikan di Kawasan Perbatasan	Persentase tata kelola pelayanan pendidikan di Kawasan Perbatasan		25	
345	PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan di Kawasan Perbatasan	Persentase peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan di Kawasan Perbatasan		25	
346	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Kinerja Ormas		67	
347	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	78.66	82.40.00
348	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Kewaspadaan Nasional		64	
349	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Jumlah provinsi dengan indeks kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kategori baik	Jumlah provinsi berkinerja baik		30	
350	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	Rekomendasi kebijakan		22	

Al

BAB VIII

PENUTUP





BAB VIII PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2024 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Persyaratan utama dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan adalah koordinasi dan sinkronisasi serta kolaborasi dalam rangka keterpaduan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari swasta, maupun pendanaan melalui NGO dan Mitra Pembangunan lainnya.

Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang dari setiap jenjang pemerintahan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 selain keterpaduan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPD) provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, serta RPJPD dan RPJPN. Oleh karena itu RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka pendanaan dan pelayanan umum pemerintah serta dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk koordinasi perencanaan, masing-masing perangkat daerah wajib menyempurnakan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sesuai RKPD 2024 sebagai berikut:

1. Usulan pembangunan tahun 2024 harus di dukung dengan perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan harus dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa *Survey Investigation Design (SID)*, proposal dan TOR sesuai jenis program/kegiatan;
2. Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan tahun 2024, maka Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda/BP4D/Bappelitbang Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara intensif berkoordinasi sehingga masing-masing perangkat daerah terkait Tingkat Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pengusul memenuhi kewajibannya;
3. Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur

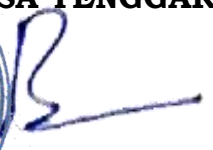


usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh perangkat daerah Provinsi;

4. Untuk usulan strategis program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maka usulannya disiapkan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
5. Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku;

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (PD) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerjanya dan juga sebagai dokumen acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2024 selanjutnya.

Semua perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RKPD Tahun 2024 ini.

**GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT